

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DERAH

4.1 URUSAN WAJIB

4.1.1 Dinas Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa program di bidang pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan. Anggaran belanja langsung untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui APBD Tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp143.010.700.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp133.690.723.178,00 atau sebesar 93,48%. Adapun anggaran yang tidak terserap pada anggaran Dinas Pendidikan melalui APBD Tahun 2011 sebesar Rp9.319.976.822,00 atau (6,25%) dapat dijelaskan sebagai berikut :

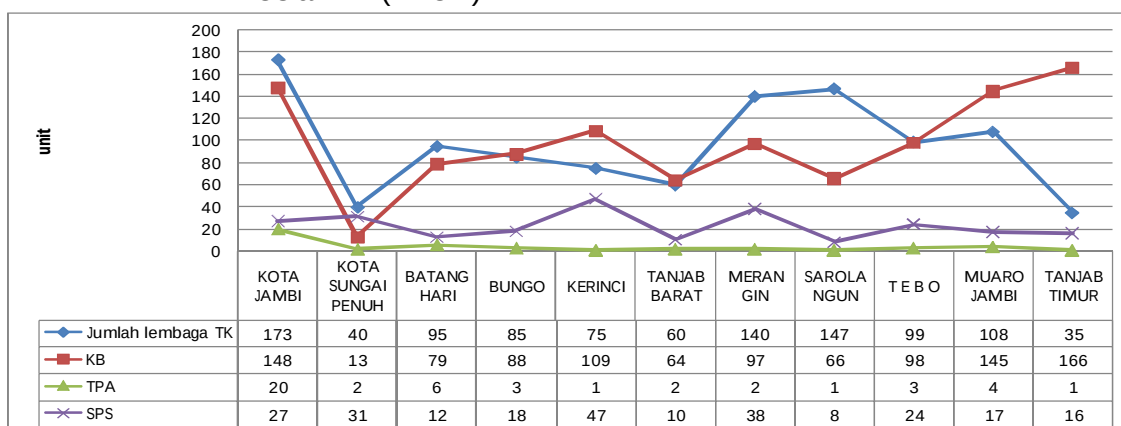
1. Pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan nonformal, karena Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal di Provinsi Jambi belum terbentuk
2. Kegiatan sertifikasi ISO SMK baru terserap untuyk sosialisasi, sementara untuk sertifikasinya tidak dapat dilaksanakan
3. Kegiatan Bimbingan kemampuan berbahasa inggris (Toefl) calon mahasiswa Strata 2 dan Strata 3 belum dapat dilaksanakan
4. Sisa anggaran penawaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
5. Sisa anggaran unit cost transportasi, setelah disesuaikan dengan standar biaya umum

Pada tahun 2011 Dinas Pendidikan mempunyai 12 program dan 104 kegiatan, adapun program yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

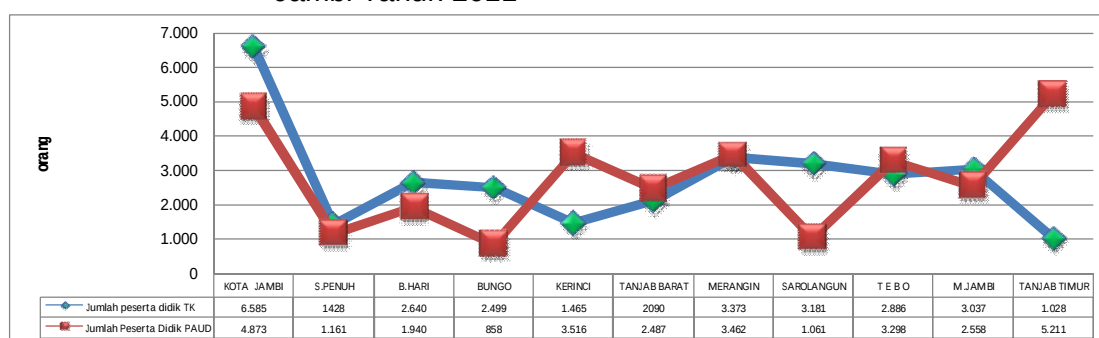
Target Nasional bagi pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 adalah 75% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan pendidikan. Di Provinsi Jambi terdapat peningkatan angka partisipasi dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya dalam akses layanan PAUD. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dan peserta didik setelah difasilitasi dengan penyediaan anggaran untuk pendidikan anak usia dini baik yang bersifat rintisan program maupun pembinaan kelembagaan antara lain telah berupaya melaksanakan pembangunan pendidikan dengan berbagai kegiatan antara lain mengupayakan biaya Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 298 lembaga, Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 6 Ruang, Renovasi/Rehab Gedung PAUD 2 Paket dan Pembangunan Rumah Pintar 2 Unit, sehingga kondisi Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Taman Kanak-Kanak dapat digambarkan pada tabel berikut:

Gambar 4.1 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Sumber dana Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selain bersumber dari unsur masyarakat sebagai wujud partisipasinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp3.674.728.081,00. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pendampingan *Early Childhood Education and Development* (ECED), Penyelenggaraan Gebyar PAUD, Pembinaan Rintisan PAUD jenis Kelompok Bermain dan TPA, Penyelenggaraan Lomba Kreativitas siswa TK, peningkatan Manajemen Gugus PAUD Formal dan pengadaan Meubelair Taman Kanak-Kanak.

Gambar 4.2. Jumlah peserta didik TK dan PAUD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2011



Akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini, tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni dari 58,43% tahun 2010 menjadi 64,80% pada tahun 2011.

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Secara umum program pendidikan dasar bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, disamping itu program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp48.447.991.980,00 dengan penggunaan dana adalah: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP,

pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A, pembinaan Olimpiade Sains Siswa SD, rehabilitasi Ruang Kelas SD, pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B, pengadaan Meubelair Pengganti SD, pendampingan Pengelolaan Dana BOS Provinsi dan sebagainya.

Pada jenjang SD/MI telah dibangun 1 Unit Sekolah Baru di Kota Jambi, pembangunan Ruang Kelas Baru 22 Ruang, Renovasi/Rehab SD 36 paket, Pembangunan Perpustakaan 3 Unit, Pembangunan Pagar SD/MI 22 paket, pemasangan papin/cornblock 5 paket, pembangunan ruang UKS 2 paket, penyediaan/renovasi fasilitas sanitasi 4 paket. Pada jenjang SMP/MTs telah dibangun 15 Ruang Kelas Baru, merenovasi/rehab gedung SMP/MTs sebanyak 22 paket dan perbaikan fasilitas sanitasi 2 paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar secara umum bukan dari masalah infrastruktur layanan, permasalahan lebih kepada unsur motivasi peserta didik maupun kesungguhan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya serta pihak pengelola pendidikan dalam proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan, sehingga apa yang diperoleh dalam proses pendidikan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap berupaya menganggarkan pembiayaan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik, sehingga diharapkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh masih terdapatnya Guru yang belum berkualifikasi Strata 1 sebagaimana harusnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dapat terpenuhi.

Tabel 4.1 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

N0	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	226	64.281	62	22.681
2	Kota Sungai Penuh	72	10.053	10	2.879
3	Kab. Batanghari	212	31.432	50	7.660
4	Kab. Bungo	245	37.915	60	11.054
5	Kab. Kerinci	229	25.039	54	8.063
6	Kab. Tanjab Barat	205	24.076	71	5.164
7	Kab Merangin	290	40.589	61	6.675
8	Kab. Sarolangun	226	32.417	58	7.035
9	Kab. Tebo	244	36.637	54	12.185
10	Kab. Muaro Jambi	218	36.063	67	10.503
11	Kab. Tanjab Timur	203	25.832	43	5.973
JUMLAH		2.370	364.334	590	99.872

Implementasi dari program ini telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 98,74% tahun 2010 menjadi 99,80% pada tahun 2011. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB juga mengalami peningkatan 100,96% tahun 2010 menjadi 115% pada tahun 2011. Untuk lulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) SD mencapai 99,87%, dan untuk SMP tercatat lulus Ujian Nasional (UN) sebesar 99,74%, sementara siswa SD/MI/SDLB yang melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB di tahun 2011 sebesar 99,89. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah atas sebesar 83,70%.

3. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK).

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp43.389.063.620 pada jenjang SMA telah melaksanakan Renovasi/Rehabilitasi sekolah sebanyak 17 paket, pembangunan Ruang Kelas Baru 14 Ruang, pembangunan Laboratorium 6 Ruang, pembangunan perpustakaan 2 Ruang, pembangunan penunjang/fasilitas lainnya sebanyak 24 paket. Pada jenjang SMK telah dilaksanakan pembangunan 1 Unit Sekolah Baru, pembangunan 10 Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi/Renovasi sekolah 9 paket, pembangunan ruang penunjang lainnya 6 unit, pembangunan laboratorium 4 unit. Selain pada jenjang pendidikan umum, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah melaksanakan perhatian terhadap fasilitas pendidikan pada Pondok Pesantren antara lain dengan Pembangunan 4 Ruang Kelas Baru, 3 Paket Rehabilitasi dan 1 paket pembangunan fasilitas sanitasi. Dengan harapan satuan pendidikan pada jenjang menengah yang tersebar diwilayah Provinsi Jambi dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Tabel 4.2 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah SMA		Jumlah SMK	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	41	14.710	33	7.072
2	Kota Sungai Penuh	9	951	5	908
3	Kab. Batanghari	13	5.652	6	502
4	Kab. Bungo	18	4.593	15	759
5	Kab. Kerinci	13	4.204	6	347
6	Kab. Tanjab Barat	24	4.054	9	140
7	Kab Merangin	18	3.686	13	225
8	Kab. Sarolangun	18	2.341	24	1.211
9	Kab. Tebo	19	5.364	11	2.843
10	Kab. Muaro Jambi	18	5.519	10	792
11	Kab. Tanjab Timur	12	3.390	7	462
JUMLAH		203	54.464	139	15.261

Sumber : Masterplan Pendidikan thn.2011

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi pada Jenjang PAUD sebesar 64,8% jenjang pendidikan dasar (SMP) yaitu 101% dan jenjang pendidikan menengah 76,4%. Selain hal tersebut, untuk menunjang proses belajar mengajar, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah mengadakan dan mendistribusikan Meubeler, Alat Permainan Edukatif (APE) dan beberapa perangkat komputer/laptop.

Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mengupayakan anggaran Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi peserta kursus dan pelatihan di 66 lembaga. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, telah dilaksanakan berbagai pelatihan terhadap 650 orang Pendidik Sekolah Dasar, 452 orang Tenaga Pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 748 orang Pendidik SMA/SMK dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Disamping itu pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jambi melalui program SAMISAKE yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka mencegah terjadinya putus sekolah dan peningkatan kualifikasi serta kompetensi memberikan beasiswa bagi peserta didik/mahasiswa bagi keluarga miskin di 50 Kecamatan yang terdiri dari 4.772 siswa SD/MI; 1.632 Siswa SMP/MTs; 535 siswa SMA/MA/SMK dan 103 Mahasiswa Strata 1, disamping itu disediakan juga beasiswa bagi siswa yang belajar pada satuan pendidikan Diniyah/Tsanawiyah sebanyak 140.757 siswa, beasiswa Strata 1 Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebanyak 125 orang, beasiswa Strata 2 bagi Tenaga Pendidik sebanyak 40 orang, beasiswa Strata 2 bagi Non Pendidik sebanyak 677 orang, beasiswa Strata 3 sebanyak 134 orang serta beasiswa meningkatkan kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD dan Sekolah Dasar sebanyak 7.621 orang.

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan Ujian Nasional bagi peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK. Ujian Nasional pada Jenjang SD Negeri telah diikuti oleh 55.388 siswa dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 7,16, Matematika 6,82, IPA 7,27 jumlah nilai rata-rata 21,25 sedangkan pada SD Swasta telah diikuti oleh 2.234 siswa dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 7,64, Matematika 7,21 dan IPA 7,67 jumlah nilai rata-rata 22,52 ini menunjukkan bahwa perolehan nilai pada SD swasta sedikit lebih tinggi dibanding perolehan nilai siswa SD Negeri.

Tabel 4.3 Kemampuan Peserta Didik Tingkat SD Tahun 2011

Jumlah Peserta		NILAI RATA-RATA						JUMLAH	
		Bahasa Indonesia		Matematika		IPA		Nilai Rata-rata	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
55.388	2.234	7,16	7,64	6,82	7,21	7,27	7,67	21,25	22,52

Sementara itu pada jenjang SMP Ujian Nasional di ikuti oleh 36.188 siswa, dari jumlah tersebut telah lulus sebanyak 36.094 siswa atau sekitar 99,74% dengan perolehan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 7,45; Bahasa Inggris 7,91; Matematika 7,81 dan IPA 7,73 dengan akumulasi rata-rata nilai 30,90.

Tabel 4.4 Kemampuan Peserta Didik Tingkat SMP Tahun 2011

Jumlah Peserta	Jumlah Lulus	%	NILAI RATA				Jumlah Rata-rata
			B. Ind	B. Ing	Matematika	IPA	
36.188	36.094	99,74	7,45	7,91	7,81	7,73	30,90

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (**SMA**) Ujian Nasional **di ikuti oleh 18.404** siswa yang terdiri dari Program Studi Bahasa sebanyak 129 siswa yang lulus 126 siswa (97,67%) dengan rata-rata perolehan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia (7,35) Bahasa Inggris (7,40) Matematika (6,52) Sastra (7,19) Antropologi (6,81) dan Bahasa Asing lainnya (6,89) dengan demikian jumlah nilai rata-rata untuk Program Bahasa adalah (42,16). Untuk Program Studi IPA sebanyak 8.023 siswa yang lulus 8.006 (99,79%) dengan rata-rata perolehan nilai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (8,04) Bahasa Inggris (7,96) Matematika (8,17) Fisika (7,71) Kimia (7,93) dan Biologi (8,18) sehingga jumlah nilai rata-rata (47,99). Sedangkan pada Program IPS dengan jumlah peserta sebanyak 10.252 siswa yang lulus 10.221 (99,70%) dengan perolehan rata-rata nilai untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (7,72) Bahasa Inggris 7,70 Matematika (7,91) Ekonomi (7,80) Sosiologi (7,48) Geografi (7,42) sehingga jumlah nilai rata-rata (45,86).

Tabel 4.5 Kemampuan Peserta Didik Tingkat SMA Tahun 2011

No	Bidang Studi	Program Studi		
		Bahasa Indonesia	IPA	IPS
1	Bahasa Indonesia	7,35	8,04	7,72
2	Bahasa Inggris	7,40	7,96	7,70
3	Matematika	6,52	8,17	7,91
4	Sastra	7,19		
5	Antropologi	6,81		
6	Bahasa Asing	6,89		
7	Fisika		7,71	
8	Kimia		7,93	
9	Biologi		8,18	
10	Ekonomi			7,80
11	Sosiologi			7,48
12	Geografi			7,42
Peserta		129	8.023	10.252
Lulus		126	8.006	10.221

Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (**SMK**) siswa yang mengikuti Ujian Nasional sebanyak 8.912 siswa dan yang dinyatakan lulus sebanyak 8.706 siswa (97,69%) dengan rata-rata perolehan nilai pada mata uji Bahasa Indonesia (6,97) Bahasa Inggris (7,43) Matematika (7,40) dan Uji Kompetensi (8,11) sehingga jumlah nilai rata-rata (29,91).

Tabel 4.6 Kemampuan Peserta Didik Tingkat SMK Tahun 2011

JUMLAH		%		NILAI RATA			Jumlah Rata-rata
Peserta	Lulus	Lulus	B. Ind	B. Ing	Mtk	Uji Kompetensi	
8912	8706	99,74	6,97	7,43	7,40	8,11	29,91

Selain pada jalur formal, pada jalur nonformal juga telah dilaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Pada jenjang Paket A Setara SD Ujian Nasional diikuti 670 orang dan lulus 617 orang (92,09%); pada jenjang Paket B Setara SMP diikuti oleh 3.411 orang dan lulus 3.170 orang (92,93%) serta pada jenjang Paket C IPS diikuti 3.411 orang dan lulus 3.316 orang (97,21%) Paket C IPA diikuti 17 orang lulus 17 orang (100%) serta Paket C Kejuruan ikut 15 orang lulus 14 orang (93,33%)

Tabel 4.7 Kemampuan Peserta Didik Pendidikan Non Formal Tahun 2011

No	Jenjang	Jumlah Peserta	Jumlah Lulus	% Lulus
1	Paket A Setara SD	670	617	92,09
2	Paket B Setara SMP	3411	3170	92,93
3	Paket C Setara SMA			
	IPS	3411	3316	97,21
	IPA	17	17	100
	Kejuruan	15	14	93,33

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menengah ini, telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMALB dari 69,42% tahun 2010 menjadi 76,40 tahun 2011.

4. Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus/Layanan Khusus)

Secara umum penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan Khusus merupakan layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kekhususan baik dari segi fisik maupun kecerdasan, pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Inklusi, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Biasa (PLB/PK/PLK) di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD sebesar Rp3.903.792.600 penggunaan masing-masing sumber dana adalah Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan SDLB dan PLB serta Dukungan Operasional dan Event-event Nasional PLB.

5. Pendidikan Nonformal dan Informal

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal merupakan upaya layanan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Pengembangan program Pendidikan Nonformal diharapkan mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat, selain itu diharapkan Program Pendidikan Nonformal dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat terutama mereka yang belum terlayani kebutuhan pendidikannya pada jalur pendidikan formal.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal (PNF) dan Informal di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu APBD Provinsi Jambi sebesar Rp4.351.419.200,00 dengan kegiatan antara lain Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Penggandaan Standar Isi Kesetaraan, Orientasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengelolaan Kursus, Pengembangan Kurikulum Model Pembelajaran PNF, Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pintar, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Pembangunan Rumah Pintar. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini, tergambar dari peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu dan persentase penduduk di atas 15 tahun yang tidak buta aksara saat ini sebesar 96,06%.

6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp14.849.076.600,00 dengan kegiatan diantaranya Pelatihan Kompetensi Guru, insentif dan Honor PTK SBI dan PTK PK/PLK, Pengelolaan Kualifikasi Pendidik, dan lainnya.

Program kegiatan bidang pendidikan selain dianggarkan melalui dana APBD juga dianggarkan melalui dana APBN yang dialokasikan pada tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp221.727.271.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp199.605.319.185 atau 90,02%. Adapun serapan anggaran yang tidak maksimal pada tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp22.121.951.815 (9,98%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tunjangan Profesi Pendidik, dengan Jumlah Anggaran Rp15.810.048.000 dengan Kuota 584 orang, hanya bisa dibayarkan sebesar Rp13.966.733.400 kepada 538 orang guru, sesuai dengan SK yang Diterima dari Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
2. Untuk Tunjangan Fungsional Non PNS, dengan jumlah Anggaran Rp2.952.000.000 dengan Kuota 819 orang, hanya bisa dibayarkan sebesar Rp2.896.200.000 kepada 807 orang sesuai dengan SK yang diterima dari Ditjen MPTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Untuk Tunjangan Daerah Khusus, dengan jumlah anggaran Rp343.200.000 dengan jumlah kuota 13 orang, tidak bisa dibayarkan sehubungan tidak ada satu pun Bupati yang menyampaikan Surat Keputusan tentang penetapan

Daerah Khusus dan Terluar, sesuai dengan Petunjuk Teknis yang di terbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Tunjangan Profesi tahun 2007 s.d 2010 yang tertunda pembayarannya, dari Anggaran Rp1.578.856.000 untuk 604 orang, hanya terserap Rp1.484.819.200 untuk 590 orang sesuai dengan SK yang terbit dari Ditjen MPTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
5. Dana Tunjangan Profesi (Kenaikan Gaji) Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 sebesar Rp7.377.774.000 untuk 2.334 orang, hanya terserap Rp663.390.698,00 karena Tunjangan Profesi tersebut yang dibayarkan oleh Provinsi hanya 1 bulan tunjangan, sedangkan tunjangan yang sebelas bulannya dibayarkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Alokasi Unit Cost Tunjangan Profesi Guru TK sebesar Rp2.256.000/bulan dengan status PNS, sementara Guru TK banyak yang Non PNS yang hanya bisa dibayarkan Rp1.500.000/bulan.
7. Kegiatan Workshop LAKIP dan LKPP hanya dilaksanakan 6 kali dari 12 kali yang tercantum pada RKA, hal ini disesuaikan dengan memulai kegiatan pada Mei 2011. Sejalan dengan perbaikan DIPA setelah adanya restrukturisasi organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Adanya anggaran perjalanan yang melebihi harga standar umum
9. Anggaran sewa internet yang tidak digunakan karena sudah terfasilitasi di Kantor Dinas Pendidikan.

4.1.2 Dinas Kesehatan

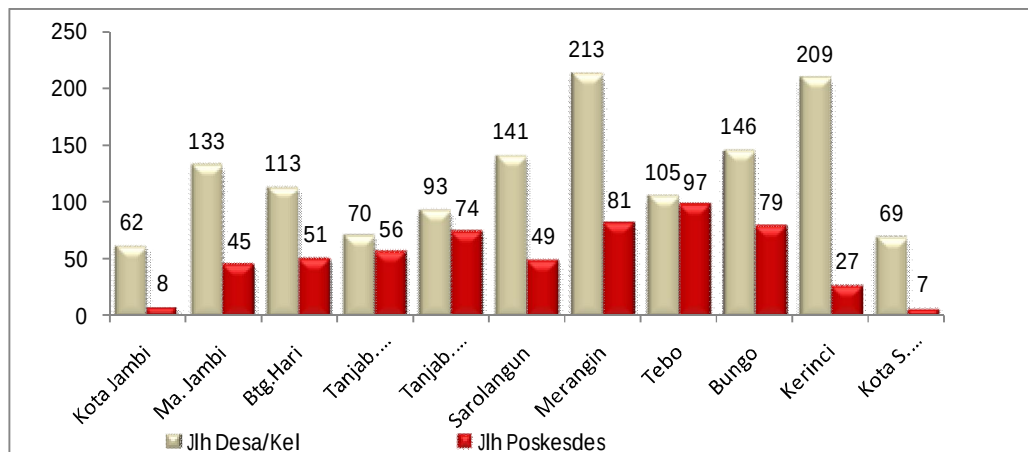
Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2011 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, hal ini di dukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp22.628.247.200,00. Namun demikian, masih ditemui berbagai masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, yang disebabkan karena berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan fisik dan biologis maupun lingkungan sosial budaya yang begitu cepat berubah.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain: Program Promosi Kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program jaminan kesehatan masyarakat Miskin, program Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program Upaya Kesehatan Perorangan.

1. Program Promosi Kesehatan

Sejak diluncurkannya Program Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan cakupan desa siaga untuk menjangkau pelayanan kesehatan sampai ke desa, dimana pada tahun 2011 di seluruh desa pada 11 Kabupaten/kota terdapat 525 unit Poliklinik Kesehatan Desa (Polkesdes) seperti yang tergambar pada gambar 4.3 dibawah ini

Gambar 4.3 Cakupan Desa Siaga dan jumlah Polkesdes Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011



Sumber: Dinkes Provinsi Jambi

Hasil capaian kegiatan ini adalah pelatihan di 11 kabupaten/kota untuk bidan desa sebanyak 1.016 orang, kader sebanyak 2.775 orang, tokoh masyarakat sebanyak 1.333 orang, serta terlaksananya pertemuan forum desa sebanyak 1.342 kali. Dengan demikian persentase desa yang melaksanakannya sebesar 99%. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

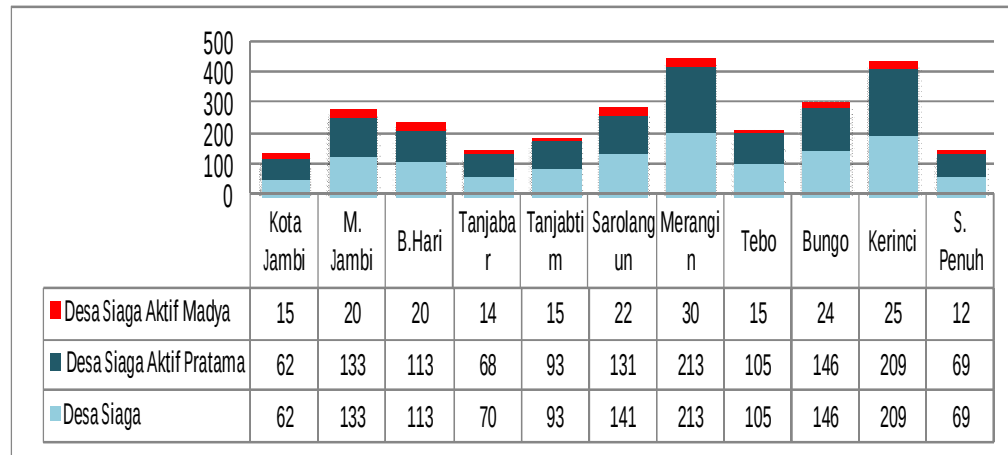
Tabel 4.8 Hasil capaian kegiatan Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dilatih			Jumlah Forum Desa	(%) Desa/Kel melaksanakan
		Bides	Kader	TOMA		
1.	Kota Jambi	62	124	62	62	100
2.	Ma. Jambi	155	124	45	133	100
3.	Btg. Hari	96	339	113	113	100
4.	Tanjab. Barat	89	104	52	68	97,15
5.	Tanjab. Timur	115	279	93	93	100
6.	Sarolangun	106	226	113	131	92,90
7.	Merangin	125	426	213	213	100
8.	Tebo	99	315	210	105	100
9.	Bungo	76	294	147	146	100
10.	Kerinci	124	418	209	209	100
11.	Kota Sungai Penuh	25	418	209	209	100
12.	Total	1.016	2.775	1.333	1.342	99,11%

Sumber: Dinkes Provinsi Jambi

Untuk perkembangan tingkat strata desa siaga di Provinsi Jambi tahun 2011 terdiri dari; Desa Siaga sebanyak 1.354 desa, desa siaga aktif pratama sebanyak 1.342 desa dan desa siaga aktif madya sebanyak 212 desa seperti yang tergambar pada gambar 4.4 dibawah ini :

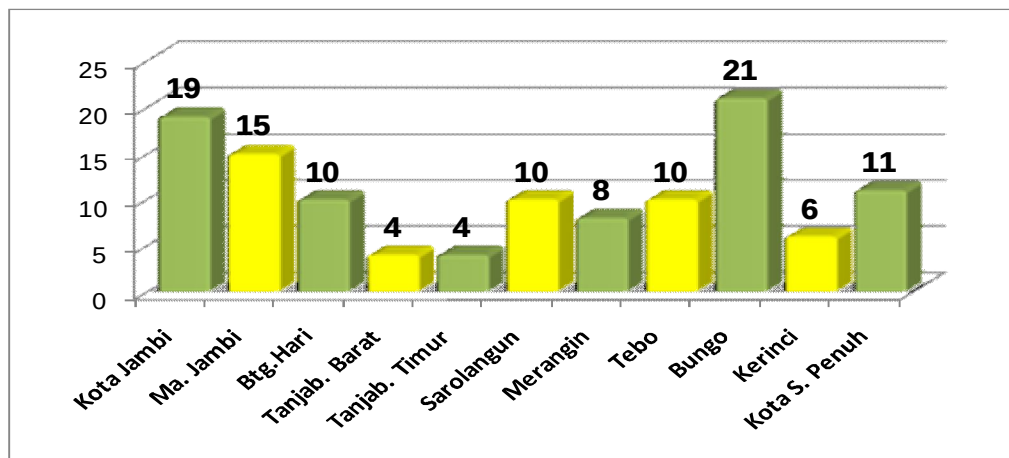
Gambar 4.4 Data Perkembangan Tingkatan Strata Desa Siaga Aktif Provinsi Jambi Tahun 2011



2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyembuhan balita gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari melalui APBD Provinsi sebanyak 33 kasus dan APBN sebanyak 33 kasus sisanya melalui APBD Kabupaten/Kota. Kasus gizi buruk yang terjadi pada 11 Kabupaten/Kota dari bulan Januari s/d November yaitu sebanyak 98 kasus gizi buruk seperti yang terlihat pada gambar 4.5 dibawah ini

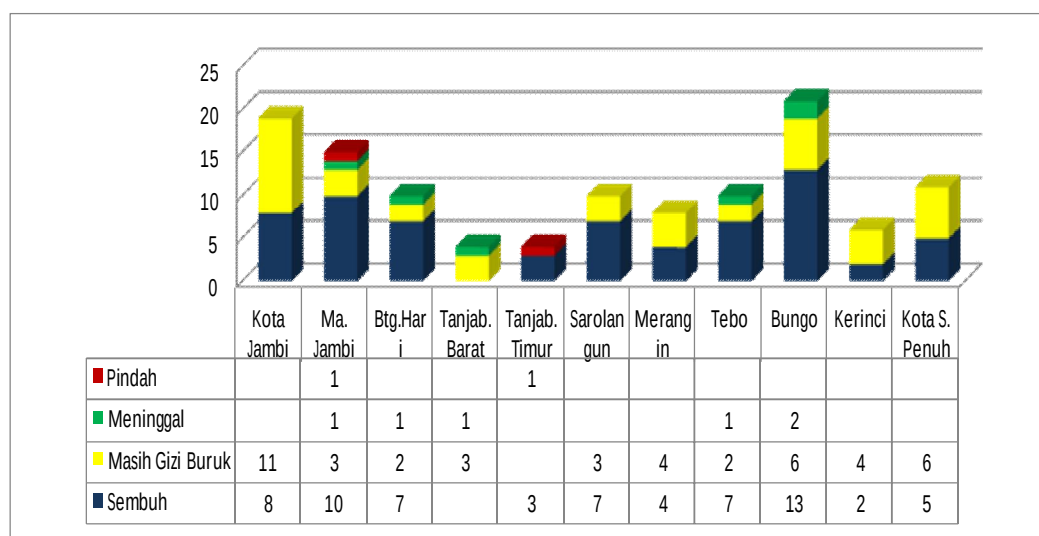
Gambar 4.5. Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi keadaan sampai dengan bulan November 2011



Sumber : Dinas Kesehatan

Dari 98 kasus gizi buruk tersebut, yang sembuh sebanyak 44 kasus (44,89%), yang belum berhasil sembuh sebanyak 49 kasus (50%) dan meninggal sebanyak 5 orang (5,1%), penyebab meninggal adalah TB. Paru, Bronco pneumonia, pola asuh (ibu mengalami gangguan jiwa), microcephalus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini. Selanjutnya dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus gizi buruk terbesar terdapat di Kabupaten Bungo diikuti oleh Kota Jambi, Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Gambar 4.6 Jumlah Kasus Gizi Buruk yang sembuh, meninggal dan pindah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi keadaan sampai dengan bulan November 2011



Sumber : Dinas Kesehatan

Pada pemberian tablet penambah darah (tablet besi) pada Ibu Hamil telah diberikan Fe1 sebesar 81,62% dan Fe3 sebesar 75,75%, cakupan ini sudah mencapai indikator yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 71%. Tabel 4.4 menjelaskan pemberian tablet besi pada ibu hamil di Kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Tabel 4.9 Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe) Kepada Ibu Hamil keadaan sampai bulan November 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Ibu Hamil	Cakupan Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil			
			Fe1		Fe3	
			N	%	n	%
1	Kota Jambi	13.585	10.686	78,66	9.814	72,24
2	Kab. Muaro Jambi	8.086	6.081	75,2	5.489	67,88
3	Kab. Batanghari	5.501	5.487	99,75	5.217	94,84
4	Kab. Tanjab Barat	7.220	5.152	71,36	5.131	71,07
5	Kab. Tanjab Timur	5.370	4.710	87,71	4.450	82,87
6	Kab. Sarolangun	5.936	4.574	77,06	3.875	65,28
7	Kab. Merangin	-	-	-	-	-
8	Kab. Tebo	6.907	6.228	90,17	5.666	82,04
9	Kab. Bungo	9.043	8.520	94,22	8.175	90,4
10	Kab. Kerinci	6.190	4.127	66,67	3.834	61,94
11	Kota S. Penuh	1.872	1.331	71,1	1.155	61,7
Total		69,71	56.896	81	52.806	75,09

Sumber : Dinas Kesehatan

3. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Provinsi Jambi diupayakan juga melalui pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi. Program ini dilakukan melalui program “**Satu Millar Satu Kecamatan (SAMISAKE)**” yang pada tahun 2011 cakupannya pada 131 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun rencana pencapaian Jamkesmasprov Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini.

Tabel 4.10 Rencana Tahapan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d 2014

No	Bentuk Jaminan	Tahap Penjaminan/Tahun (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jamkesmas	27,64	27,64	28,00	29,00	30,00
2.	Jamkesmasda (Provinsi + Kab/kota)	9,19	9,19	13,00	16,00	20,00
3.	Jaminan Mandiri (Jamsostek Askes Sosial, Komersil, Swasta lainnya)	10,75	20,00	30,00	40,00	50,00
Total		47,58	56,83	71,00	85,00	100,00

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pada tahun 2011 telah diterbitkan Kartu Kepesertaan Jamkesmasprov sebanyak 19.639 orang, secara lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.11 Masyarakat Miskin dan Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesmasda di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Maskin (org)	Jamkesmas da Prov (org)	Jamkesda Kab/Kota
1.	Kota Jambi	120.645	2.760	41.297
2.	Kab. Muaro Jambi	82.598	1.973	6.600
3.	Kab. Batanghari	84.990	1.282	54.761
4.	Kab. Tanjab Barat	68.198	2.486	4.000
5.	Kab. Tanjab Timur	75.409	296	1.535
6.	Kab. Sarolangun	85.317	4.703	5.000
7.	Kab. Merangin	86.949	1.923	Semua SKTM
8.	Kab. Tebo	71.117	2.954	10.000
9.	Kab. Bungo	63.886	451	4.000 dan seluruh masy. Berobat gratis di Puskesmas
10.	Kab. Kerinci	109.907	596	11.000
11.	Kota Sungai Penuh	-	215	32.000
Total		849.016	19.639	166.693

Sumber : Juknis Jamskesmas Samisake, 2011

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator kinerja pada program Upaya Kesehatan Masyarakat yang tercantum pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.12 Capaian Indikator Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2011

No	INDIKATOR	TAHUN 2011	
		Target	Capaian
1	Persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (PN)	88%	88,28%
2	Persentase pelayanan antenatal (ANC) K4	92%	91,88%
3	Persentase pelayanan penanganan komplikasi kebidanan	58%	53,31%
4	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu nifas (KF1)	88%	87,29%
5	Persentase kunjungan bayi	75%	90,62%
6	Persentase pelayanan kunjungan neonatal (KN 1)	92%	93,79%
7	Persentase penanganan komplikasi pada neonatal (PK)	30%	43,30%
8	Persentase penjangkaran kesehatan siswa SD kelas 1 dan setingkat	60%	65%
9	Persentase SD dan setingkat melaksanakan penjangkaran kesehatan	60%	85,81%
10	Persentase pembinaan sekolah sehat melalui program UKS	50%	50%
11	Persentase Puskesmas dengan Kinerja yang Baik	50%	55%
12	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang Menerapkan Mutu di Puskesmas	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
13	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas menerapkan Program Pengembangan	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota
14	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)	5 Kab/Kota	6 Kab/Kota

Dari hasil capaian indikator program pada tahun 2011 berdasarkan indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dapat dilihat bahwa dari 14 indikator tersebut secara umum 13 (tiga belas) indikator sudah mencapai target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu indikator persentase pelayanan penanganan komplikasi kebidanan (PK).

Hal ini disebabkan oleh masih belum dipahaminya definisi operasional (DO) dari penanganan komplikasi pada kebidanan dan disamping itu masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat bidan desa dan Puskesmas.

Pada tahun 2011 terdapat 6 (enam) Kabupaten/ Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang menerapkan mutu di Puskesmas yaitu : Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjab. Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Ma. Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sedangkan Kabupaten/ Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang menerapkan program pengembangan ada 2 yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Adapun Kabupaten/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) ada sebanyak 6 (enam) Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Tebo, Kabupten Bungo, Kabupten Tanjab. Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Ma. Jambi. Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas).

5. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Sasaran dari program UKP mencakup Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang berjumlah 21 Rumah Sakit. Status Rumah Sakit di Provinsi Jambi pada tahun 2011, adalah dari 21 Rumah sakit di Provinsi Jambi, Rumah sakit tipe B berjumlah 2 Rumah sakit, tipe C 7 Rumah sakit, dan tipe D ada 12 Rumah sakit. Sedangkan dari 21 Rumah Sakit tersebut, yang mempunyai Izin Operasional Sementara adalah sebanyak 14 Rumah Sakit, yang mempunyai Izin Operasional Tetap 7 Rumah sakit. Sementara, yang sudah terakreditasi sebanyak 5 Rumah sakit dan yang sudah mengikuti pelatihan Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam sebanyak 11 Rumah sakit.

Untuk rumah sakit tipe B yaitu RSU.Raden Mataher dan RSJ Jambi dengan status seperti terlihat pada tabel 4.13 dibawah ini :

Tabel 4.13 Daftar Status Rumah Sakit Tipe B Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSU. Raden Mattaher	330	✓	✓ (12 Pelayanan)	✓	✓ (12 pelayanan)
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah	200	✓			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Status Rumah sakit tipe C di Provinsi Jambi yang berjumlah 7 unit dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini :

Tabel 4.14 Daftar Status Rumah Sakit Tipe C Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSUD. H.A. Madjid Batoe Batanghari	93	✓		✓	
2	RSUD. K.H. Daud Arif Kuala Tungkal	53	✓		✓	
3	RSUD. H. Hanafie Bungo	185	✓	✓ (5 pelayanan)	✓	✓ (5 pelayanan)
4	RSUD. Kol. Abundjani	109	✓		✓	
5	RSUD. Mayjen. HA. Thalib Kerinci	125			✓	
6	RSUD. ST.Thaha Syaifuddin Tebo	49	✓		✓	
7	RSUD. Muaro Jambi	99			✓	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Status Rumah sakit tipe D di Provinsi Jambi yang berjumlah 12 unit dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini

Tabel 4.15 Daftar Status Rumah Sakit Tipe D Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSUD. Nurdin Hamzah Ma. Sabak	48	✓		✓	
2	RSUD. Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun	61			✓	
3	RS. ST. Theresia Kota Jambi	100		✓ (12 pelayanan)		✓ (12 pelayanan)
4	RS. Budi Graha Kota Jambi	40	✓			
5	RS. Asia Medika Kota Jambi	109				

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
6	RS. Bhayangkra Kota Jambi	40		✓ (5 pelayanan)		✓ (5 pelayanan)
7	RS. DR. Bratanata Kota Jambi	195		✓ (5 pelayanan)		✓ (5 pelayanan)
8	RS. Mayang Medical Centre Kota Jambi	50	✓			
9	RSB. Annisa Kota Jambi	30	✓			
10	RS. Bersaudara Kota Jambi	23	✓			
11	RSUD. H. Abdul Manap Kota Jambi	146	✓		✓	
12	RSUD. Sungai Bahar Muaro Jambi	54	✓			✓

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pembinaan Program Akreditasi RS

Akreditasi rumah sakit bukan program yang baru karena telah tercantum dalam sistem kesehatan nasional yang disusun tahun 1982 dan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit dalam Bab VII pasal 26 tercantum pula pengaturan tentang akreditasi RS. Pada undang-undang kesehatan RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit bagian ketigapasal 40 ayat 1 yang berbunyi dalam upaya peningkatan pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi.

Namun pelaksanaan akreditasi rumah sakit bukan hal yang mudah karena salah satu profesionalisme SDM rumah sakit tentang pemahaman pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Saat ini rumah sakit yang terakreditasi baru 19% atau baru 4 rumah sakit dari 21 rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu pembinaan pelaksanaan akreditasi RS oleh tim pembina akreditasi RS.

Rumah sakit yang sudah terakreditasi di Provinsi Jambi yaitu :

1. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
2. RS St. Theresia Jambi
3. RS DR. Bratanata Jambi
4. RS Bhayangkara Jambi

Pada tahun 2011 ini ada 4 (empat) rumah sakit lagi yang sudah terakreditasi yaitu :

1. RSUD H.Hanafie Kabupaten Bungo
2. RSUD H.Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari
3. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
4. RS Jiwa Provinsi Jambi

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tabel 4.16 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No	Program/Sasaran	Target	Capaian	Ket
1	Peningkatan Pelayanan kefarmasian Jumlah sarana Yankes yang melaksanakan PIO (Pelayanan Informasi Obat)			
	a. Puskesmas	20%	57%	Sarpras, SDM (apoteker)
	b. RSUD	60%	100%	
	c. Apotek	50%	3,62	
	Jumlah sarana Yankes yang Melaksanakan POR (Penggunaan Obat Rasional)			
	a. Puskesmas	50%	80%	
	b. RSUD	42%		
2	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan 11 kab/kota mengalokasikan dana obat melalui APBD sehingga tercapai tingkat ketersediaan obat sesuai target			
	a. Dana obat/kapita (Rp)	14.000	7.287	
	b. Tingkat ketersediaan%	95	83	
3	Peningkatan Produksi dan distribusi alat kesehatan			
	a. Sarana distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan distribusi.	50%	46%	
	b. Alkes yang memenuhi syarat (diuji)	100%	100%	
4	Peningkatan Produksi dan Distribusi kefarmasian.			
	Sarana yang melaksanakan yang melaksanakan pelaporan Narkotika			
	a. Jumlah sarana melaporkan SIPNAP	100%	29%	
	b. Jumlah PBF melaporkan dinamika obat	100%	100%	

Keterangan : 1.c (apotik) target 50% capaian 3,62%,

Beberapa permasalahan pada program ini antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu rata-rata apotik tidak menyediakan tempat khusus melaksanakan konseling (pelayanan informasi obat).
2. SDM tenaga apoteker, bahwa apotek di Provinsi Jambi tidak berada di tempat yang seharusnya selama waktu apotek beroperasi apoteker harus berada di tempat sesuai dengan PP No. 51 tahun 2009.

Jumlah Sarana yang melaksanakan POR (b) RSUD

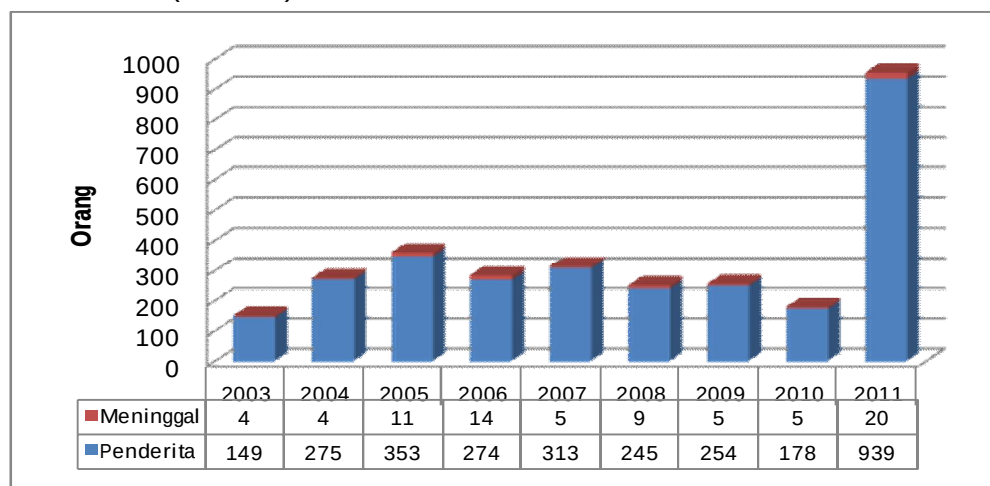
1. Sejak tahun 2010-2011, target Penggunaan Obat Rasional (POR) difokuskan di Puskesmas di seluruh Provinsi Jambi sesuai dengan Menu Wajib yang dikeluarkan oleh pusat (APBN).
2. Yang dimaksud dengan Penggunaan Obat Rasional di RSUD yaitu semua RSUD melaksanakan pengobatan mengacu kepada formularium Rumah Sakit, tetapi kenyataan yang ditemui di lapangan dari 11 RSUD di Provinsi Jambi hanya 1 (satu) RSUD yang memiliki formularium sehingga tidak dapat di evaluasi capainnya.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

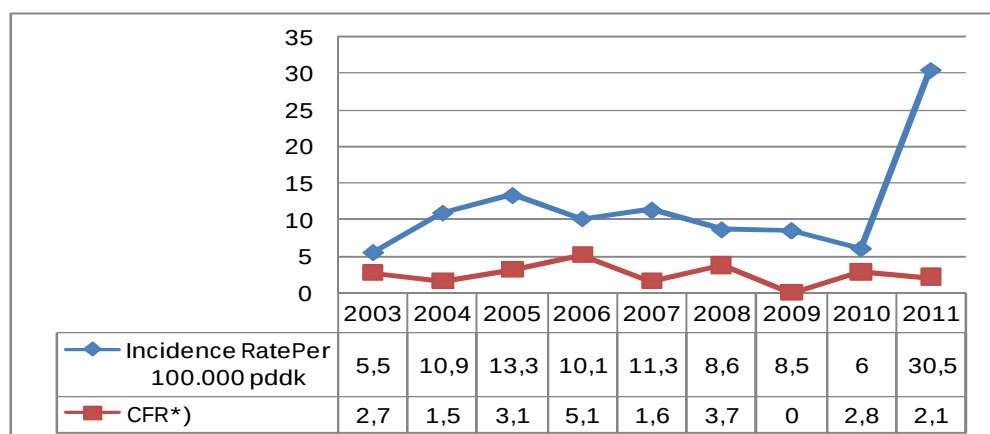
a. Penyakit Demam Berdarah Dengue.

Di Provinsi Jambi, kejadian Demam Berdarah Dengue telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota. Namun Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2011, kondisi ini sesuai dengan *pattern of disease* dari penyakit DBD, yaitu *Urban Disease*. Selanjutnya kabupaten lainnya yang endemis (selalu ada kasus dalam 3 tahun terakhir) adalah Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun dan Merangin, sementara kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan kabupaten sporadis (tidak setiap tahun ada kasus). Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.815 kasus dengan 42 kematian karena DBD.

Gambar 4.7 Jumlah penderita DBD Provinsi Jambi Tahun 2003-2011 (Oktober)



Gambar 4.8 Incidence rate dan case fatality rate DBD di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2011 (sampai dengan Oktober 2011)



Tahun 2011 terjadi peningkatan kasus dan kematian yang sangat bermakna dan telah masuk criteria kejadian luar biasa. Peningkatan kasus DBD ini antara lain disebabkan oleh dampak perubahan iklim (*climate change*), kemarau panjang pada periode bulan Juli – September, diprediksi

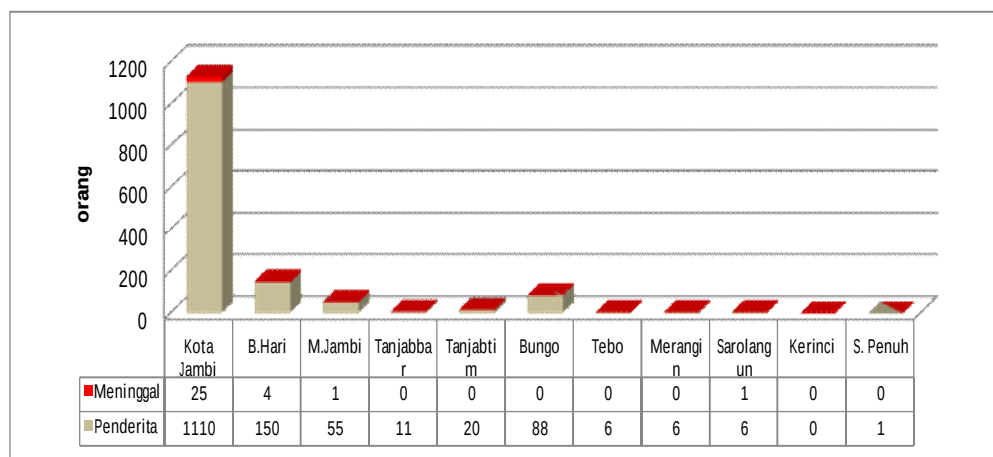
meningkatkan suhu optimum (32-35°C) yang dapat menyebabkan potensi frekuensi feeding (menghisap darah) nyamuk aedes lebih sering, ukuran tubuh nyamuk lebih kecil → lebih agresif → siklus hidup lebih panjang, sehingga resiko penularan menjadi 3x lipat lebih tinggi. Dan curah hujan yang sedang dalam breeding places (tempa-tempat perindukan) nyamuk aedes, sehingga populasinya meningkat. Selain pengaruh perubahan iklim peningkatan kasus ini juga dimungkinkan oleh tidak diiringinya upaya terpadu pemberantasan pada nyamuk dewasa melalui “**fogging/pengasapan**” dengan upaua pemberantasan jentik (**PSN = Pembarantasan Sarang Nyamuk/tempat perindukan**) yang terus menerus

b. Penyakit Malaria

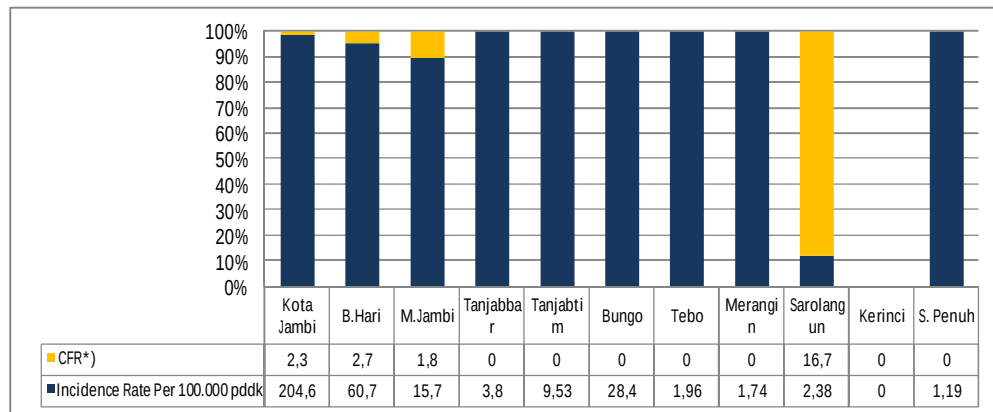
Jumlah kasus malaria di Provinsi Jambi yang dilaporkan adalah sebesar = 6.575 orang (Angka kesakitan malaria/annual Parasite Incidence= 2,09/1000 penduduk. Angka kesakitan malaria tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan (Annual Parsite Incidence tahun 2010 = 1,57/1000 penduduk). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan cakupan malaria klinis yang dikonfirmasi secara laboratorium (cakupan tahun 2010 = 58,4% (malaria klinis = 41.640 orang, diperiksa laboratorium = 24.336 orang, positif malaria = 4.682 orang); tahun 2011 = 80,6% (malaria klinis = 54.476 orang, diperiksa secara laboratorium = 43.887, positif malaria = 6.575 orang) dan surveilans malaria juga lebih baik.

Sehingga dengan meningkatnya cakupan penemuan kasus melalui pemeriksaan malaria klinis secara laboratorium, maka adanya peningkatan malaria positif yang ditemukan dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan malaria tahunan/annual parasite incidence.

Gambar 4.9 Jumlah penderita Malaria di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2011



Gambar 4.10 CFR dan IRPMalaria di Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2011



c. Imunisasi

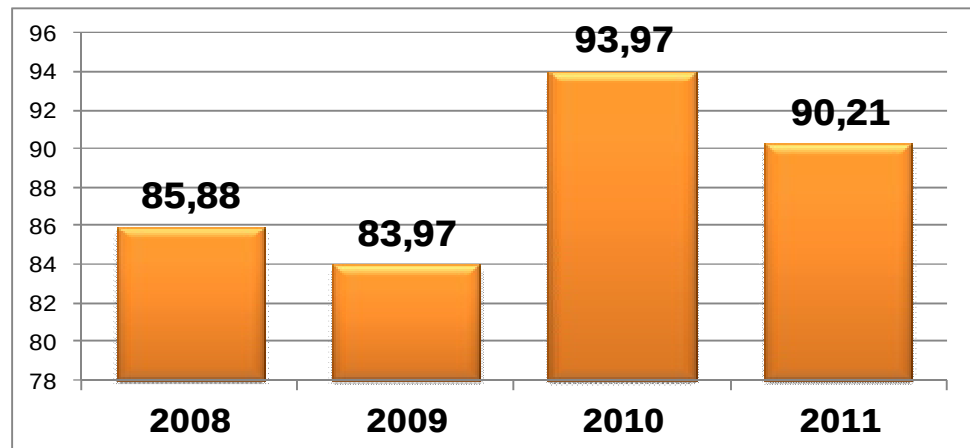
Kegiatan program imunisasi dalam rangka akselerasi pencapaian GAIN UCI (Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional Universal Child Immunization) tahun 2010 – 2014, salah satunya adalah pencapaian laporan cakupan imunisasi dasar bayi .

Tabel 4.17 Cakupan Imunisasi BCG, Polio 1, Campak Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi s/d Oktober Tahun 2011

NO	Kabupaten/Kota	Sasaran Bayi	HB0 (<7 hr)	BCG (%)	Polio1 (%)	DPT/ HB3 (%)	Polio4 (%)	Campak (%)
1	Kerinci	5.627	60,4	74,9	71,1	69,1	68,5	68,8
2	Merangin	8.109	64,8	82,9	80,9	82,7	82,7	81,9
3	Sarolangun	6.314	76,1	86,4	82,8	76,4	74,8	78
4	Bungo	7.728	66,5	81,3	80,1	80,8	79,9	77,6
5	Tebo	6.575	72,5	82,5	82,3	81	80,5	78,9
6	Tanjab Barat	6.563	50,8	68,8	71,9	71,6	72	72,6
7	Tanjab Timur	3.674	57,5	70,6	71,8	69,6	69,9	69,2
8	Batang Hari	5.098	74,3	86,9	87,7	83,5	83,2	83,2
9	Muaro Jambi	8.344	59,3	76,4	77,9	77,8	79,2	71,5
10	Kota Jambi	12.817	97,9	101	104,6	89,5	94,2	94,3
11	Kota Sei Penuh	1.658	84,7	89,4	89,9	86	86,1	93,6
Provinsi Th. 2011		72.507	71	83,3	83,6	79,8	79,7	80,5

Penyebab dari rendahnya capaian dari Kabupaten/Kota adalah belum semua Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan imunisasi ke Kab/Kota. Berikut persentase cakupan desa /kelurahan UCI di provinsi Jambi tahun 2008-2011 seperti yang terlihat pada gambar 4.11. dibawah ini :

Gambar 4.11 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jambi Tahun 2008-2011



Sedangkan cakupan Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini :

Tabel 4.18 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI	%
1	Kerinci	16	209	157	75.12
2	Merangin	14	213	130	61.03
3	Sarolangun	11	127	99	77.95
4	Bungo	18	136	132	97.06
5	Tebo	13	105	83	79.05
6	Tanjab Barat	16	70	61	87.14
7	Tanjab Timur	17	92	83	90.22
8	Batang Hari	13	113	109	96.46
9	Muaro Jambi	18	133	132	99.25
10	Kota Jambi	20	62	62	100.00
11	Kota Sungai Penuh	5	69	68	98.55
Provinsi Th. 2011		161	1.329	1.199	90,21
Provinsi Th. 2010		161	1.329	1.116	93.97
Provinsi Th. 2009		161	1.329	1.116	83.97
Provinsi Th. 2008		156	1.268	1.089	85.88

4.1.2.1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATAHER

Pada tahun anggaran 2011 program yang telah dilaksanakan oleh RSUD Raden Mattaher sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perawatan, beberapa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan pasien RSUD Raden Mattaher. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dimaksud yaitu melaksanakan evaluasi terhadap 20 bagian Standar pelayanan Minimum di RSUD Raden Mattaher yaitu : Unit Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Persalinan dan Perinatologi, Intensiv (ICU/ICCU), Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Rekam Medik, Pengelolaan Limbah, Ambulan/Kereta Jenazah, Pemulasaran Jenazah, Hemodialisa, Administrasi Manajemen, Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Pelayanan Loundri dan Medical Chek Up.

Secara umum penilaian dimaksud sudah pada indikator baik, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh UKG-PPP, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Pada pelaksanaan kegiatan di RSUD Raden Mattaher ada beberapa indikator yang di ukur dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.19 Indikator RSUD. Raden Mattaher Jambi Tahun 2007 s.d 2011

NO	INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	2011	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	147.45	150.35	142.70	158.18	119,46	Kunj
2	Rawat Inap	18.078	16.855	17.066	15.004	16,835	Orang
3	Bed Occupancy Rate	89,63	81,7	76,25	72,7	82,7	%
4	Bed Turn Over	58,89	54,9	53,16	48,2	52,4	Kali
5	Length of stay	4,4	4,3	4,23	4,5	4,7	Hari
6	Turn Over Internal	0,6	1,2	1,63	2,1	1,2	Hari
7	Gross Death Rate	5,3	5.20	4,92	6,34	5,98	%
8	Nett Death Rate	3,01	2.30	2,57	3	3,14	%
9	Kunjungan IGD	14.103	15,345	18.130	16.143	24.039	Kunj
10	Operasi Besar	1.749	1,637	1.774	1.827	2.200	Kali
11	Operasi Sedang	629	458	654	732	748	Kali
12	Operasi Kecil	4.809	4,158	5.341	6,415	9.002	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	17.125	15.981	16,225	14,052	15.811	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48	408	394	402	494	483	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48	545	498	439	458	541	Orang
Jumlah TT Tersedia		307	307	321	315	321	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat perbandingan indikator pelayanan pasien di RSUD Raden Mattaher antara tahun 2010 dengan tahun 2011 antara lain, BOR pada tahun 2010 sebesar 72,70% meningkat menjadi 82,70% tahun 2011. Melihat kondisi tersebut, maka sudah perlu untuk meningkatkan jumlah tempat tidur di rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat menampung pasien tanpa terlebih dahulu antri seperti sekarang ini. BTO pada tahun 2010 sebesar 48,20 meningkat menjadi 52,40 kali pada tahun 2011, LOS pada tahun 2010 selama 4,5 hari menjadi 4,7 hari pada tahun 2011, hal ini diakibatkan oleh jumlah pasien yang berpenyakit kronis dan pasien ulangan sehingga masa hari rawat menjadi lebih panjang.

TOI dari 2,1 hari pada tahun 2010 menjadi 1,2 hari pada tahun 2011, menggambarkan padatnya hunian tempat tidur di RSUD Raden Mattaher. GDR 6,34% pada tahun 2010 menjadi 6,14% pada tahun 2011 dan NDR 3,00% pada tahun 2010 menjadi 3,23% pada tahun 2011. Penurunan GDR menunjukkan semakin membaiknya pelayanan pada rawat inap, namun NDR semakin meningkat akibat pasien rujukan dari rumah sakit dan layanan lainnya ke RSUD Raden Mattaher dalam kondisi buruk.

Disamping itu indikator lainnya yang dapat di uraikan adalah jumlah kunjungan rawat jalan, menurun dari 158.189 kunjungan pada 2010 menjadi 119.467 pada tahun 2011. Berbagai hal yang mengakibatkan turunnya kunjungan rawat jalan antara lain, berfungsinya sistem rujukan yang diterapkan oleh PT. Askes yaitu pelayanan dasar dilayani di Puskesmas dan Rumah Sakit sebelum di rujuk ke RSUD Raden Mattaher.

Khusus pelayanan Jamkesmas dan Jamkesmasda dari bulan ke bulan selama tahun 2011 meningkat secara drastis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20 Kunjungan Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

Bulan	Total Pelayanan	Jamkesmas		Jamkesmasda	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Januari	10.200	1.081	10,6	153	1,50
Februari	10.981	2.176	19,82	125	1,14
Maret	10.726	1.322	12,33	196	1,83
April	10.038	1.257	12,52	160	1,59
Mei	10.636	1.259	11,84	191	1,80
Juni	10.301	1.284	12,46	188	1,83
Juli	10.434	1.314	12,59	210	2,01
Agustus	8.044	889	11,05	140	1,74
September	8.847	1.319	14,91	185	2,09
Oktober	9.718	1.542	15,87	218	2,24
November	9.380	973	10,37	652	6,95
Desember	10.162	896	8,82	802	7,89
Total	119.467	15.312	12,82	3.220	2,70

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2011

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2011, dari total pelayanan rawat jalan sebesar 119.467 kunjungan, terdapat 15.312 kunjungan atau sebesar 12,82% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 3.220 kunjungan atau sebesar 2,70% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda serta sisanya pasien umum dan pasien askes.

Kemudian pola penyakit rawat jalan yang datang berobat ke RSUD Raden Mattaher selama tahun 2011 dikategorikan sepuluh penyakit terbanyak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

No	Penyakit	Total	Presentase
1	Penyakit Hypertensi Lainnya	18.496	30,4
2	ISPA	7.044	11,6
3	DM	6.098	10
4	Bronchitis Acute	5.143	8,4
5	TBC Paru BTA (+)	4.714	7,7
6	Arthritis Reumatoid Lainnya	4.687	7,7
7	Penyakit Jantung Lainnya	4.409	7,2
8	Penyakit Kulit Lainnya	3.829	6,3
9	Gastritis, Duodenitis	3.583	5,9
10	OMA	2.931	4,8
Total		60.934	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2011

Selanjutnya pasien rawat inap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.22. Jumlah Pasien Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

Bulan	Total Pelayanan	Jamkesmas		Jamkesmasda		Jampersal	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Januari	1.285	293	22,80	163	12,68	-	-
Februari	1.150	279	24,26	157	13,65	-	-
Maret	1.347	305	22,64	228	16,92	-	-
April	1.325	310	23,39	239	18,03	-	-
Mei	1.398	307	21,95	239	17,09	-	-
Juni	1.372	300	21,86	247	18	-	-
Juli	1.496	375	25,06	224	14,97	-	-
Agustus	1.413	349	24,69	214	15,14	-	-
September	1.373	347	25,27	256	18,64	-	-
Oktober	1.618	483	29,85	224	13,84	32	1,97
November	1.522	381	25,03	293	19,25	16	1,05
Desember	1.536	393	25,58	321	20,89	8	0,52
JUMLAH	16.835	4.122	24,48	2.805	16,66	56	0,33

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2011, dari total pelayanan rawat inap sebesar 16.835 orang, terdapat 4.122 orang atau sebesar 24,48% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 2.805 orang atau sebesar 16,66% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda dan 56 orang atau 0,33% menggunakan fasilitas Jampersal serta sisanya pasien umum dan pasien askes.

Jenis penyakit yang diderita pasien rawat inap pada umumnya termasuk dalam 10 jenis penyakit terbesar di RSUD Raden Mattaher selama tahun 2011 dengan katagori sebagai berikut :

Tabel 4.23 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

No	Penyakit	Total	Presentase
1	Diare & Gastroenteritis	826	18,20
2	Demam Berdarah Dengue	710	15,60
3	Malaria	569	12,50
4	Dyspepsia	512	11,30
5	Diabetes Mellitus	434	9,60
6	TB Paru Lainnya	383	8,40
7	Hipertensi	290	6,40
8	Penyakit Appendiks	282	6,20
9	Stroke Haemorrhagic	275	6,10
10	Gagal Ginjal Lainnya	256	5,60
Total		4.537	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2011

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan jumlah tindakan operasi yang meningkat pesat seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.24 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Jumlah Tindakan Operasi

No	Pelayanan	Tahun		Peningkatan		Satuan
		2010	2011	JUMLAH	%	
1	Kunjungan IGD	16.143	24.039	7.896	48,91	Kunjungan
2	Operasi Besar	1.827	2.200	373	20,42	Kali
3	Operasi Sedang	732	748	16	2,19	Kali
4	Operasi Kecil	6.415	9.002	2.587	40,33	Kali

2. Program Peningkaan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasana

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal RSUD sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan antara lain : *In House Training*, pendidikan dan pelatihan di luar RS serta Temu ilmiah Sedangkan untuk mendidik siswa-siswa sekolah kesehatan yang ada di Provinsi Jambi dan bagi mahasiswa Kedokteran Universitas Jambi dibuat suatu kerja sama antara RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan 17 Institusi Kedokteran/Pendidikan Kesehatan serta MoU RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan RS Jejaring. Kemudian untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tersebut disusun sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis perjanjian kerja sama.

Ikatan kerjasama tersebut meliputi kegiatan praktek klinik keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan gigi, farmasi, analisis kimia, kesehatan lingkungan, kepaniteraan klinik junior dan senior, pengambilan data, penelitian dan

magang. Untuk kegiatan praktek klinik dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.240 orang, pengambilan data/penelitian sebanyak 159 orang dan magang mahasiswa sebanyak 9 orang.

Kegiatan pelatihan di dalam rumah sakit (*in house training*) berlangsung sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta sebanyak 310 orang, sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan di luar rumah sakit pada tahun 2011 sebanyak 291 orang dengan rincian tenaga struktural sebanyak 102 orang, dokter spesialis sebanyak 28 orang, dokter umum/gigi sebanyak 25 orang, keperawatan sebanyak 64 orang, penunjang sebanyak 33 orang, dan administrasi sebanyak 39 orang. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher, beberapa peralatan yang dilaksanakan pengadaannya bersumber dari dana APBD, DAK, APBN.

3. Program Sistim Administrasi Rumah Sakit dan Badan Layanan Umum.

Sejalan dengan peningkatan mutu layanan administrasi dan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Raden Mattaher telah menyusun program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS). Dengan dibangunnya jaringan dan program tersebut diharapkan Sistim Pencatatan dan Administrasi RS akan berjalan dengan cepat, tepat dan akurat.

Demikian juga untuk mendukung prosedur penatalaksanaan sistem keuangan BLUD, RSUD Raden Mattaher juga telah bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun Sistem dan prosedur Penatausahaan Keuangan RS dan Sistem Penyusunan Laporan Keuangan sehingga Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengeluaran dan Pendapatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4.1.2.2. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapatkan penghasilan berupa retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan ASKES, Pelayanan Jamkesmas dan Pelayanan Jamkesda.

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dari penerimaan retribusi tersebut, 20% diantaranya disetor ke Kas Daerah dan 80% digunakan untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit yang tidak dibiayai oleh APBD. Namun, sesuai Keputusan Gubernur Jambi No.149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, dimana 100% pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit.

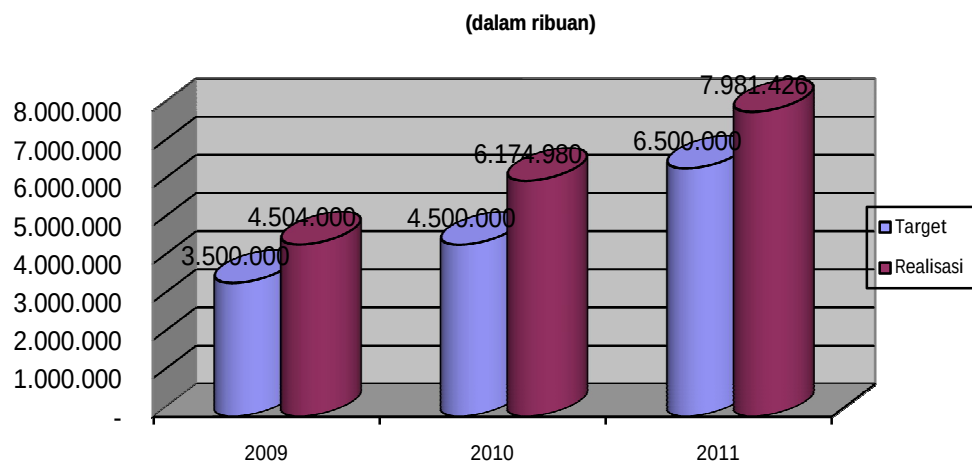
Pada tahun 2011, pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp7.981.426.142 . Pendapatan ini berasal dari dana APBD-P TA. 2011 sebesar Rp6.500.000.000, serta dana tambahan dari sisa TA. 2010 sebesar Rp1.481.426.141. Untuk jelasnya, berikut ditampilkan tabel rincian target dan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011.

Tabel 4.25 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan

No	Rincian Penerimaan	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	550.000.000	578.967.650
2	Pelayanan Rawat Inap	400.000.000	476.999.900
3	ASKES	350.000.000	488.904.177
4	JAMKESDA	300.000.000	257.071.485
5	JAMKESMAS	4.900.000.000	3.899.113.484
6	Penerimaan Lain-Lain dan Sewa	-	256.787.500

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2011 ini meningkat sebesar 77% dibanding pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2010. Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 dan 2011.

Gambar 4.12 Grafik Pendapatan RS Jiwa Jambi Tahun 2010 - 2011



A. Pengelolaan Belanja Daerah

Total anggaran belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 sebesar Rp25.573.059.768 yang dialokasi sebesar Rp11.206.432.145 (43,82%) untuk belanja tdk langsung dan 5.609.078.224 (21,93%) untuk belanja langsung. Realisasi untuk masing-masing belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.26 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	11.472.880.768	11.206.432.145	97,60
2	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	2.184.274.000	2.143.812.090	98,10
	- Belanja Barang dan Jasa	7.852.422.800	7.361.642.950	93,70
	- Belanja Modal	4.063.482.200	3.621.695.460	89,10

B. Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib di RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan ini adalah sebesar Rp317.242.800,00 dengan realisasi sebesar Rp295.247.118,00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan alat-alat angkutan darat roda dua (sepeda motor)
- Pemeliharaan Gedung dan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan /Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Alokasi dana untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp277.080.000 dengan realisasi sebesar Rp263.834.490,00. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai sebagai salah satu penunjang pokok dalam upaya penyembuhan pasien. Anggaran yang disediakan untuk penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan adalah sebesar Rp878.000.000,00 yang berasal dari 2 (dua) kegiatan baik kegiatan pengadaan obat yang didanai dari APBD (sebesar Rp778.000.000,00) maupun yang didanai dari pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2011 (sebesar Rp100.000.000,00). Realisasi belanja dari kegiatan ini adalah sebesar Rp744.194.504,00 (APBD dan Pendaatan rumah sakit).

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah upaya pelayanan kesehatan yang prima khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.896.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemenuhan bahan praktek dan percontohan untuk mendukung pemulihan kesehatan.

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Arah kebijakan program ini adalah menghasilkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.

Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp154.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp153.880.800,00

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima.

Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembangunan rumah sakit berupa pembangunan Turap gedung rawat inap kelas III, pembuatan selasar Gedung Rawat Inap kelas III, Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Pembangunan Instalasi Air Limbah (IPAL) . Alokasi belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp2.391.187.200,00 dengan realisasi sebesar Rp2.049.418.210,00.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan limbah Rumah Sakit serta kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp104.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.950.000,00.

8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD kearah pelayanan yang menuju pelayanan Rumah Sakit yang terakreditasi . Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.291.376.101,00.

C. Capaian/Perubahan Data Mikro Sektor (2009 dan 2011)

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di tahun 2011 berupa penambahan 1 unit gedung rawat inap kelas III (MPKP) hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap bagi pasien kurang mampu/miskin yang memiliki kartu jamkesmas. Pada tahun 2011, pasien yang berobat dengan menggunakan kartu jamkesmas sebanyak 2.343 orang atau menurun sebesar 17,62% dari tahun 2009. Berikut disajikan tabel jumlah pasien jamkesmas tahun 2009 dan 2011.

Tabel 4.27 Jumlah Pasien Jamkesmas Tahun 2009 dan 2011

No	URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2011
1	Pelayanan Rawat Jalan	2.844	2343
2	Pelayanan Rawat Inap	396	464

Selain itu, di tahun 2011 ini, dilaksanakan pengadaan 2 unit mobil jabatan untuk pejabat eselon III.a dan 1 unit kendaraan roda 2 untuk pejabat eselon IV.

D. Capaian/Perubahan Data Makro Sektor (2009 dan 2011)

Secara makro, pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2011 berdampak pada peningkatan kinerja para aparatur. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap dari tahun sebelumnya serta indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Berikut disajikan tabel utilisasi/pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2009 dan 2011.

Tabel 4.28 Utilisasi/Pemanfaatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 dan 2011

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2009	2011
1. Kunjungan Pasien R. Jalan	Kunjungan	13.009	13.538
2. Kunjungan Pasien R. Inap	Kunjungan	2.940	3.711
3. Jumlah Tempat Tidur	Buah	200	200
4. Bor Occupancy rate (BOR)	%	73,72	80,40%
5. Bed Turn Over (BTO)	Kali	3,39	9,06
6. Lenght of Stay (LOS)	Hari	41,98	21,06
7. Turn Over Internal (TOI)	Hari	27,39	7,88
8. NDR (Nett Death Rate)	%	0	0
9. GDR (Gross Death Rate)	%	0,01	0

4.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penentu arah dan perkembangan dinamika sosial, aktivitas ekonomi serta fungsi-fungsi distribusi. Arah pembangunan infrastruktur ditujukan pada upaya mengakselerasi perkembangan daerah secara menyeluruh dengan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara finansial pemenuhan infrastruktur memang belum mampu menjangkau pendekatan suplai yang bertujuan merangsang investasi. Namun dengan kemampuan terbatas upaya berkelanjutan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan, pemeliharaan serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan secara luas dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian di Provinsi Jambi.

Penanganan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang utama peningkatan perekonomian dan kemandirian daerah. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum. Selama tahun 2011, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum menyerap 26,39% dari total belanja langsung APBD 2011 atau senilai Rp511.731.691.999,00. Dari alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp422.748.306.420,00. atau 82,61%, guna mendukung kelancaran dalam mencapai program sektor infrastruktur telah dialokasikan anggaran kesekretariatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.29 Program/Kegiatan Bagian Kesekretariatan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.522.486.800		
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	12.000.000	100
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360.000.000	347.226.879	96,45
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	580.000.000	491.475.020	84,74
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	540.000.000	529.069.200	97,98
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	156.872.800	156.779.200	99,94
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.684.000	102.607.000	99,93
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	191.000.000	190.431.700	99,70
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	100,00
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	68.700.000	66.855.000	97,31
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	471.230.000	470.390.000	99,82
Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.186.740.000		-
Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.224.000.000	1.215.306.000	99,29
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	576.540.250	555.389.700	96,33

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Kegiatan Pengadaan Komputer	310.150.000	305.044.000	98,35
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	590.000.000	574.200.000	97,32
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	438.750.000	438.750.000	100
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.370.000	24.370.000	100
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22.929.750	22.929.750	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	246.390.000		-
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	246.390.000	234.843.500	95,31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	261.497.200		-
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	121.497.200	120.496.800	99,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	365.016.000		-
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70.106.400	69.764.000	99,51
Kegiatan Penyusunan Program Tahunan	78.151.000	74.245.000	95,00
Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat	68.395.200	66.245.000	96,86
Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi	90.853.400	90.829.300	99,97
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	57.510.000	56.452.000	98,16

Indikator-indikator capaian program selama tahun 2011 sektor Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebinamargaan

Bina Marga bertanggung jawab terhadap implementasi pembangunan infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pendistribusian kegiatannya berdasarkan pendekatan kewilayahan (Wilayah I s.d. Wilayah VII) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan Provinsi sepanjang 1.480,51 kilometer serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan wilayah perkotaan dengan alokasi dana sebesar Rp304.789.000.000,00. Secara lengkap alokasi anggaran bidang kebinamargaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.30 Program/Kegiatan Bidang Kebinamargaan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program pembangunan jalan dan jembatan	248.831.669.000		
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah I (KabTanjab Barat)	10.504.512.000	9.959.623.500	94,81
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah II (KabTanjab Timur dan MaJambi)	49.789.683.000	46.984.708.388	94,37
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah III (KabBungo dan Tebo)	16.269.408.000	13.436.804.263	82,59
Kegiatan Pembangunan jembatan di wilayah I dan II (KabTanjabbar, Tanjabtim dan MaJambi)	7.593.885.000	7.042.547.000	92,74
Kegiatan Pembangunan jembatan di wilayah III (KabSarolangun)	6.738.537.000	6.448.760.000	95,70
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (KabBatanghari dan MaJambi)	18.553.215.000	15.487.780.812	83,48
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (KabMerangin)	45.154.665.000	9.494.057.164	21,03
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (KabKerinci)	27.168.452.000	22.735.214.157	83,68
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (KabSarolangun)	42.170.667.000	32.155.826.602	76,25
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	11.367.404.000	11.051.688.670	97,22
Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	13.521.241.000	12.622.890.000	93,36
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	55.958.001.000		
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan jalan wilayah perkotaan	29.224.206.000	24.502.857.395	83,84
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah III (KabBungo dan Tebo)	12.643.549.000	7.073.783.946	55,95
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi	7.515.271.000	6.794.582.822	
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi	4.052.502.000	3.986.788.000	
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah VI (KabKerinci)	2.522.473.000	2.378.809.065	

Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Tengah Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai kemandegan (*bottlenecking*) yang selama ini

dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pembangunan jalan wilayah V (Kabupaten Merangin) berbentuk peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Pulau Rengas – Jangkat (*Multiyears*); ruas Bangko – Kerinci; serta ruas TKA -Peninjau – Lubuk Mengkuang - Batas Sumbar hampir memenuhi 50% alokasi APBD Kebinamargaan Provinsi Jambi. Sisanya tersebar di seluruh ruas jalan lainnya. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, penanganan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan yaitu: peningkatan jalan efektif 114,54 km atau 7,74% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 60,13% alokasi anggaran Bina Marga tahun 2011 dan pelaksanaan pekerjaan fungsional sepanjang 711,79 km atau 48,08% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 54,48% alokasi anggaran Bina Marga. Dengan total penanganan jalan hanya sepanjang 852,33 km, atau 57,57% terindikasi bahwa APBD 2011 masih jauh dari rasio kecukupan. Padahal di sisi lain laju kerusakan masih cukup tinggi terkait adanya eksploitasi sumberdaya alam yang penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemeliharaan semata. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan statistik kondisi jalan hingga bulan Desember 2011: 1) Kondisi Baik sepanjang 488,34 Km atau (32,98%); 2) Kondisi Sedang sepanjang 564,75 Km atau (38,15%); 3) Kondisi Rusak Ringan sepanjang 287,87 Km atau (19,44%); dan 4) Kondisi Rusak Berat sepanjang 139,55 Km atau (9,43%). Persentase kenaikan terbesar adalah jalan yang berkondisi sedang dengan kenaikan sebesar 7,97% dibanding kondisi Oktober 2010 sebesar 30,18%. Sedangkan jalan yang berkondisi baik hanya naik sebesar 5,11% dibanding periode yang sama sebesar 27,27%.

Berdasarkan analisa, rumusan kelayakan rasio kecukupan yang ideal sesuai target RPJM dengan laju kerusakan seperti saat sekarang adalah 20 : 80, atau 296,102 km pekerjaan efektif dan 1.184,408 km pekerjaan fungsional/ pemeliharaan yang apabila diuangkan secara total dibutuhkan sedikitnya 545 Milyar berdasarkan harga berlaku tahun 2011.

Menghitung kemampuan pekerjaan efektif rerata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 100 kilometer atau hanya sebesar 6,75%, telah memperlihatkan betapa rendahnya kemampuan APBD untuk memberikan keyakinan pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu sekitar 45% menjadi 75%. Oleh karena itu sejak tahun 2011 ini telah disusun strategi penanganan jalan melalui pemanfaatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak selaku unit pemeliharaan rutin jalan serta berkolaborasi dengan penempatan mandor-mandor jalan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan jalan per 10 km. Diharapkan strategi ini dapat diujicobakan mulai Tahun 2012, sehingga optimalisasi anggaran dapat segera dicapai.

Sedangkan untuk penanganan jembatan selama tahun 2011 yang meliputi: pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan, pembangunan *box culvert* ternyata baru tertangani sepanjang 30 m' atau 11,15% dari target RPJM sepanjang 269 m'. Penanganan selama tahun 2011 telah menyerap anggaran sebesar Rp4.052.502.000,00 dan masih terdapat kekurangan sebanyak 88,85% atau rata-rata 22,21% (59,75 m') per tahun selama 4 tahun ke depan atau dengan kata lain masih dibutuhkan anggaran rata-rata Rp8.071.233.150,00 per tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program kebinamargaan terdapat beberapa permasalahan antara lain: 1) kegiatan tahun jamak (*multiyear*) pembangunan jalan tahap tahun I dengan target pekerjaan dan tingkat serapan anggaran masih sangat rendah. Hal ini selain diakibatkan oleh proses administrasi yang panjang (kontrak Kerja Bulan Agustus 2011), medan jalan yang sangat berat untuk mobilisasi material dan peralatan, kondisi cuaca juga tidak mendukung. Hingga saat ini progres fisik baru mencapai 12% dari target tahun 2011 atau baru mencapai 2,4% dari target keseluruhan hingga akhir tahun 2013; 2) Masalah kelangkaan aspal yang mengakibatkan ada beberapa pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan hingga bulan Desember 2011. Kendala ini sangat memberikan dampak yang sangat luas terhadap beberapa ruas jalan seperti : jalan Peninjau–Lubuk Mengkuang; Sungai Bahar-Durian Luncuk, Sei Duren-Sei Buluh, Simpang Panerokan-Sungai Bahar, Batas Kerinci-Sanggaran Agung; Rehab/Pemeliharaan Jalan Simp. Sawmil-Simp. Logpon, Ma. Tebo - Pulau Temiang - Tanjung; dan Pengaspalan Jalan Ds. Air Batu-Sp. Guguk Kecamatan Sungai Manau. Meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak untuk kegiatan yang belum mampu diselesaikan oleh Pihak ketiga namun memberikan pengaruh langsung terhadap rendahnya penyerapan anggaran kebinamargaan yang berdampak terhadap kinerja secara umum. Kedua permasalahan di atas telah berkontribusi terhadap besaran SiLPA APBD tahun 2011. Antisipasi terjadinya permasalahan telah disusun agar tidak terulang pada tahun-tahun yang akan datang. Salah satunya adalah melaksanakan pelelangan paket-paket pekerjaan yang lebih dipercepat untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik.

2. Sumber Daya Air

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendungan/waduk, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan operasional terhadap wilayah irigasi seluas 5.504 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta pengawasan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas.

Selain itu, masalah pengendalian daya rusak air juga merupakan prioritas dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program turap/talud/bronjong melalui kegiatan perencanaan survey investigasi dan desain (SID), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengawasan turap, penahan tebing, *checkdam* dan pelindung tebing. Target capaian pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor dilakukan secara bertahap setiap tahun. Secara keseluruhan, target capaian dengan melakukan perencanaan survey identifikasi dan desain (turap/talud/bronjong) selama 5 (lima) tahun sepanjang 6.400 meter, sumur air dalam sebanyak 20 lokasi dan normalisasi sungai sepanjang 21.000 m. Sedangkan dalam implementasinya baru mampu disusun rencana desain sepanjang 2.833 meter (44,27%) yang meliputi pembangunan turap, penahan tebing sungai, pelindung tebing sungai dan lokasi sumur air dalam.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku lebih diarahkan pada pembangunan sumur dalam pada wilayah-wilayah sulit seperti pembangunan sumur di wilayah timur provinsi Jambi.

Dalam rangka pemenuhan target-target di atas, dalam tahun 2011, bidang Sumberdaya Air memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp60.705.412.000,00 dengan serapan sebesar Rp54.684.625.274,00 (98,77%) dan capaian yang meliputi: 1) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi seluas 4015 ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 5504 ha. telah mampu dilaksanakan rehabilitasi saluran pembawa sepanjang : 2.560 meter, pembangunan saluran pembuang sepanjang : 4.329 meter, rehabilitasi jalan inspeksi : 8.650 meter dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang : 65.233 meter. 2) Kegiatan Rehabilitasi jaringan rawa seluas 7500 ha dan Pemeliharaan Jaringan Rawa seluas 4600 ha telah mampu dilaksanakan rehabilitasi saluran rawa sepanjang 128.473 meter dan pemeliharaan saluran rawa sepanjang 158.650 meter, 3) Pengamanan Sungai dan Danau telah dilaksanakan pembangunan bronjong sepanjang 120 meter di 2 lokasi, pembangunan talud sepanjang 82 meter di 1 lokasi, Rehabilitasi Check Dam sebanyak 1 unit, dan normalisasi sungai sepanjang 2429 meter, 4) penyediaan sumur air dalam untuk pemenuhan air baku sebanyak 27 unit dengan capaian hingga tahun 2011 sebanyak 6 unit atau 2,2%, Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.31 Program/Kegiatan Bidang Sumber Daya Air serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang		Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1		2	3	4
Program pembangunan turap/talud/bronjong		7.179.908.000		
Kegiatan Perencanaan	turap/talud/bronjong	1.623.140.000		
Kegiatan Pembangunan	turap/talud/bronjong	5.556.768.000		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		44.927.360.000		
Kegiatan Perencanaan	pembangunan jaringan irigasi	2.605.527.000		
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan	jaringan irigasi	12.717.453.000		
Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan	irigasi yang telah dibangun	4.580.329.000		
Kegiatan Pembangunan	jaringan irigasi	2.630.720.000		
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan	jaringan rawa	21.058.841.000	19.306.852.000	91,68
Kegiatan Pengelolaan sumber daya air		1.049.990.000		
Kegiatan Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air		284.500.000		

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	3.847.877.000		
Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah	3.847.877.000	3.493.284.000	90,78
Program Pengendalian Banjir	4.750.267.000		
Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	4.750.267.000		

3. Cipta Karya

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, diperlukan upaya peningkatan, pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang memadai, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan semakin memadainya sarana dan prasarana, diharapkan akan mampu bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait dengan program keciptakaryaan, diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong; dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang secara keseluruhan bertujuan pada pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Implementasi pelaksanaan program antara lain pembangunan, rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana instansi pemerintah yang meliputi kantor-kantor pemerintahan dan rumah dinas pejabat pemerintah; program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui Kegiatan Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat berbentuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum seperti mesjid, pembuatan sumur, rehabilitasi rumah tradisional dan pemenuhan fasilitas dasar lainnya; pembangunan tugu pers, penyusunan DED Jembatan Gantung, Jam Besar dan *landscape* (Revitalisasi Kawasan Kota Seberang) dan perencanaan teknis lainnya termasuk Supervisi Rehabilitasi Rumah Tradisional, Pembangunan Rumah Cinderamata Cantik Kabupaten Sarolangun, Rehab Tugu Jam Kota Baru dan Pembangunan RTH Tanggo Rajo Jambi. Alokasi anggaran Cipta Karya sebesar Rp47.392.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp43.733.926.350,00 (62,28%) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.32 Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.148.034.400		
Kegiatan Pembangunan gedung kantor	12.332.477.850	11.158.465.250	90,48

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	3.247.546.300	3.088.751.350	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7.072.942.350	6.618.487.850	93,57
Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan Prasarana	3.495.067.900	3.376.839.400	
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.018.972.100		
Kegiatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	421.707.250	401.363.650	
Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.597.264.850	1.411.841.400	88,39
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	3.209.660.050		
Kegiatan Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	3.209.660.050	3.133.436.550	97,63
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	15.655.606.150		
Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum	15.655.606.150	14.236.266.550	90,93
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	359.727.300		
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	359.727.300	308.474.350	85,75

4. UPTD Balai Pengujian (Urusan Pekerjaan Umum)

Dalam penyelenggaraan pembangunan, yang menjadi salah satu tujuan adalah untuk mewujudkan mutu pembangunan prasarana fisik bidang jalan, pengairan dan gedung yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan Standar lainnya serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. UPTD Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis dan Teknis Penunjang dalam bidang pelayanan jasa pengujian kualitas Tanah, Geologi dan Bahan Bangunan. Secara umum Laboratorium mempergunakan metode uji Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Standar Internasional (ASTM) serta standar – standar baku mutu lainnya. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan teknologi dan pelayanan kepada pihak ketiga dan masyarakat maka UPTD Balai Pengujian telah mendaftar ke KAN pada tahun 2010 untuk diakreditasi dan sudah di Asemen Awal pada tanggal 26 – 27 Juli 2011 oleh Asemen KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ISO / IEC 17025 : 2005.

UPTD Balai Pengujian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp655.600.000,00 dengan serapan sebesar Rp645.093.550,00 (98,40%), dan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.33 Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Pengujian serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	655.600.000	645.093.550	
Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	483.823.600	478.892.160	98,11
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	171.776.400	170.410.050	

Terdapat beberapa kendala dalam upaya mengoptimalkan mutu pelaksanaan pembangunan fisik bidang jalan terkait masih sangat minimnya peralatan dan bahan untuk menunjang pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat pengujian.

5. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Dalam upaya mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan alat berat milik Pemerintah. Hingga tahun 2011, Pemerintah telah memiliki alat berat yang siap pakai meliputi : Bull Dozer D68-ss Komatsu, Shantui sebanyak 2 unit; Bull Dozer D3 Komatshu sebanyak 1 unit ; Wheel Excavator Hyundai sebanyak 1 unit; Excavator on track Pc 200 sebanyak 2 unit; Excavator on track Pc 130 Sebanyak 2 Unit; Vibro Roller 10 Ton Sebanyak 3 Unit; Vibro Roller 8 ton sebanyak 1 unit; Wheel Loader Back Hoe sebanyak 4 unit; Vibrator Roller SV 502 D 4 Ton Sakai, Hamm sebanyak 2 unit; Dump Truck Ps 120 Mitsubishi, Hino sebanyak 10 unit; Tronton Hino sebanyak 3 unit; Motor Grader MG 300 Mitsubishi, XCMG, Komatsu sebanyak 4 unit; Finisher Maintenance (*Aspalht Finisher*) Sebanyak 1 Unit; Crane Kato 20 ton Tahun 1986 Sebanyak 1 Unit; *Aspalht Recycling* (Daur Aspal) sebanyak 2 unit. Dari kondisi alat berat yang dimiliki ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan atas kerusakan ringan dan kerusakan berat, sementara kondisi alat tersebut masih layak pakai.

Dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp16.539.780.000 telah dilaksanakan pengadaan alat berat sebanyak 2 *fleet* terdiri atas: Bulldozer D3, Vibro Roller 10 ton, Excavator on Treck, Motor Greder, Whell Loader Back Hoes, Dump Truck, dan Mobil Tronton; yang secara operasional ditempatkan di 2 (dua) wilayah: 1) Kabupaten Merangin untuk penanganan wilayah Barat dan 2) Kota Jambi untuk penanganan wilayah Timur. Keduanya direncanakan sebagai unit pemeliharaan rutin jalan dan dilaksanakan tahun 2012 dalam bentuk swakelola.

Tabel 4.34 Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Pengadaan Alat-alat berat	17.133.980.000	<u>16.539.780.000</u>	<u>96,53</u>
Rehabilitasi/Pemel. Alat-alat berat	651.020.000	<u>640.763.000</u>	<u>98,42</u>

4.1.4 Bina Teknik dan Tata Ruang (Urusan Penataan Ruang)

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana disebutkan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi tahun 201 telah berkomitmen untuk melaksanakan kewenangan urusan penataan ruang dengan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi Jambi tahun 2011-2031. Melalui program penataan ruang telah dilakukan kegiatan Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi. Selain itu, juga melalui Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dilakukan kegiatan koordinasi perencanaan infrastruktur dan penataang ruang dengan fokus pada penguatan kelembagaan dengan pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Jambi tahun 2011.

Sebagai salah satu keberhasilan Provinsi jambi, bahwa RTRW Provinsi Jambi tahun 2011-2031 telah diberikan persetujuan Substansi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, berikut juga Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jambi telah mendapatkan persetujuan substansi yang sama. Ini merupakan suatu keterpaduan dan koneksitas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW serta mendapatkan apresiasi pemerintah dengan mampunya Provinsi Jambi secara bersamaan mendapatkan persub. Terkait dengan usulan perubahan fungsi masih dalam proses verifikasi (uji konsistensi) dan penyelesaian tahap akhir oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI.

Dalam tahun 2011, UPT Bina Teknik dan Tata Ruang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, penyerapan sebesar Rp978.209.300,00 (97,82%) dengan output kegiatan meliputi : Aplikasi Database Parsial Bidang Pekerjaan Umum, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Dinas PU Provinsi Jambi, Studi dan Inventarisasi Pola Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, dan Studi dan Inventarisasi Pola Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.35 Program/Kegiatan Bina Teknik dan Tata Ruang serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	205.000.000		
Kegiatan Pembinaan SDM dan Aparatur Jasa Konstruksi	125.000.000	123.620.000	98,90
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	80.000.000	78.908.000	98,64

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	465.000.000		
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150.000.000	148.396.100	98,93
Kegiatan Penunjang Operasional Monitoring Dana DAK	125.000.000	121.113.000	96,89
Kegiatan Penataan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	90.000.000	88.968.800	98,85
Kegiatan Penyusunan Database Infrastruktur Parsial Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000	96.727.000	96,73
Program penataan ruang	330.000.000		
Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi	330.000.000	320.476.400	97,11

4.1.5. Perumahan

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup permasalahan perumahan/ penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan.

Tahun 2011, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di provinsi Jambi yang berorientasi pada tujuan untuk pemenuhan rumah layak huni dan pengurangan perumahan kumuh telah diarahkan pada prioritas pembangunan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Program ini merupakan salah satu fokus dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dengan kegiatan bedah rumah dengan alokasi dana sebesar 23,820 milyar untuk 2.802 unit rumah di 50 Kecamatan. Bantuan bedah rumah ini didasari oleh hasil *verifikasi data by name by address* penduduk miskin di Provinsi Jambi sesuai Data BLT yang diterbitkan BPS. Kegiatan ini juga telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi penerima bantuan dan juga bagi Kabupaten/kota yang secara langsung akan terkait dengan berkurangnya penduduk miskin di Provinsi Jambi. Program ini juga secara simultan dilakukan oleh SKPD lainnya termasuk bea siswa dan sertifikat rumah yang telah menerima bantuan bedah rumah tersebut.

Dalam upaya perbaikan permukiman yang dilakukan, pada hakekatnya merupakan terobosan untuk menciptakan suasana permukiman rumah swadaya yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu dalam mendukung terciptanya tujuan tersebut, melalui program pengembangan perumahan telah dilaksanakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 38.431 M' dan drainase 3.146 M' yang tersebar di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten/Kota lainnya. Dari target yang menjadi indikator capaian hingga 2015 yaitu sepanjang 192.000 M', untuk tahun 2011 telah mampu terpenuhi capaian kinerja sebesar 20%.

Dalam pelaksanaan program SAMISAKE, pekerjaan bedah rumah dilakukan dengan bekerjasama pihak TNI dan masih ditemui beberapa masalah terutama terkait dengan biaya yang telah ditetapkan tidak mendapatkan keringanan pembebasan pajak bahan material dari Kantor Pajak Provinsi Jambi. Hal ini mengakibatkan nilai alokasi berkurang dari alokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam APBD Perubahan 2011 yang teralokasi dana sebesar 700 juta hanya mampu terserap sebesar 50% yang diakibatkan oleh waktu yang sangat singkat sehingga akan mengganggu administrasi kegiatan. Terkait dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, berdasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak BPK Provinsi Jambi untuk pengalokasian tidak boleh tertuang didalam struktur APBD pada Belanja Langsung pada salah satu SKPD dan menjadi kegiatan. Oleh karena itu, disarankan untuk mendistribusikan ke daerah secara langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.36 Program/Kegiatan Bidang Perumahan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan Per Bidang			Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
1	2	3	4		
Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)			24.520.000.000		
Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pengairan dan Lainnya)	Lingkungan,		23.820.000.000	23.396.700.000	98,22
Pendukung (Infrastruktur, Jembatan, Pengairan dan Lainnya)	Program (Jalan, Lingkungan, SAMISAKE)		700.000.000	349.050.000	49,86
Program Pengembangan Perumahan			26.008.500.000		
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat			2.839.109.850	2.795.207.150	98,45
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya			23.169.390.150	22.657.704.000	97,79

Terhadap program pengembangan perumahan, ini merupakan salah satu Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan kawasan permukiman di Kabupaten/Kota yang sesungguhnya setiap tahun menerima usulan ataupun permohonan dari Kab/kota untuk peningkatan jalan lingkungan maupun sarana prasarana pemukiman lainnya. Jika ditelaah berdasarkan kewenangan itu menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakannya. Hal ini dikarenakan akan menjadi tanggungjawab daerah untuk pemeliharaannya setelah pekerjaan telah dilakukan serah terima kepada Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk tahun 2012 dengan memberikan langsung kepada Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan melalui SKPD Kecamatan dan Kelurahan. Terkait dengan pembebasan pajak, telah diupayakan dengan menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan Kantor Pajak, namun belum dapat diakomodir dengan berbagai alasan. Terkait dengan pengembangan perumahan, akan menjadi salah satu poin penting yang akan ditindaklanjuti agar ke depan tidak menjadi suatu kesalahan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mempersiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

Pada tahun anggaran 2011 untuk urusan perencanaan melalui Bappeda Provinsi Jambi telah dianggarkan dana sebesar Rp11.538.116.700 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;** program ini bertujuan mempersiapkan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2012, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.

Adapun output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan forum SKPD, Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Jambi; tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan APBD dan terlaksananya rapat koordinasi APBN di Provinsi Jambi; Tersusunnya LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sering terlambatnya pelaksanaan musrenbang Kab/Kota sehingga Provinsi harus menunggu hasil Musrenbang Kab/Kota; bahan LKPJ sering terlambat disampaikan oleh SKPD dan perkembangan data tidak dilengkapi narasi penjelasan yang baik.

Solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan membuat jadwal pelaksanaan musrenbang Kab/Kota dengan mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten; memperbaiki narasi LKPJ dengan mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.

- 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.**

Program ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi secara makro, guna menghasilkan sinergitas antar sektor dan antar pelaku ekonomi. Dalam rangka mencapai program tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Penyusunan Model Marketing Pariwisata, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi, 3) Sosialisasi RPJMD 2011-2015, 4) Penyusunan Key Performance Indicator, 5) Koordinasi dan Perencanaan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, 6) Koordinasi dan Perencanaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 7) Penyusunan Model Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terintegrasi PNPM.

Dengan terlaksananya program ini maka: 1) Tersusunnya model marketing pariwisata, yang dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata di Provinsi Jambi, 2) Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi, guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, 3) Tersosialisasikannya RPJMD Provinsi Jambi kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya pihak kabupaten/kota se Provinsi Jambi, 4) Tersusunnya Key Performance Indicator, sebagai instrumen yang

baku dalam menentukan kinerja suatu sektor/SKPD. 5) Terlaksananya koordinasi perencanaan dalam pengendalian kerusakan hutan dan lahan, guna memadu-serasikan program dan kegiatan dari SKPD teknis. 6) Terlaksananya koordinasi perencanaan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebagai sektor yang dominan dan penggerak utama (prime mover) ekonomi kerakyatan di Provinsi Jambi, 7) Tersusunnya model pengembangan Desa Mandiri Pangan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai alternatif dalam merancang dan mengembangkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa Mandiri Pangan.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; Perencanaan dan koordinasi Bidang Pemerintahan dan SDM; Perencanaan dan Koordinasi program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan perkembangan Demokrasi Provinsi Jambi kearah yang lebih baik, tersusunnya Renstra Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi, tersusunnya Renstra HIV/AIDS dan Narkoba, Rencana Aksi Daerah MDGS, Analisis Ketimpangan Gender, tersusunnya laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tersusunnya laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TK-PKD) dan tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jambi, serta tersusunnya dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Hasil yang telah dicapai adalah terlaksananya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur wilayah melalui koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jambi yang secara rutin melakukan Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan Rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jambi, tujuan dilaksanakannya koordinasi dalam forum BKPRD adalah dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Selanjutnya melalui kegiatan koordinasi tersebut, BKPRD Provinsi Jambi berhasil memberikan Rekomendasi Gubernur kepada 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (Kota) secara serentak setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD dalam rangka Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang mengantarkan Kabupaten/Kota dalam pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota dalam forum BKPRD guna memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum. Secara nasional, Provinsi Jambi mendapat apresiasi sebagai Provinsi tercepat dalam penyelesaian pembahasan RTRW Kabupaten/Kota. Provinsi Jambi juga telah memperoleh Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum atas penyelesaian pembahasan dan dokumen RTRW Provinsi Jambi.

Dokumen RTRW Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2031 telah dapat diselesaikan bersama Rancangan Perda (Raperda) RTRW Provinsi, Album Peta RTRW Provinsi dan buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. KLHS dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat baik atas kerjasama antara pihak donatur (DANIDA International – Denmark), Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Jambi. Kementerian Dalam Negeri dibawah

Direktorat Jenderal Bina Bangda akan menjadikan Buku KLHS Provinsi Jambi tersebut sebagai best practice bagi Provinsi lain yang sedang menyusun dokumen KLHS.

Sementara itu, yang menjadi kendala dalam penyelesaian Perda RTRW Provinsi Jambi adalah dari substansi kehutanan masih menunggu keluarnya Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan. Hal ini terkait dengan usulan perubahan fungsi yang masih dalam proses verifikasi (uji konsistensi) dan penyelesaian tahap akhir oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI. Proses verifikasi Tim Terpadu ini telah dimulai sejak Desember 2010 hingga saat ini masih dalam penyelesaian Tahap akhir.

Kegiatan Pemantapan Database Infrastruktur berbasis Spasial, telah diperoleh hasil capaian tersedianya database infrastruktur yang menjadi arahan prioritas dalam pengembangan Infrastruktur di Provinsi Jambi. Dalam Kegiatan ini terdapat beberapa keluaran diantaranya Penyusunan Master Plan Danau Sipin, Penyusunan Inventarisasi Data Kawasan Pertanian sawah di Provinsi Jambi dan Penyusunan Database Hasil Survey Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan. Semua kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan arahan dalam rencana pengembangan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemanfaatan Citra Satelit Penginderaan Jauh, telah terselenggara dengan baik atas kerjasama dengan pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan PT SEKALA yang berpusat di Canggü, Bali sebagai tenaga instruktur. Para Peserta terdiri dari Dinas teknis terkait di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan keterampilan dasar pemetaan dapat dikuasai oleh SDM di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam rangka mengolah data-data spasial sebagai dasar bagi kebijakan bidang Penataan Ruang, Guna Lahan dan bidang teknis keruangan lainnya.

5. Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah. Melalui program ini, pada tahun 2011 Provinsi Jambi menjadi tuan rumah Rakorgub Belajasumba yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, gubernur – gubernur dan SKPD terkait se-wilayah BELAJASUMBA serta nara sumber dari Kementerian PU, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sebagai koordinator komite bidang penelitian Rakorgub se-Wilayah Sumatera, Provinsi Jambi juga menjadi tuan rumah rapat komite bidang penelitian. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda dan Balitbangda se-Wilayah Sumatera dan menghasilkan program penelitian bersama yang selanjutnya dibahas dalam Rakorgub se-Wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan program ini di tahun 2011 tidak ditemui kendala yang berarti.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan menyebar luaskan informasi kepada stakeholders dan untuk keperluan perencanaan program Pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut pada tahun 2011 dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Masyarakat Miskin, kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi serta kegiatan Pengembangan Sistem Pemusatan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan pendataan Masyarakat Miskin Tahun 2011, bertujuan untuk menyediakan data penduduk miskin/prasejahtera sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima Program SAMISAKE di 131 Kecamatan sampai Tahun 2015. Verifikasi data penduduk miskin tahap Pertama pada bulan Februari-April 2011 di 50 Kecamatan Pilot Project Program SAMISAKE dengan alokasi dana APBD Murni sebesar Rp250.000.000,00. Verifikasi tahap Kedua pada bulan Oktober–Nopember 2011 di 81 Kecamatan dengan alokasi dana APBD-Perubahan sebesar Rp958.581.700,00. Pada pelaksanaan verifikasi tahap pertama di 50 Kecamatan dari 12.987 KK sangat miskin maka terverifikasi data penduduk sangat miskin berjumlah 10.300 KK. Selanjutnya pada pelaksanaan verifikasi tahap kedua di 81 Kecamatan dari 21.669 KK sangat miskin maka terverifikasi data penduduk sangat miskin berjumlah 15.022 KK.

Dari hasil verifikasi KK sangat miskin tersebut, terjadi penurunan jumlah KK sangat miskin dari 34.180 KK menjadi 25.322 KK antara lain disebabkan:

1. Adanya peningkatan status sosial ekonomi dampak dari keberhasilan pembangunan dan tumbuhnya industri dan perkebunan (sawit dan karet).
2. Berpindah tempat tinggal.
3. Meninggal dunia
4. KK sangat miskin tersebut ikut/bergabung dengan anggota keluarga lainnya sehingga tidak tercatat sebagai KK.

Kegiatan Palayanan data dan Publikasi, merupakan upaya memenuhi kebutuhan dan publikasi data pembangunan yang berupa penyusunan Jambi Dalam Angka dan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010, kerjasama Bappeda Provinsi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Hasil penyusunan buku tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan/Intansi lingkup Provinsi Jambi.

Kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah, bertujuan mendesain sebuah sistem pemusatan data secara terstruktur dengan cara mengumpulkan data-data mengenai pembangunan daerah dan dirancang sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan kebutuhan, pada kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah dilaksanakan beberapa sub kegiatan:

- a. Pembuatan website Bappeda Provinsi Jambi yang berisikan informasi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya website ini diharapkan semua informasi yang ada pada Bappeda dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pengembangan aplikasi pemusatan yang dirancang dengan sistem data base berbasis web bertujuan untuk mempermudah dalam pengisian data yang telah terkoneksi langsung ke internet sehingga SKPD terkait dapat melakukan Entry Data langsung ditempat masing-masing.
- c. Pemeliharaan server bertujuan untuk meningkatkan fungsi server secara maksimal, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperbaiki jaringan server simda yang mengalami kerusakan, menambah access point untuk memperkuat jangkauan internet.

7. Pada tahun 2011 dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi, mendapat apresiasi oleh Pemerintah Pusat berupa :

- a. Anugerah Pangripta Nusantara sebagai Provinsi yang dinilai berhasil menyusun Dokumen RPJMD Terbaik II Tingkat Nasional.
- b. Urutan Pertama Penyelesaian dan penetapan PERDA APBD Perubahan tahun anggaran 2011 dan PERDA APBD tahun anggaran 2012.
- c. Provinsi Jambi telah mendapatkan persetujuan substantif Draft RTRW Provinsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan telah memfasilitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk memperoleh persetujuan substantif Draft RTRW Kabupaten/ Kota dari Kementerian Pekerjaan Umum dan persetujuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pembahasan RANPERDA RTRW Kabupaten/Kota dengan DPRD masing-masing.
- d. Pemerintah Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bangda dan pihak Pemerintah Kerajaan Denmark, telah diselesaikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Jambi dan dokumen tersebut akan dijadikan contoh bagi Provinsi lain yang akan menyusun KLHS RTRW provinsi masing-masing.
- e. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Perencana di Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas dan Universitas Jambi telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diikuti oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.1.7. PERHUBUNGAN

Pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun 2011 bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Isu yang saat ini sudah menjadi salah satu permasalahan nasional adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi kemampuan jalan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2011 lebih difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan angkutan barang. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan. Selain itu, juga untuk peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, dalam penanganannya dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Provinsi Jambi.

Tahun 2011, urusan perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.589.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.555.665.457,00 atau sebesar 95,16%. Yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan pada Tahun 2011, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.37 Program/Kegiatan Dinas Perhubungan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2011

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG	11.589.400.000	10.440.108.817	
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.318.340.500		
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	15.000.000	
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.000.000	83.476.200	
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.576.000	62.076.000	
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.567.000	65.497.300	79,33
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	133.000.000	132.925.400	
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	105.892.000	103.196.800	
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	140.000.000	136.467.000	97,48
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.255.500	29.247.000	85,38
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.000.000	27.000.000	100,00
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	45.250.000	44.950.092	99,34
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	497.200.000	131.200.000	100,00
Kegiatan Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah	33.600.000	33.600.000	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.930.263.000		
Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	744.063.000	739.843.000	
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000	24.500.000	
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	199.600.000	196.610.420	
Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	916.600.000	890.531.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84.125.000		
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84.125.000	78.647.000	93,49

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000		
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000		
Belanja Pegawai	40.000.000		
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000	39.775.000	99,44
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.910.578.500		
Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.324.800.000	1.292.859.555	
Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	84.852.000	83.355.750	
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	1.329.968.000	1.199.202.100	
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	170.958.500	169.240.820	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.416.206.500		
Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	175.000.000	166.315.500	
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah, dan mudah	336.244.500	326.182.200	
Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	127.577.000	122.472.880	
Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	236.235.000	224.822.350	
Kegiatan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	144.874.000	144.612.800	
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkumum teladan	175.877.000	170.276.900	
Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	50.000.000	49.174.850	
Pengendalian Pengawasan Terhadap Kegiatan Kelayakan Sertifikasi Kapal Sungai	170.399.000	170.398.650	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.675.130.500		
Kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Marka Jalan, dan pagar pengaman jalan	2.675.130.500	2.564.382.500	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.214.756.000		
Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	1.214.756.000	922.269.750	

Dari pelaksanaan pembangunan ini telah dilaksanakan peningkatan parasarana dan fasilitas perhubungan uji layak jalan serta tertib administrasi kendaraan bagi kendaraan umum selama satu tahun sebanyak 397 unit kendaraan dan secara keseluruhan jumlah akumulasi uji layak di Provinsi Jambi sebanyak 22.057 unit. Selain itu, dalam rangka menginfentarisasi jumlah angkutan yang memiliki pelayanan izin trayek baik angkutan dalam provinsi maupun luar provinsi telah terdata terjadi lonjakan kendaraan angkutan penumpang yang cukup tinggi yaitu 529 unit untuk AKAP dan 1.113 untuk AKDP jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu AKAP 154 unit, dan AKDP 1.139 unit. Hal ini menggambarkan terjadi lonjakan mobilitas orang dan barang ke provinsi jambi yang dapat diasumsikan bahwa tingkat perekonomian yang semakin meningkat. Disamping itu, dampak yang nyata tentunya telah menjadikan jasa transportasi darat sebagai salah satu perhubungan antar wilayah serta memacu pertumbuhan perekonomian secara merata di wilayah Provinsi Jambi. Terhadap pemenuhan fasilitas perhubungan, telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor (JTKB) dan Pelebaran Jalan Masuk/Keluar dan Saluran Air di JTKB Bukit Baling. Hingga Tahun 2011, JTKB di Provinsi Jambi sebanyak 5 Unit di Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Bungo, dan Sungai Penuh. Jika dilihat dari data statistik Perhubungan, arus pengangkutan yang tinggi melewati JTKB Muaro Jambi sebanyak 51.118 kendaraan dan Batanghari sebanyak 58.246 kendaraan. Apabila kita bandingkan dengan sarana dan prasarana terminal masih belum optimal dimana yang menggunakan komputerisasi baru 2 (dua) JTKB.

Selanjutnya, terhadap program peningkatan dan pengamanan lalu lintas dengan menitik beratkan pada pemeliharaan rambu-rambu jalan dan pemeliharaan traffic light serta melaksanakan kegiatan Patroli Jalan Raya telah dilaksanakan Pengadaan Lampu Lalu Lintas simpang tiga Bangko, Pengadaan Pagar Pengaman jalan di Kabupaten Kerinci sepanjang 300 meter, Pengadaan pagar pengaman jalan di Jalan Jembatan Batang Hari II Simpang Niaso sepanjang 200 meter, Pengadaan dan Pemasangan warning light di JTKB 2 paket, Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Simpang Niam- Merlung sepanjang 122 meter, Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Jalan Ma. Bulian-Tempino 110 unit, Pengadaan dan Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Ness sebanyak 100 unit, Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Jalan Simpang Niam- Merlung 122 unit, Pengadaan dan Pemasangan Rambu jalan di Ma. Tembesi-Sarolangun sepanjang 350 buah, dan pengadaan dan pemasangan rambu jalan di Jalan Jembatan Batang Hari II di Simp. Niaso sebanyak 180 buah serta pengadaan dan pemasangan rambu sungai sebanyak 63 unit. Selain itu, juga dilaksanakan penyusunan design manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Sultan Thaha Jambi. Dengan dilakukannya penyediaan berbagai prasarana pendukung lalu lintas dan rambu-rambu ini baik untuk transportasi darat maupun laut, diharapkan dapat berimplikasi pada semakin menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya keselamatan dan kenyamanan mobilitas.

Terhadap transportasi udara, hingga tahun 2011 terjadi peningkatan frekwensi penerbangan yaitu : Pesawat masuk dan keluar sebanyak 6.082 kali dengan jumlah penumpang 759.315 orang. Disamping itu, juga dalam meningkatkan Bandara Sulthan Thaha Syaifuddin yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura telah

dilakukan kerjasama terutama rencana pengembangan Bandara menjadi Bandara Internasional dengan kapasitas penerbangan skala nasional dan internasional.

Beberapa permasalahan Sektor Perhubungan selain pelanggaran lebih muatan angkutan barang, sumber daya manusia dan, minimnya anggaran pembangunan sarana prasarana perhubungan adalah berkurangnya kenyamanan dan ketidak tertiban pelayanan angkutan udara. Untuk mengurangi dan mengeliminir terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara bertahap terus melakukan pembenahan dan peningkatan sarana prasarana, pengaturan, perencanaan serta kualitas sumber daya manusia.

4.1.8. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi merupakan prioritas pembangunan ke 4 (empat) dalam RPJMD Provinsi Jambi yakni *"Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan"*. Pada tahun 2011 program dan kegiatan dibiayai melalui sumber dana APBD murni Provinsi Jambi sebesar Rp3.099.337.900,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp861.930.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terbagi dalam 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

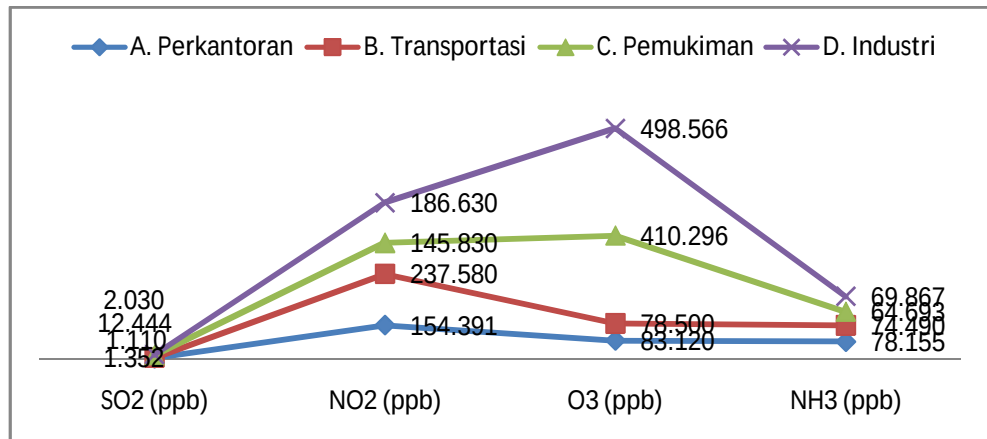
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja Program berupa : 1). Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, 2). Pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Provinsi Jambi, 3). Pemantauan Bahan Perusak Ozon. Besar dana yang digunakan Rp2.101.510.700,00 . Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dapat diketahui bahwa Sungai Batanghari dalam status tercemar sedang sampai berat. Bagian dari Sungai Batanghari yang mengalami tercemar berat adalah Desa Pasar Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo. Bahan pencemar yang masuk berupa bahan organik yang berasal dari aktivitas pasar. Sementara Desa Sanggaran Agung Kecamatan Keliling Danau dan Desa Muara Imat Kec.Batang Merangin Kabupaten Kerinci terdapat pencemaran terhadap logam Mangan (Mn) sementara Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh terdapat pencemaran zat besi (Fe). Diduga penyebab dari pencemaran ini adalah tingginya pemakaian dosis pupuk sehingga unsur yang tidak terserap oleh tumbuhan akan terbawa dalam aliran air sungai.

Kualitas udara di Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemantauan di 11 kab/kota dengan lokasi pantau perkantoran, transportasi, wilayah pemukiman dan area industri terhadap unsur SO₂, NO₂, CO₂ serta NH₃ menunjukkan bahwa kualitas udara masih dibawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 4.13 Kualitas Udara di Provinsi Jambi Tahun 2011



Berdasarkan kualitas udara yang terpantau di sejumlah wilayah tersebut maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki kualitas udara yang masih baik dan aktivitas yang ada belum mencemari udara. Namun demikian upaya preventif pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pemantauan Bahan Perusak Ozon (BPO) telah dilaksanakan terhadap usaha yang mempunyai potensi untuk menghasilkan zat perusak ozon, seperti usaha servis AC mobil/kulkas, dan bengkel. Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) kabupaten pada 18 sampel perusahaan, dimana Kab. Merangin 4 (empat) perusahaan, Kab. Bungo 7 (tujuh) perusahaan, Kab. Batanghari 4 (empat) perusahaan dan Kab. Tanjab Barat 3 (tiga) perusahaan. Jika dilihat dari penggunaan BPO dalam setahun sebesar 1.456 kg, maka ini tergolong tinggi. Perlu upaya untuk mencari solusi terhadap barang substitusi penggunaan BPO agar tidak memberi dampak lebih buruk bagi lapisan ozon.

1.2. Pengkajian Dampak Lingkungan

Pengkajian dilakukan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh beberapa usaha yang berada dipinggiran sungai Batanghari. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut terlihat bahwa usaha-usaha yang berada dipinggir Sungai Batanghari sangat mempengaruhi terhadap jumlah Oksigen Terlarut/Disolved Oxygen (DO). Dalam suatu perairan kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurang dari derajat 5, sementara berdasarkan hasil kajian tersebut rata-rata jumlah oksigen terlarut kecil dari 3. Rendahnya kadar oksigen terlarut memperlihatkan tingginya penggunaan oksigen oleh jasad renik sehingga menyebabkan kualitas air akan menurun untuk penggunaan lainnya.

1.3. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan upaya penilaian ketaatan dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian telah dilaksanakan sebanyak 40 perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian maka terdapat 2 perusahaan yang *sangat taat*, 15 perusahaan yang *taat*, 8 perusahaan termasuk *kurang taat*, serta 12 perusahaan yang *tidak taat*. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya terhadap 23 perusahaan yang diikuti kembali maka

8 perusahaan mengalami penurunan peringkat, 4 perusahaan mengalami kenaikan peringkat dan perusahaan yang tidak mengalami penurunan atau kenaikan peringkat sebanyak 11 perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka BLHD provinsi akan meningkatkan monitoring dan membina perusahaan agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di sekitar area usahanya serta memberikan reward dan punishment.

1.4. Koordinasi Penyusunan AMDAL

Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan mutu pelaksanaan AMDAL dan dokumen AMDAL terhadap dunia usaha/ lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan koordinasi penyusunan AMDAL. Koordinasi AMDAL terdiri dari :

- a. *Pemantauan kondisi areal dunia usaha/kegiatan ditargetkan.* Kegiatan ini telah dilakukan 11 kali pemantauan terhadap areal perusahaan dimana hasilnya memperlihatkan bahwa belum adanya kesesuaian areal perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini sebagai masukan bagi penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk perusahaan tersebut untuk mentaati rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut.
- b. *Pembahasan dan Penilaian Dokumen AMDAL.* Pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penilai dokumen lingkungan di kabupaten/kota sebanyak 41 dokumen dari target pembahasan/penilaian dokumen sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan. Dalam penilaian dokumen pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diberikan masukan sesuai aturan yang berlaku sehingga akan menjadi dokumen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- c. *Pembinaan Lisensi Komisi Pembinaan Lisensi Komisi AMDAL Kab/Kota.* Kegiatan pembinaan lisensi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota telah dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten. Dari penilaian tersebut lisensi hanya dapat diberikan pada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sarolangun karena telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL.
- d. *Pembinaan dan Monitoring Implementasi RKL dan RPL.* Pelaksanaan kegiatan pembinaan RKL/RPL ke perusahaan-perusahaan dengan target 30 perusahaan yang tersebar di 11 Kabupaten di Provinsi Jambi telah dimulai pada bulan Februari 2011 dan berakhir pada bulan Desember 2011. Dari pembinaan tersebut didapatkan bahwa pelaporan pengelolaan RKL dan RPL perusahaan tersebut tidak sesuai antara fakta dilapangan dengan hasil yang dilaporkan. Pelaporan dokumen belum sesuai dengan Pedoman dan Format Penyusunan Laporan RKL/RPL seperti yang tertuang dalam KepMen LH No.45 tahun 2005. Sebagai tindaklanjutnya BLHD telah memberi teguran terhadap perusahaan yang bersangkutan.
- e. *Rakornis AMDAL.* Kegiatan Rakornis AMDAL telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2011, kegiatan ini mengambil tema "Pembinaan AMDAL" dengan tujuan mendapatkan informasi dari pihak Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan AMDAL yang telah dilakukan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Mega Indah Telanaipura.

Adapun peserta Rakornis yaitu utusan dari BLH/KLH Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

- f. *Publikasi AMDAL*. Pengumuman atau publikasi publik terhadap suatu rencana/usaha dan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan target pelaksanaan yaitu 10 kali pengumuman. Publikasi dilakukan di Harian Tribune Jambi dari Bulan Pebruari s/d Oktober 2011, selama 6 hari.

1.5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan ini terdiri dari : 1). *Penilaian Kota Bersih (ADHI KARYA MANGKUNEGORO)* bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan khususnya di bidang kebersihan. Penilaian dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu penilaian 1 (pertama) telah dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yaitu pada Bulan Maret-Mei sedangkan penilaian ke 2 (dua) dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2011 bersama dengan Tim dari KLH Pusat.pemenang untuk penilaian Kota Bersih peringkat 1 diraih oleh Kota Sarolangun dan peringkat II oleh Kota Merangin. 2). *Penilaian Adipura*, penilaian dilakukan berdasarkan Kriteria Fisik menyangkut Gambaran kondisi fisik lingkungan perkotaan yaitu perumahan, sarana kota, sarana transportasi yang terdiri dari perencanaan pengelolaan lingkungan perkotaan. Pelaksanaan pada Bulan Maret s/d Mei Tahun 2011 (Penilaian I) dan Bulan Oktober 2011. Pemenang Penilaian Adipura tingkat provinsi adalah Kota Merangin di Kabupaten Mrangin dan Kota Sarolangun di Kabupaten Sarolangun. 3). *Penghargaan Kalpataru* adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok orang yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Pelaksanaan penilaian Kalpataru telah dilakukan pada Mei 2011 (periode 1). Pemenang penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.38. Pemenang penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jambi

No	Kriteria Penilaian	Peringkat	Pemenang
1.	Perintis Lingkungan	I	Wiji Desa Karya Harapan Harapan Mukti, Kec. Pelepat Kab. Bungo
		II	M. Zenkoersani Desa Aur Duri Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
2.	Pengabdian Lingkungan	I	Tukiran Desa Lubuk Pauh, Kec. Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci
		II	Ir. Joko Mariono SMKN 2 Unit 1 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi
3.	Penyelamat Lingkungan	I	Kelompok Tani Wanita Mandiri Desa Solok, Kec. Kumpeh Kab. Ma. Jambi
		II	Kelompok Pelestarian Sei. Bt. Tebo Ds. Teluk Panjang, Kec. Bathin III Kab. Bungo

1.6. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah

Sasaran kegiatan ini peningkatan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah dengan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk meningkatkan kompetensi UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi dan tetap konsisten dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang berdasarkan ISMEC 17025 Tahun 2005.

1.7. Penaatan Hukum Lingkungan

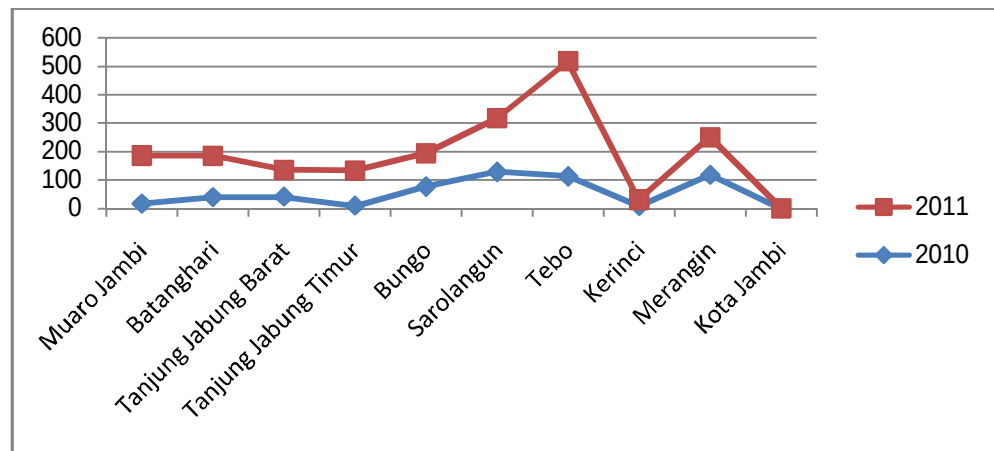
Sasaran dari kegiatan ini adalah peningkatan penataan hukum di bidang lingkungan. Sampai dengan akhir Desember 2011 ini, *kasus pencemaran lingkungan* yang ditangani sebanyak 16 kasus dari target yang telah ditetapkan sebanyak 10 kasus dan tindaklanjutnya adalah pemberian sanksi administrative maupun memberi rekomendasi untuk tindakan hukum. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah *pengawasan TPS/Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)* pada dunia usaha sebanyak 10 perusahaan, sosialisasi pembentukan pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan, *sosialisasi peraturan dibidang Lingkungan Hidup* di 11 Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2011 bertempat di Hotel Mega Indah Jambi dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari utusan dari BLH/KLH Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, *operasional pemberantasan PETI* yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi. Operasi PETI di Kabupaten Sarolangun selama 3 hari dari tanggal 25 s/d 27 Oktober 2011. Dari operasi PETI tersebut didapat oknum yang telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat.

2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

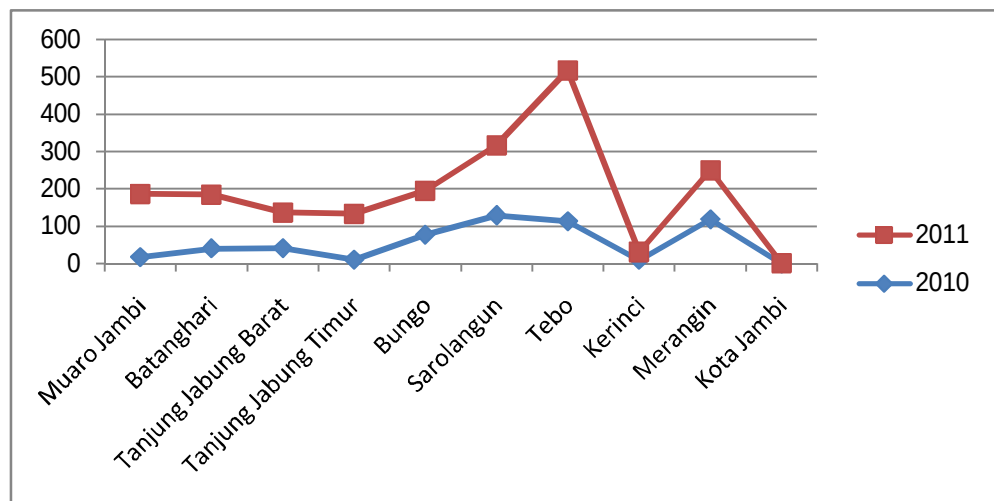
2.1 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dan Penyuluhan Lahan dan Hutan

Dana yang digunakan untuk program ini adalah Rp101.580.000,00. Dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas kebijakan konservasi SDA dan kualitas penyuluhan lahan dan hutan sehingga terlestarnya keanekaragaman hayati. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa : 1). *Penilaian Menuju Indonesia Hijau (MIH)* untuk Provinsi Jambi telah dilaksanakan pada awal Oktober 2011 di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. 2). *Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Kebakaran Lahan dan Hutan* telah dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan sampai dengan Desember 2011 jumlah Hot Spot di Provinsi Jambi sebanyak 1.396 titik. Gambaran hotspot Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 4.14 Jumlah Hot Spot Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Jambi Pada Tahun 2011



Gambar 4.15 Perbandingan Jumlah Hot Spot (titik api) Tahun 2010 dan 2011



Berdasarkan kedua grafik diatas maka pada tahun 2011 periode bulan Juni sampai Oktober terdapat peningkatan titik api, hal ini berkaitan dengan dimulainya musim kemarau. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2010 maka jumlah titik api pada tahun 2011 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk beberapa kabupaten tertentu seperti Sarolangun, Tebo dan Merangin memerlukan perhatian yang lebih serius, hal ini berkaitan dengan peningkatan emisi karbon. Sesuai dengan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan KTT G 20 di Pitssburg Amerika Serikat dalam menurunkan emisi karbon hingga 26% maka pada tahun 2012 mitigasi kebakaran lahan/hutan akan lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan lebih terarah sesuai dengan waktu dibutuhkan dan lokasi dimana titik api tersebut terjadi.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

1.1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Besar dana yang digunakan Rp103.290.000,00. Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah : 1). *Peningkatan kualitas data dan system informasi pengelolaan lingkungan hidup*, 2). *Pembuatan Data base website* BLHD Provinsi Jambi telah selesai dilaksanakan pada akhir Nopember 2011. 3). *Pembuatan leaflet* sebanyak 1.000 lembar sudah 100% dilakukan pencetakan serta 4). Pelaksanaan operasional mobil hijau sampai dengan Desember 2011 yaitu telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Mobil Hijau sebanyak 15 kali dan pameran sebanyak 3 kali.

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan, sehingga aktivitas kehidupan tersebut menimbulkan dampak negative bagi lingkungan.
2. Sulitnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Secara umum kebakaran ini disebabkan oleh musim kemarau panjang, kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan secara tradisional, akses ke titik api sulit di jangkau, sumber air terbatas, luas lahan gambut yang mudah terbakar.

Solusi yang bisa diambil dari kedua solusi diatas adalah : meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan. Dalam menangani mitigasi kebakaran hutan dan lahan maka akan diambil langkah koordinatif dalam pencegahan kebakaran.

4.1.9. BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program peningkatan promosi dan kerjasama ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang antara lainnya adalah; Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah; Kegiatan Inventarisasi Potensi Investasi Daerah Tertinggal; Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal; Kegiatan peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri.

Hasil atau output dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, dapat dilaporkan antara lain;

- 1) Terlaksananya temu usaha kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di dua Kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Dari pelaksanaan tersebut, terinventarisir berbagai permasalahan yang antara lainnya, adalah adanya keengganan para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui Perbankan (Gap Pelayanan Perbankan), karena tingginya Suku Bunga, ketidaktahuan pengusaha dan terbatasnya agunan para pengusaha.

- 2) Terlaksananya Inventarisasi Potensi Investasi daerah tertinggal yang belum dikelola secara optimal. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, maka telah tersedia data Potensi Investasi Daerah Tertinggal di Provinsi Jambi dan dalam 3 bahasa.
- 3) Terlaksananya Fasilitasi koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, dihasilkan Dari kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa terhitung tanggal 23 Juni 2011, BKPM Pusat tidak akan memproses lagi seluruh aplikasi PMDN, tapi diserahkan kepada Daerah. Pusat hanya memproses perizinan untuk PMA. Untuk itu Daerah harus melakukan penguatan penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal untuk mendapatkan pelimpahan/pendelegasian wewenang seluruh perizinan dan non perizinan penanaman modal dari Gubernur/Bupati/Walikota. PTSP harus didukung ketersediaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara on-line (SPIPISE) dengan mekanisme kerja dan prosedur perizinan yang jelas dan transparan (tersedianya informasi prosedur dan perizinan serta biaya yang jelas). Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, dapat dilakukan dengan memantapkan kemitraan KADIN dengan Pemprov, memantapkan kelembagaan/Forum Investasi Daerah (BKPMPI), Perdagangan, Bappeda dan Kadin, membentuk Forum Promosi dan Investasi Daerah untuk memantapkan kebijakan investasi dari segi potensi, kemudahan informasi serta komunikasi secara intensif.
- 4) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penanaman modal terhadap 226 perusahaan PMDN/PMA. Dengan terlaksananya kegiatan ini, telah dihasilkan Buku Profil Perusahaan di Provinsi Jambi Tahun 2011.
- 5) Diikutinya beberapa pameran dan temu usaha baik dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi investor lokal maupun asing. Untuk mencapai sasaran program telah dilaksanakan kegiatan yang antara lain; Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terlaksananya kegiatan ini telah memberikan hasil yang antara lain; terinventarisasinya izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan berupa SP, IUT, APIT, IMTA dan Izan-izin yang diberikan oleh Kab./Kota; tersusunnya Leaflet Jenis dan Persyaratan Perizinan Penanaman Modal.

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Program ini bertujuan memberikan informasi kepada investor mengenai potensi sumberdaya serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki, agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran dari program tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Proposal Peluang Investasi dengan output kegiatan tergalinya potensi Investasi yang akan dikembangkan di Provinsi Jambi, sehingga mampu memberikan masukan kepada para calon investor. Hasil dari kegiatan ini antara lainnya adalah tersusunnya data Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi dan tersusunnya Buku Proposal Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi dalam 3 bahasa.

Capaian indikator dari pelaksanaan beberapa program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu terlihat beberapa kemajuan yang tergambar pada :

1. PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp75,86 triliun terealisasi sebesar Rp16,34 triliun.
2. Rencana investasi PMA dalam bentuk Rupiah ditargetkan sebesar Rp3,86 triliun dengan realisasi Rp4,44 triliun.
3. Rencana investasi PMA ditargetkan sebesar US \$ 2.753.167.000,00 dengan realisasi sebesar US \$ 4.904.933.000,00

4.1.10. SOSIAL

Berdasarkan data BPS pada tahun 2011 angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 7,9%, jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,34% dari jumlah penduduk sekitar 3.092.265 jiwa, begitu juga dengan jumlah angka pengangguran pada agustus tahun 2010 sebesar 4,45%, dengan berbagai program kegiatan angka tersebut diakhir tahun 2011 dapat ditekan menjadi 3,85%.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, secara fungsional, kewenangan dan keuangan yang terbatas. Untuk itu perlu adanya sinergisitas program dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Untuk mendanai program lingkup sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui dana APBD Provinsi Jambi TA 2011.

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung oleh kegiatan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN), peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jambi, Pemberdayaan Karang Taruna. Adapun hasil dari program ini adalah tersedianya data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terpeliharanya TM dan MP, terlaksananya peringatan HKSAN di Provinsi Jambi serta, terlaksananya peningkatan kapasitas BKKKS Provinsi Jambi.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Untuk mencapai sasaran program ini didukung Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pendampingan), pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi Bina Purna. Dengan terlaksananya program ini dapat memberdayakan keluarga fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan 1.450 KK serta memberdayakan KAT sebanyak 98 KK.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, melakukan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana dan orang terlantar. Melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar sejumlah 87 orang anak terlantar.

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan Pembinaan, Pengiriman, dan Pemulangan Penyandang dengan melakukan pembinaan kepada 38 orang penyandang cacat dan trauma.

5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan melakukan pembinaan kepada 70 orang Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Jambi.

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi 38 orang Eks Penyandang Penyakit Sosial, Penyuluhan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Eks Korban Napza. Pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha bagi eks penyandang penyakit sosial dengan tujuan para penyandang masalah sosial dapat berperan ditengah masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

4.1.12. Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan pada tahun 2011 melaksanakan tiga program yang meliputi Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program peningkatan kesempatan Kerja dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program Program/kegiatan tersebut jumlah angka pengangguran dapat ditekan menjadi 58,8 ribu orang, menurun dari tahun lalu sebesar 60.055 orang.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Subsidi Program) dengan Lembaga Pelatihan Swasta, Pemetaan Lulusan BLK, Peningkatan Profesionalisme TK dan Instruktur, Sosialisasi Kios 3 in 1.

Capaian dari program tersebut telah menghasilkan tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja sehingga pencari kerja yang terampil dengan didukung oleh peralatan yang lengkap, menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna, terlaksananya pelatihan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dengan harapan menciptakan tenaga kerja terampil, terciptanya sosialisasi dan promosi program melalui klinik produktivitas, bertambahnya pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Total Faktor Produksi untuk menambah pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM agar tenaga kerja lebih berproduktivitas dengan cara UKM, bertambahnya pengetahuan para tenaga kerja dalam bidang manajemen usaha dan para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKA, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran, Koordinasi Pengiriman TK ke Provinsi Jatim, Penyusunan Program, RTKD dan Analisa Keberhasilan Program, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan, Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja, Pembentukan Kelompok Wira Usaha baru Sektor Informal dan Pendayagunaan TKPMP, Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik.

Melalui program ini telah terkelolanya data ketenagakerjaan yang memudahkan para pencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilannya, terlaksananya Pengembangan Kesempatan Kerja baik di Dalam maupun di Luar Negeri, tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah, terlaksananya monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dengan tersusunnya profil ketenagakerjaan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring UMP serta THR, Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP, Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit, Pelaksanaan Program PBTAs sesuai Pergub No.21 Tahun 2008. Hasil yang dicapai dari program ini antara lain terlaksananya sosialisasi dan monitoring UMP serta THR dan semakin meningkatnya mekanisme kerjasama lembaga tripartit.

4.1.13. Koperasi dan UMKM

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM, 2) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD, 3) Pelatihan Manajemen Usaha kecil, 4) Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Terpadu Mandiri (KTM), 5) Pelatihan Akutansi Bagi KUKM, 6) Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Koperasi/KUD.

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu :1) Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM bagi 50 orang pelaku usaha kecil, 2) Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD bagi 100 orang pengurus koperasi, 3) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha kecil bagi 50 orang, 4) Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebanyak 36 orang, 5) Pelatihan Akutansi Bagi KUKM bagi 50 orang, 6) Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Koperasi/KUD bagi 50 orang.

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi secara dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut digambarkan dari peningkatan jumlah koperasi dari 3.275 unit di tahun 2010 menjadi 3.306 pada tahun 2011 atau naik sebesar 0,94%, sedangkan

Target RPJMD tahun 2012 sebanyak 3.260 unit koperasi. Sedangkan untuk Koperasi yang dapat melaksanakan RAT juga mengalami peningkatan sebesar 8,98% dari 902 pada tahun 2010 Koperasi menjadi 983 pada tahun 2011, jumlah tersebut sekaligus telah melampaui target dalam RPJMD Provinsi, dimana pada tahun 2012 ditetapkan sebanyak 873 koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.39 Perkembangan Koperasi tahun 2010 dan 2011

No	Uraian	Satuan	2010	2011	(%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.275	3.306	0,94
2	Koperasi Aktif	Unit	2.368	2.401	1,39
3	Koperasi Tidak Aktif	Unit	907	905	-0,22
4	Jumlah Anggota	Orang	353.028	353.758	0,2
5	Koperasi yg melaksan akan RAT	Unit	902	983	8,98
6	Jumlah Manajer	Orang	510	510	0
7	Modal Sendiri	Rp	258.703.358	262.918.598	1,62
8	Modal Luar	Rp	256.608.385	233.417.442	-9,03
9	Volume Usaha	Rp	1.167.622.089	1.172.517.960	0,41
10	Sisa Hasil Usaha	Rp	48.638.159	62.688.546	28,88

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.

Tujuan program ini adalah untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar. **1)** Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, **2)** Perkuatan perkembangan permodalan dana bergulir bagi kelompok usaha produktif, **3)** Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Kop. Penerima dana bergulir, **4)** Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi PMK, **5)** Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender penerima dana bergulir, **5)** Peningkatan Pengembangan BDSP-KKMB dalam Megakses Permodalan KUKM dengan Perbankan, **6)** Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, **7)** Pembangunan UMKM Sektor Usaha Kerajinan/ Tenun Bordir, **8)** Pemberdayaan UMKM Melalui One Village One Product (OVOP)

Adapun out dari kegiatan-kegiatan diatas yaitu: **1)** Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dari berbagai kegiatan di 9 kabupaten 2 kota, **2)** Terlaksananya Perkuatan perkembangan permodalan dana bergulir bagi kelompok usaha produktif, bagi 30 orang **3)** Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Kop. Penerima dana bergulir 11 Kab/kota, **4)** Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi PMK sebanyak 2 angkatan, **5)** Terlaksananya Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender penerima dana bergulir bagi 30 orang **5)** Terlaksananya Peningkatan Pengembangan BDSP-KKMB dalam Megakses Permodalan KUKM dengan Perbankan bagi 30 orang, **6)** Terselenggaranya Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional bagi 24 orang peserta promosi, **7)** Terlaksananya Pembangunan UMKM Sektor Usaha Kerajinan/ Tenun Bordir bagi 60 orang peserta, **8)** Terlaksananya Pemberdayaan UMKM Melalui One Village One Product (OVOP) di 11 Kabupaten/Kota.

Capaian dari program ini yaitu tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif dan meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya serta mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Untuk penumbuhan UMKM baru mengalami peningkatan dari 66.358 unit pada tahun 2010, meningkat menjadi 66.858 unit, atau mengalami peningkatan 0,75%. Rincian lebih detil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.40 Perkembangan UMKM tahun 2010 dan 2012

No	Perkembangan UMKM	Sat	2010	2011	%
1	Jumlah PK Perdagangan	Unit	31.209	31.439	0,73
2	Jumlah PK Industri Pertanian	Unit	14.320	14.414	0,65
3	Jumlah PK Industri Non Pertanian	Unit	8.854	8.953	1,11
4	Jumlah PK Aneka Usaha		11.975	12.052	0,64
5	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Unit	73.169	74.269	1,5
6	Penumbuhan Unit UMKM Baru	Unit	66.358	66.858	0,75
7.	Pelaksanaan Diklat Teknis Koperasi dan UMKM	Org	500	450	-

Selain itu keberhasilan program ini juga bisa dilihat dari peningkatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Dimana pada tahun 2011 bantuan perkuatan dana bergulir tercatat lebih dari Rp 28 milyar.

Tabel 4.41 Realisasi Perkuatan Permodalan

No	Uraian	2010	2011	%
1	TPKU	1.000.000	4.650.000	3,65
2	Bantuan Perkuatan Dana Bergulir	-	28.848.530	-
3	Pasar Tradisional	1.000.000	2.650.000	1,65
4	Penataan PKL	350.000	350.000	-
5	Bansos Wanita / Pemuda	2.450.000	2.450.000	-
6	Tele Center	60.000	60.000	-
7	Bantuan Sarana Pemasaran	-	86.080	-
8	Bantuan Penataan Toko & Ritel Moderen	-	260.000	-
9	Bantuan Kantin Sekolah	-	100.000	-

3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin

lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu: 1) Pengembangan jaringan kemitraan Usaha Koperasi, 2) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi, 3) Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi

Adapun output dari beberapa kegiatan ini yaitu 1) Terlaksananya Pengembangan jaringan kemitraan Usaha Koperasi di 11 kab/kota, 2) Terselenggaranya Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi bagi 60 orang peserta 3) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi di 11 Kabupaten/Kota. Capaian dari program ini terbangunnya jaringan kemitraan usaha koperasi, terwujudnya kader koperasi yang handal, yang dapat memberikan pengalamannya dalam mengelola koperasi. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu

Tabel 4.42 Perkembangan Kelembagaan Koperasi

Perkembangan KSP/USP Koperasi	Sat	Capaian	
		2010	2011
Jumlah KSP	Unit	56	56
Jumlah USP Koperasi	Unit	1.151	1.151
Penilaian Kesehatan KSP/SUP-Kop	Unit	201	190
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1000	550
Perkuatan Permodalan Dana Bergulir Bagi KSP/USP-Kop	Rp	45.163.500.000	50.508.500.000
Bansos Kop. Perkotaan Dan Pedesaan	Rp	-	650.000.000.000

Adapun indikator keberhasilan lainnya yaitu dengan terpilihnya beberapa Koperasi di Provinsi Jambi, yang mendapat prestasi di tingkat nasional, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.43 Perkembangan Prestasi Koperasi

No	Kelompok>Nama Koperasi	Prestasi	Kelompok Koperasi	Alamat
1.	KPN Koperasi Serba Usaha Perikanan	Terbaik ke 3 Tk. Nasional	Simpan Pinjam	Kantor Dinas Kelautan Perikanan Prov. Jambi, Tl. Pura
2.	KUD Sawit Kita	Terbaik ke 3 Tk. Nasional	Konsumen	Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjab. Barat
3.	KUD Budi Sari	Terbaik ke 6 Tk. Nasional	Jasa	Kec. Mero sebo Ilir Kab. Batang Hari

4.1.14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

1) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan Program ini adalah meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, penanaman nilai kegotongroyongan, pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Melalui program ini dilakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan dalam pengelolaan pemerintahannya. Pada tahun 2011 ini berdasarkan hasil penilaian lomba desa, Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin masuk ke dalam 10 besar desa terbaik seluruh Indonesia, yang selama ini belum pernah diraih oleh Provinsi Jambi. Dalam pemanfaatan dan penerapan TTG, dalam gelar TTG Tingkat Nasional, beberapa produk yang berasal dari Provinsi Jambi juga memperoleh apresiasi yang baik dengan terjualnya beberapa alat-alat hasil penerapan TTG seperti alat deteksi gempa dan alat press kelapa sawit.

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Perdesaan

Melalui program ini sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah memberikan dampak pada penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun di wilayah perdesaan. Saat ini untuk mendukung perencanaan pembangunan, telah tersusun RPJMDesa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengintegrasikan perencanaan di tingkat desa sebanyak 912 desa yang telah menyusun RPJMDesa. Selain itu, masyarakat juga telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan sebesar 2,56% dari jumlah keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Melalui program ini dibina kelompok-kelompok perempuan peduli lingkungan, yang turut aktif dalam pelestarian lingkungan termasuk dalam memprakarsai gerakan tanam danelihara pohon. Selain itu, juga dilakukan pembinaan melalui pendekatan sosial budaya kepada masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan tugas perempuan langsung di masyarakat melalui pendekatan sosial budaya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

1) Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak

Sampai dengan saat ini melalui program ini P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, telah menangani sebanyak 33 kasus selain pendampingan apabila berkaitan dengan hukum. Melalui kegiatan ini P2TP2A juga berhasil mengembalikan seorang anak yang diterlantarkan kepada keluarganya dari Provinsi Kepulauan Riau.

2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Dalam upaya mendukung penyusunan anggaran yang responsif gender, telah dilatih 20 orang *focal point* dari setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, selain 25 orang *focal point* yang ada di SKPD-SKPD Provinsi Jambi. Kelompok kerja PUG Provinsi Jambi juga telah terbentuk, sehingga koordinasi penyusunan anggaran responsif gender dapat dilakukan dengan baik. Dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak juga telah terbentuk Forum Anak Daerah Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak dalam peri kehidupannya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang,

hak untuk berekspresi dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Melalui Forum Anak Nasional telah dikukuhkan 5 orang duta anak Indonesia yang salah satunya berasal dari Provinsi Jambi.

3) Peningkatan Partisipasi Perempuan di Daerah Perdesaan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif perempuan yang dilakukan secara terpadu oleh SKPD-SKPD terkait. Melalui Forum Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah ditentukan rencana pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan pada masing-masing kabupaten, dengan demikian sejak awal kegiatan pengembangan ekonomi perempuan dapat diintegrasikan.

4.1.15. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam melaksanakan tupoksinya melalui program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan Nilai-nilai budaya, seni dan film yang dapat memberikan makna pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu juga guna meningkatkan apresiasi masyarakat terutama kalangan pendidikan terhadap nilai sejarah dan budaya daerah Jambi. Dengan dukungan dana sebesar Rp2.335.192.425,00 program ini dilaksanakan pada Tahun 2011 dengan kegiatan-kegiatan yaitu: (a) Meningkatkan Fungsi Museum Negeri Jambi, (b) Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi, (c) Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, (d) Pendataan Lanjutan Situs Percandian Muara Jambi Untuk Dipersiapkan Sebagai Warisan Dunia Tahap III, (e) Pendataan Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Merangin, (f) Seminar Sejarah Perjuangan Jambi, dan (g) Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Realisasi program ini mendorong terlaksananya Pendataan Kepurbakalaan Situs Merangin bersama dengan Tim Geologi Pusat menuju pengembangan menjadi Global GeoPark Network, Pendataan Lanjutan Tahap III Situs Percandian Muara Jambi menuju pengakuan World Heritage oleh UNESCO, Pameran koleksi Museum Negeri Jambi dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi dalam kegiatan Jambi Emas Expo 2011 dan Festival Candi Muara Jambi, Pekan Perjuangan Rakyat Jambi, Pameran Alat Musik Nusantara di Museum Negeri Jambi yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia, Pekan Pesona Budaya Jambi Expo 2011, dan pembuatan CD Interaktif Pariwisata Jambi.

Adapun data pengunjung Museum Negeri Jambi pada Tahun 2010 sebanyak 33.029 orang dan sebanyak 35.065 orang pada Tahun 2011. Untuk Museum Perjuangan Rakyat Jambi jumlah pengunjung sebanyak 18.251 orang pada Tahun 2010 dan sebanyak 16.004 orang pada Tahun 2011.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, Belum terjabarnya secara jelas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama menyangkut klausul yang mengatakan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dapat diserahkan ke Provinsi, namun kenyataannya apapun kondisi kabupaten dan kota mereka belum mau

menyatakan ketidakmampuannya. Selain itu masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata juga menjadi problem yang harus dicari solusinya secara kreatif.

Adapun upaya terhadap permasalahan tersebut antara lain yaitu; memberi peluang kepada investor untuk ikut melaksanakan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, mengikutsertakan Kabupaten/Kota dalam berbagai event dalam dan luar negeri, mengkoordinasikan dan mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar, serta melaksanakan program dengan mengikutsertakan Dinas/ Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata.

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dalam menyerap nilai budaya yang positif guna memperkaya khazanah budaya bangsa yang berlandaskan moral spiritual, norma dan etika. Program ini didukung dana sebesar Rp865.556.500,00 yang dijabarkan melalui kegiatan: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Dengan program ini telah terlaksana Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah antara lain dengan melaksanakan Gita Bahana Nusantara di Jakarta, Pergelaran Kesenian daerah Jambi didalam daerah maupun diluar daerah, Pembuatan Film Dokumenter Upacara Basale Suku Anak Dalam, Serta Dewan Kesenian Jambi (DKJ).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, masih rendahnya minat masyarakat khususnya pemuda terhadap keragaman budaya, di sisi lain budaya luar semakin tak terbendung bersaing dengan budaya lokal.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut meningkatkan kualitas dan kreatifitas para Budayawan Jambi serta memperbanyak kegiatan apresiasi seni dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan minat masyarakat terhadap budaya Jambi.

4.1.16. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga telah disusun 6 program pokok yaitu 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 3) Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain; 4) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, menghormati supremasi hukum dan ikut menegakan demokrasi. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp1.115.951.500,00.

Dengan alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Seleksi, Pelatihan dan Rekreasi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Nasional terhadap anggota PASKIBRAKA sebanyak 58 Orang (56 orang untuk tingkat Provinsi

dan 2 Peserta untuk tingkat Nasional) jumlah anggaran untuk kegiatan ini Rp613.972.500,00. Serta kegiatan Bulan bakti pemuda. Dalam kegiatan bulan bakti pemuda ini terdapat beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemilihan pemuda pelopor, kegiatan napak tilas jejak pahlawan yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo, kegiatan pengembangan kreatifitas pemuda, kegiatan lokakarya pemuda. Jumlah anggaran untuk kegiatan bulan bakti pemuda ini sebesar Rp501.979.000,00

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan memberikan keterampilan kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan dan menunjang ekonomi pemuda agar dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain serta ikut bersaing dalam pasar kerja. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp603.402.500,00.

Melalui program ini telah dilaksanakan: kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 25 orang, dalam bentuk pelatihan dan magang untuk 1. Kursus Mengemudi (langsung diberi SIM), 2. Kursus Menjahit, 3. Kursus Komputer, 4. Kursus Elektronik. Untuk melaksanakan Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp100.522.500,00.

Kegiatan pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) pada tahun 2011 berjumlah 31 orang dan ditempatkan lintas Provinsi yaitu Provinsi Aceh 8 orang , Provinsi Sumatera Utara 8 orang , Provinsi Sumatera Barat 8 orang , dan Provinsi Riau 7 orang, pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp283.400.000,00.

Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) terselenggara pada tanggal 28 s/d 29 Maret 2011 sebanyak 61 Peserta dan terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi pada program PPAN Indonesia - Kanada (1 orang peserta putri), Indonesia – Australia (1 orang Putra), Indonesia – Malaysia (1 orang Putra), Indonesia – Jepang (1 orang Putra) peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti tes kesehatan dan setelah dinyatakan lulus tes kesehatan mereka diberikan pembekalan pendidikan dan pelatihan di DKI Jakarta selama 3 bulan dan selanjutnya akan dikirim ke Negara tujuan selama 3 bulan.

Kegiatan seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dilaksanakan pada tgl 25 s/d 28 April 2011 , diikuti sebanyak 44 orang peserta dari hasil seleksi tersebut terjaring sebanyak 24 orang peserta yang terdiri dari 12 orang putra dan 12 oramng putri, peserta yang dinyatakan lulus berhak mewakili Provinsi Jambi untuk ditempatkan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku Utara, sebelum peserta di tempatkan di provinsi tujuan mereka berhak mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur selama satu minggu. Setelah selesai mengikuti JPI di Kabupaten Malang para peserta langsung ditempatkan di Provinsi tujuan.

Seleksi Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dengan jumlah peserta 15 orang peserta dan terjaring sebanyak 2 orang peserta, dan yang dinyatakan lulus selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti tes kesehatan dan diberikan pembekalan, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (pembekalan) para peserta mengikuti kegiatan dengan rute perjalanan Jakarta–Pontianak–Batam–Dumai–Bangka Belitung dan kembali ke Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari perjalanan. serta terlaksananya

Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) sebanyak 10 Kelompok dengan bidang usaha perikanan, perkebunan, peternakan dan perbengkelan. Dan setiap masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp7.500.000,00.

3. Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain

Program ini bertujuan memberikan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet terutama atlet cabang olahraga prestasi, kegiatan ini mulai dari latihan sampai mengikuti even-even olahraga Nasional maupun regional. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp1.137.082.750,00

Pada tahun 2011 dilaksanakan kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional kegiatan ini telah ditentukan oleh Kemenpora dengan Cabang Olahraga Dagongan, Enggrang, Terompah panjang dan lomba marathon 10 K yang dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi. Disamping itu juga kegiatan pekan olahraga seni pesantren daerah (POSPEDA) bekerjasama dengan kementerian Agama Provinsi Jambi dengan cabang olahraga Senam, Atletik, Tenis Meja, Pencak Silat, Bulu Tangkis, sepak Takraw dan Catur. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), kegiatan ini adalah puncaknya olahraga pelajar dan untuk mengukur sejauh mana prestasi pelajar dalam bidang olahraga yang selama 2 tahun diberikan pembinaan oleh Dispora Provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 kegiatan POPNAS dilaksanakan di Provinsi Riau, dan kontingen dari Provinsi Jambi berhasil masuk dalam 10 besar dari 33 Provinsi dengan jumlah medali sebanyak 3 emas, 10 perak dan 11 perunggu.

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan menanamkan pengertian/pemahaman tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan manusia secara individu maupun secara masyarakat dengan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Untuk mencapai sasaran program ini didukung dana sebesar Rp1.377.131.500,00. Pada tahun 2011 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) menampung atlet pelajar sebanyak 20 orang dengan cabang olahraga Renang, Senam, Judo, Angkat Besi. Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (POPCANAS) yaitu olahraga Pelajar bagi penyandang Cacat dan diikuti 100 Atlet Penyandang Cacat Pelajar. Adapun cabang Olahraga yang diperlombakan yaitu Atletik, Renang, dan Tenis Meja.

5. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan menyediakan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas untuk menunjang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp2.855.814.100,00

6. Program Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk mensinergikan program Provinsi dengan Kabupaten Kota agar dalam penyusunan program pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan tetap berpedoman pada Visi dan Misi serta kebijakan Pemerintah Daerah Masing-masing kabupaten kota dengan prinsip program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dunia kepemudaan dan keolahragaan daerah Jambi. Pada tahun 2011 dialokasikan dana sebesar Rp377.464.060,00.

Secara umum masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap fungsi dan peranan pemuda dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah pemuda yang terlibat dalam proses pembangunan terutama di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan koordinasi dan sosialisasi agar Kabupaten dapat meningkatkan atau mempertajam program kerja yang benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di daerah Jambi.

Penghargaan dan prestasi yang diterima pada tahun 2011

1. Bidang kepemudaan

Peringkat Ke 2 SP-3 berprestasi Tingkat Nasional Atas Nama **Eniwati SP** yang merupakan SP-3 Angkatan XX yang ditempatkan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang hari dengan kegiatan anatara lain:

1. Mendirikan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
2. Membina petani dalam bidang Pertanian (tumpang Sari tanaman cabe) dan Perkebunan seperti : Karet, Sawit, dan tanaman hortikultura.
3. Membuat Rumah Singgah untuk pemberdayaan Suku Anak Dalam

2. Bidang keolahragaan

- a. Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) ke XI tahun 2011 di Pekanbaru Provinsi Riau, merupakan puncak Olahraga Pelajar Nasional yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali yaitu pada tahun ganjil, pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke XI tahun 2011 ini Provinsi Jambi menduduki rengking ke 8 dengan perolehan medali 8 emas, 10 Perak, 11 Perunggu. Pada POPNAS ke XI tahun 2011 ini Provinsi Jambi ada peningkatan dalam kedudukan rengking. Dan pada POPNAS X tahun 2009 di Provinsi Yogyakarta Provinsi Jambi mendapatkan rengking ke 13 Nasional. Berikut hasil perolehan medali :

Tabel 4.44 Daftar Perolehan Medali Kontingen Popnas XI Provinsi Jambi

Cabang Olahraga	Emas	Perak	Perunggu
Angkat Besi	1	2	0
Atletik	1	1	0
Dayung	0	2	5
Gulat	1	0	3
Judo	0	1	0
Panahan	0	2	1
Senam Artistik	0	1	1
Taekwondo	0	1	1
Medali	3	10	11
Tinju (eksibisi)	0	1	1

4.1.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk mewujudkan visi dan misi Kesbangpol Provinsi Jambi didukung dengan program prioritas terdiri dari :

1. Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perwujudan demokrasi yang dijabarkan dengan kegiatan antara lain: Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada serta pengembangan Partisipatif daerah, dengan penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi penyelenggaraan Pemilukada se Provinsi Jambi Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Kakan/Kaban Kesbangpol, Linmas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota, Unsur PNS Parpol, Organisasi Kepemudaan, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkup Provinsi serta pemantauan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai prosesi pelantikan Bupati. Sedangkan dalam Peningkatan dan pengembangan Kualitas proses politik bagi lembaga Parpol dalam rangka persiapan dan kesiapan bagi kader dan lembaga politik dengan mengadakan rapat verifikasi yang berkaitan dengan SPJ untuk bantuan parpol serta laporan atas kepengurusan Parpol kepada Pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini karena belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar pihak terkait tentang pemilukada untuk itu perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi melalui rakor evaluasi penyelenggaraan pemilukada.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Melalui program ini telah terlaksananya Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan/eksistensi ORPOL, ORMAS, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan. Untuk mengetahui perkembangan keberadaan eksistensi dan tersusunnya laporan data ORMAS setiap tahunnya, sehingga dapat ter-updatenya buku direktori PARPOL, ORMAS, OKP di Provinsi Jambi, serta terselenggaranya forum diskusi dan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik yang diikuti oleh unsur Kesbangpol, Linmas, Ketua KPU, Kabag Pemerintahan Setda Kab/kota, Unsur PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, PARPOL, OKP, ORMAS, BEM dan LSM.

Dalam hal ini dapat dilihat hasil terhadap perkembangan keberadaan organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan selama tahun 2011 pada tabel::

Tabel 4.45 Data Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Provinsi Jambi Tahun 2011.

NO	Organisasi	Jumlah	Ket
1	Ormas / LSM Kesamaan Fungsi	173	
2	Ormas / Asosiasi	39	
3	Ormas / Yayasan	24	
4	Ormas / Keagamaan	29	
5	Ormas / Profesi	18	
6	Ormas / Kepemudaan	28	
7	Ormas / Peguyuban (Kesukuan)	19	
8	Ormas / Kegiatan	44	
J u m l a h		374	

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Jambi

Tabel 4.46 Kondisi Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Provinsi Jambi.

NO	Organisasi	Jumlah
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	
	Habis masa berlaku SKT (Proses Perpanjang)	168
	Masih Aktif	33
	Jumlah 1	201
2	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	
	Habis masa berlaku SKT (Proses Perpanjang)	140
	Masih Aktif	33
	Jumlah 2	173
	Jumlah 1 + 2	374

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Jambi

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, terhadap generasi muda di lingkungan pendidikan SLTA, untuk memahami kesadaran berbudaya dalam rangka peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, sedangkan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan terlatihnya tenaga pembaharuan kebangsaan dan terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.

4. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan dilaksakan Program ini dalam rangka memfasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan idiologi di lingkungan generasi muda (santri/ santriwati) kabupaten/kota, sehingga dapat peningkatan penamtapan wawasan kebangsaan bela negara melaui PKBN di daerah.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan.

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah dengan kegiatan pembinaan dan pemantapan eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), agar terjadi hubungan harmonis antar unsur intelijen daerah, aparatur pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terdeteksi dini, tangkal dini, cegah dini danantisipasi dini sehingga dapat menciptakan situasi keamanan, ketertiban yang kondusif. Serta terlaksananya pemantauan dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjab Timur, Sarolangun, Bungo dan Kota Sungai Penuh.

6. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

Dalam pelaksanaan Program ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM Asing Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing, untuk itu telah dilaksanakan Rakor dan Konsultasi dan koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pemantauan kegiatan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), NGO Asing, Peneliti kunjungan maupun lalulintas orang asing sehingga terdata dengan baik terutama di Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur Bungo, Kerinci Batanghari dan Merangin.

Pembinaan aparaturnya dan penanganan konflik dalam upaya peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara untuk itu telah dilaksanakannya koordinasi antar Kesbangpol, Linmas Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama dalam menjaga kebersamaan kehidupan dalam masyarakat dalam melaksanakan pemantauan konflik dan situasi di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tebo Tanjab Barat dan Bungo.

Sedangkan dalam Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan harapan terbinanya dan terkembanagnya FKUB yang berkelanjutan, untuk itu telah dilaksanakan Rapat internal wanhat dan pengurus FKUB, Rakorda FKUB se Provinsi dan dialog interaktif permasalahan FKUB dan pemecahannya.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program ini dalam rangka Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri No. 12 Tahun 2006) sehingga dapat deteksi dini, tangkal dini, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bentrok, agar tercipta rasa aman dan tentram dilingkungan masyarakat. Memberikan sosialisasi terhadap pengurus FKDM Kab/Kota dalam rangka mengantisipasi ,menjaga , keamanan , ketertiban masyarakat sebagai jejaring komunikasi terhadap pemerintah dalam mendeteksi timbulnya keamanan,

Hambatan dalam pelaksanaan Program ini kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensukseskan FKDM tersebut, untuk itu diharapkan pemerintah setempat dapat mengalokasikan dan pendukung kegiatan sehingga dapat membentuk kepengurusan FKDM di setiap kecamatan.

4.1.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

4.1.18.1 Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp553.251.730.683,35 dengan tingkat realisasi sebesar 93,67% atau setara dengan Rp518.204.062.123,83. Dari total dana tersebut, tersebar pada 9 (sembilan) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dengan uraian sebagai berikut:

A. Biro Umum

Pada tahun 2011, Biro Umum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp56.140.369.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp46.365.707.003,00 atau setara dengan 82,59% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari 15 kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp20.372.663.925,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp17.152.106.040,00 atau terealisasi sebesar 84,19%. Adapun output yang dihasilkan adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi penyediaan surat, listrik, logistik, perlengkapan dan peralatan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp32.758.670.575,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp27.446.984.856,00 atau 83,79%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya kendaraan dinas, perlengkapan rumah dinas jabatan, perlengkapan gedung kantor dan terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas serta rumah dinas.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan dana sebesar Rp505.700.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp493.805.000,00 atau 97,65%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bersikap disiplin dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sebagai upaya solusi pemecahan masalah tersebut, adalah dengan mengintensifkan Pengawasan Melekat dan melaksanakan peraturan tentang disiplin PNS secara proporsional.

4. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan untuk Kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga memperlancar pelaksanaan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp2.503.335.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.272.811.107,00 atau 50,85%. Adapun output dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya kegiatan kedinasan dan pemerintahan yang baik dan lancar.

B. Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA

Pada tahun 2011, alokasi anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar Rp3.286.746.800,00 diarahkan untuk melaksanakan 6 (enam) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

Pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp1.140.756.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp937.454.262,00 atau 82,18%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Terhimpunnya data pelaporan realisasi APBD Provinsi Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
- c. Terlaksananya fasilitasi administrasi pada Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- d. Terpantaunya perkembangan fisik pembangunan APBD Provinsi Jambi di lapangan.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumberdana yang tersedia.
- b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- c. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing-masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia, dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
- c. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- d. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp148.600.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp148.320.000,00 atau 99,81%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Pendapatan dan Keuangan.
- b. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal.
- c. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang BUMD/ BUMN dan Kerjasama Secara umum,

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih sulitnya memperoleh data tentang perkembangan BUMD/ BUMN di Provinsi Jambi.
- b. Penyampaian laporan penanaman modal yang tidak tepat waktu oleh instansi terkait.
- c. Tidak tersedianya beberapa data penanaman modal di kab/kota atau instansi terkait.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pihak pemerintah dengan BUMD/BUMN.
- b. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi terhadap instansi terkait agar menyampaikan laporan penanaman modal tepat waktu.
- c. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi kepada kab/ kota atau instansi terkait agar aktif dalam pengumpulan data penanaman modal.

3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi dibidang Koperindag

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitas pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini Rp145.619.200,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp145.043.500,00 atau 99,60%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data harga kebutuhan bahan pokok masyarakat
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang koperindag

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak terjadi fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran.
- b. Masih banyak ditemukan produk yang sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi beredar di pasaran.
- c. Masih kurangnya dukungan infrastruktur jalan menuju sentra produksi industri (pertanian, kerajinan, UMKM dan lainnya) baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin dengan instansi terkait untuk menangani fluktuasi harga bahan pokok.
- b. Membuat himbauan kepada instansi terkait untuk melakukan usaha-usaha penstabilan harga bahan kebutuhan pokok dipasar (operasi pasar dan pasar murah).
- c. Membuat himbauan kepada instansi agar menangani masalah produk yang tidak layak konsumsi di pasar.
- d. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka untuk memperlancar transportasi ke sentra produksi industri (pertanian, kerajinan UMKM dan lainnya) agar dapat meningkatkan infrastruktur jalan ke lokasi tersebut.

4. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp325.071.600,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp325.054.700,00 atau 99,99%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang dan SDA.
- c. Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertaraf nasional (antara lain Pekan Raya Jakarta)

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya Koordinasi, dan Sinergitas antar Lintas Sektoral dan Dinas/Instansi terkait.
- b. Masih lemahnya upaya dalam mensinkronisasikan Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan baik kualitas dan kuantitas infrastruktur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan intensitas Rapat Koordinasi dengan dan antar Dinas/Instansi dan dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengembangan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.
- b. Membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Pembangunan Bidang Kebudayaan Pariwisata dan Promosi Industri Kepariwisata.
- c. Memberi masukan kepada instansi terkait agar dapat meningkatkan infrastruktur bidang kebudayaan dan pariwisata.

5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp410.200.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp407.514.000,00 atau 99,35%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalannya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan dan Terjalannya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum
- c. Terjalannya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, belum optimal disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitas Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi.
- d. Masih terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembangunan ekonomi yang dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota.
- b. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.
- c. Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.

- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan guna terciptanya kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp1.116.500.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp1.075.392.700,00 atau setara dengan 96,32%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan pada Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 2011 dalam rangka mewujudkan petani mampu, maju dan mandiri serta mempunyai profesionalisme melalui karya dan keterampilan.
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- c. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sektor pertanian, ketahanan pangan dan penyuluhan
- d. Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi
- e. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Masih kurang lengkapnya data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah
- b. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Kab/Kota baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Kurang dipahaminya aturan kehutanan oleh aparat yang berkedudukan disekitar kawasan hutan, sehingga ada aparat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah di kawasan hutan tersebut
- d. Masih banyak oknum-oknum yang menyelewengkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/Kota melalui pelaksanaan rapat koordinasi guna melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah
- b. Agar Pemerintah Kab/Kota mengusulkan tenaga Penyuluh pada penerimaan pegawai agar dapat dimasukan formasi tenaga penyuluh pada penerimaan pegawai yang akan datang.
- c. Pemerintah Kab/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait agar dapat mengawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada pengecer yang ada di daerah.

- d. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian konflik kawasan hutan dengan pemilik izin Hutan dan sosialisasi mengenai peraturan dibidang kehutanan.

C. Biro Hukum

Pada tahun 2011, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.180.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.157.901.400, atau 98,95% untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Hukum

Program ini secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai forum publik, dalam rangka penyusunan ranperda, diskusi dan konsultasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp245.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp233.793.000,00 atau 95,35%. Adapun output dari program ini adalah tersusunnya naskah Rancangan Peraturan Daerah.

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini diantaranya: belum seluruh SKPD mengetahui prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada masa yang akan datang, perlu dilaksanakan sosialisasi tentang Permendagri tersebut.

2. Program Perencanaan Hukum

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.771.000, realisasi sebesar Rp597.926.050,00 atau 99,03%. Dari pelaksanaan program ini hasil yang diperoleh:

- a. Tersusunnya Peraturan/Keputusan/Instruksi Gubernur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terinventarisir dan terevaluasinya peraturan daerah kab/kota, peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terciptanya koordinasi lintas instansi terkait dalam penyusunan penyempurnaan produk hokum dan korelasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Draf Pergub/Kep.Gub/Intruksi Gubernur yang diajukan instansi terkait kurang mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Belum seluruhnya SKPD menyampaikan perda-perda yang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dievaluasi.
- c. Belum seluruhnya SKPD menyampaikan format tentang bentuk dan tata cara pengisian PROLEGDA yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 169 Tahun 2004 ke Biro Hukum sebagaimana telah dicabut dengan Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2011 kepada SKPD untuk memperhatikan dalam menyampaikan Draft Pergub/Kep. Gub/Instruksi Gubernur harus mempedomani ketentuan.
- b. Meningkatkan koordinasi baik dengan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Pemerintah Kab/Kota untuk menyampaikan Perda-perda atau peraturan lainnya yang akan dievaluasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- c. Secara berkala perlu melaksanakan sosialisasi terhadap Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode pengembangan terhadap kesadaran Hukum dan HAM, produk-produk hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp1.116.836.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.112.977.350,00 atau 99,65%.

Output dari program ini adalah terselenggaranya lokakarya HAM dan tersosialisasinya produk-produk hukum kepada para stakeholders serta terhimpunnya produk hukum daerah, terselenggaranya Bimbingan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan penyelesaian permasalahan dan keluhan hukum, tersedianya data dan informasi Peraturan Perundang-undangan dan terlaksananya urusan tata usaha dan program kerja biro.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Produk-produk yang telah ditetapkan belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat dan aparat.
- b. Masih rendahnya kesadaran hukum dan HAM para aparat dan masyarakat dan adanya kecenderungan masyarakat tidak tahu dan mengerti akan hukum serta sanksi-sanksi yang berlaku ditengah masyarakat.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum antara pusat dan anggota jaringan serta masyarakat.

4. Program Pengkajian Kasus HAM

Program ini bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.095.000,00 yang terealisasi sebesar Rp89.550.000 atau 99,40%.

Adapun output dari program ini adalah terinventarisasi dan telah terlaksananya pengkajian terhadap kasus pelanggaran HAM. Secara umum, permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah masih banyaknya masyarakat dan aparat pemerintah yang tidak mengetahui dasar hukum terhadap persoalan atau kasus yang bersentuhan dengan HAM.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang HAM melalui sosialisasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan HAM.

5. Program Pendataan dan Pembinaan PPNS

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pendataan dan penyegaran bidang tugas PPNS. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp123.655.000,00 atau 98,92%. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung program ini, diperoleh output terlaksananya pendataan dan penyegaran tugas PPNS. Secara umum, permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah para PPNS daerah banyak yang belum mengetahui bidang tugasnya selaku pengaman kebijakan dan penegakan perda serta trantib. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan serta kompetensi para PPNS Daerah

D. Biro Humas

Pada tahun 2011, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.643.060.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp13.229.141.225,00 atau 96,97% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembinaan media lokal, sehingga output dari program ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan alokasi anggaran Rp1.347.839.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.323.773.100,00 atau 98,21%, adapun kegiatan utamanya adalah penyediaan bahan bacaan bagi pejabat eselon II dan III seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jambi dengan jumlah total sebanyak 47 media cetak dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan.

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Secara umum tujuan dari program ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Instansi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dari tugas keprotokolan. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.277.754.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp1.277.027.579,00 atau setara dengan 99,94%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.

3. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pembangunan di Provinsi Jambi, melalui penyediaan sarana publikasi dan informasi masyarakat, untuk itu dialokasikan dengan sebesar Rp10.536.764.000,00 dengan tingkat realisasi Rp10.227.783.776,00

atau setara dengan 97,07%. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, output yang dihasilkan berupa majalah, tabloid dan lain-lain serta sosialisasi penggunaan internet sebagai media publikasi pembangunan.

4. Program pengembangan pemetaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi serta penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita sandi dan berita biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.703.000,00 dengan tingkat realisasi Rp400.556.800,00 atau setara dengan 83,33%. Adapun kegiatannya berupa peningkatan sarana dan prasarana komunikasi. untuk tahun 2011 penerimaan berita mencapai 2.165 surat (4.075 lembar) dan pengiriman berita sebanyak 2.794 Surat (6.096 lembar).

E. Biro Pemerintahan

Pada tahun 2011, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi mendapat lokasi anggaran sebesar Rp5.852.834.500,00 dalam pelaksanaan telah terealisasi Rp2.338.079.506,00 atau 39.95% untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake)

Salah satu kegiatan dalam Program SAMISAKE adalah Sertifikasi tanah gratis bagi rumah yang dibedah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat kurang mampu, serta mendukung upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Diperoleh output terbitnya sertifikat tanah gratis bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Jambi.

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp3.176.000.000,00 yang diperuntukan bagi pensertifikatan tanah sebanyak 3.176 persil. Realisasi pelaksanaan sertifikat gratis adalah sebanyak 191 persil atau 6%, masih dalam proses di BPN 369 persil atau 11,6%.

Relatif rendahnya pelaksanaan sertifikasi ini antara lain disebabkan ada sebagian sudah mempunyai sertifikat, masalah kepemilikan. Permasalahan lain terkait dengan sertipikat gratis ini adalah tidak adanya pos biaya operasional langsung pengukuran ke lapangan.

2. Program Pengembangan Batas Wilayah

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tata batas antar Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Untuk program ini dianggarkan dana sebesar Rp784.177.500 dengan serapan senilai Rp679.472.756 atau 86,65%.

Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output antara lain :

- a. Terwujudnya tertib administrasi di bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah NKRI khususnya di kab/kota se-Provinsi Jambi.
- b. Terlaksananya sosialisasi, konsultasi, koordinasi dan verifikasi batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga.
- c. Tercapainya kesepakatan kerjasama di wilayah perbatasan.

Permasalahan yang ditemui pada program ini adalah :

1. Belum lengkapnya data - data unsur Rupabumi Wilayah Administrasi pada kabupaten/kota, antara lain : nama ibu kota, jumlah penduduk, titik koordinat, sejarah nama dan kode wilayah. Untuk mengatasi hal ini Gubernur telah menyurati para Bupati/Walikota agar membentuk panitia Pembakuan Nama-nama rupa bumi melalui surat Nomor 125.1/3682/Pem tanggal 10 November 2011.
2. Belum adanya kesepakatan antara masyarakat Kecamatan Jujuhan dengan Kecamatan Sungai Rumbai (batas provinsi Jambi – Provinsi Sumbar). Namun beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diadakan pertemuan antara masyarakat Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Dharmasraya di Bukit Tinggi dan 2). Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh Ditjen Pemerintahan Umum, dengan kesepakatan bahwa pada tahun 2012 masing-masing provinsi mengalokasikan dana untuk pengukuran dan memasang pilar melalui APBN 2012.
3. Batas Provinsi Jambi - Provinsi Kepri
Sesuai dengan Permendagri No. 44 Tahun 2011 yang menetapkan kepemilikan Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Jambi, namun hal ini masih dipermasalahkan oleh Provinsi Kepri, untuk itu telah dilaksanakan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menanamkan semangat kebangsaan, keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.310.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.170.503.450,00 atau 89.31%.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Terciptanya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur serta terciptanya stabilitas daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatnya pemahaman aparat penyelenggara administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Meningkatnya optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan SIAK di Kab/kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan.
- d. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di provinsi Jambi.

Secara umum masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Dalam kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, banyak SKPD yang tidak memberikan data secara lengkap terutama dalam hal pengisian IKK (Indikator Kinerja Kunci).
2. Untuk menindak lanjuti masalah tersebut maka diperlukan bimbingan teknis bagi SKPD dalam pengisian IKK dan perlu diadakan sosialisasi

tentang prioritas penyusunan LPPD bagi seluruh SKPD. Oleh karena itu kegiatan bintek dan sosialisasi pengisian IKK dalam penyusunan LPPD perlu dianggarkan pada tahun anggaran 2012.

3. Pada Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), beberapa kabupaten/kota yang masih terlambat menyampaikan laporan data peristiwa penting catatan sipil, untuk segera menindaklanjutinya dengan memberikan himbauan melalui Surat Gubernur No. 470/3255/Pem tanggal 13 Oktober 2011 kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk mewujudkan provinsi, kabupaten/kota yang mandiri melalui kerja sama antar unsur Forkopimda, pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2011, untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp519.833.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp299.996.300,00 atau sebesar 57,71%. Relatif rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda untuk pelaksanaan semester II tidak dapat dilaksanakan menggunakan dana APBD, oleh karena itu untuk kegiatan Rakor Forkopimda selanjutnya menggunakan dana dekonsentrasi (APBN). Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output yaitu terkoordinasi dan terkendalanya program/kegiatan lintas sektor serta kegiatan pusat dan daerah.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2011 program ini mendapat dana sebesar Rp62.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.107.000,00 atau 72,50%, yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Output yang didapat dari kegiatan ini adalah terkoordinasikannya sistem kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota se-provinsi Jambi, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah dinas/badan/kantor pengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil.

F. Biro Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahun 2011, Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.078.315.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp4.896.233.888,00 atau setara dengan 96,41% yang diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

Tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama adalah terpelihara dan termanfaatnya rumah ibadah serta kenyamanan para jamaah dalam beribadah, terciptanya hubungan silaturahmi antar umat

beragama dan antar umat seagama, terwujud dan terciptanya SDM yang islami dan berprestasi.

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama, maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan STQ Nasional Tahun 2011

Dengan alokasi dana Rp1.683.299.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.573.787.950,00 (93.49%). Tujuan dari pelaksanaan MTQ baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional adalah untuk menumbuhkembangkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an bagi masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah dengan terpilihnya Juara MTQ Provinsi Jambi sebanyak 160 Orang, dan peserta STQ sebanyak 16 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah terselenggaranya MTQ Provinsi Jambi dan Pengiriman Peserta STQ Nasional.

2. Kegiatan Pembinaan pondok pesantren mandiri dan pendidikan luar sekolah.

Dengan alokasi dana Rp307.315.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp304.546.000,00 (99.10%).

Output kegiatan ini adalah:

- Pembinaan, pemantauan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan di PKP Al Hidayah
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan ekonomi produktif di Ponpes Mandiri /Pembinaan Ponpes Mandiri sebanyak 10 pesantren
- Pembinaan tahsinul quro' di Provinsi Jambi.

Outcome kegiatan :

Tumbuhnya pondok pesantren mandiri di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

3. Kegiatan Pembinaan, Pelatihan, Penyuluhan Keagamaan, Pelayanan Haji dan Pengelolaan Masjid Agung Al Falah Jambi.

Dengan anggaran sebesar Rp1.937.024.000,00 dengan realisasi keuangan Rp1.879.920.500,00 (97.05%).

Output kegiatan :

- Koordinasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2011
- Pelaksanaan pengajian rutin bagi aparatur pemerintah sebanyak 88 kali
- Pelaksanaan umroh bagi 40 orang jemaah
- Terlaksananya pengelolaan Masjid Agung Al Falah Jambi

Outcome kegiatan :

Tercipta dan terbinanya ketaqwaan umat beragama terhadap Tuhan YME, terjaganya kesehatan dan kenyamanan para jemaah haji, berfungsinya dan terpenuhinya fasilitas Masjid Agung.

4. Permasalahan dan solusinya

Dalam pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama selama tahun 2011 dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

Aspek Umum :

- Dekatnya rentang waktu antara pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan MTQ Tingkat Nasional sehingga persiapan untuk pelatihan qori'-qori'ah yang akan dikirim ke MTQ Nasional kurang maksimal.
- Rendahnya partisipasi aparatur pemerintah dalam acara pengajian rutin di Mushola Kantor Gubernur Jambi.
- Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pemecahan masalah ada beberapa solusi yang dilakukan antara lain :

- Untuk tahun berikutnya di upayakan koordinasi untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan Tingkat Nasional sehingga rentang waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang.
- Memberikan himbauan kepada pimpinan SKPD untuk memerintahkan stafnya agar dapat berpartisipasi pada pengajian rutin.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan baik formal maupun informal.

2. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

Tujuan dan sasaran Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat adalah :

- Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera
- Meningkatnya wawasan nasionalisme masyarakat sebagai warga NKRI,
- Tersusunnya program kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Semangat Jiwa Patriotisme, dengan alokasi dana Rp88.740.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp87.115.000,00 (98.17%).

Output kegiatan ini adalah

- Peringatan hari besar nasional sebanyak 6 hari

Outcome kegiatan :

- Terselenggaranya hari besar nasional

2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemantauan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana Rp50.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp50.000.000,00 (100%).

Output kegiatan :

- Pelaksanaan koordinasi ketenaga kerajaan ke kabupaten/kota di Provinsi Jambi
- Pelaksanaan koordinasi pemantauan tenagakerja asing
- Pelaksanaan koordinasi tenaga kerja, Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK) dan serikat pekerja.

Outcome kegiatan :

- Terciptanya hubungan industrial yang kondusif serta terpantaunya kegiatan suatu perusahaan terhadap tenaga kerja.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perempuan, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp49.970.000,00 (99,94%).

Output kegiatan :

- Terwujudnya pembinaan terhadap organisasi perempuan.

Outcome kegiatan :

- Terkoordinasi dan sinerginya kegiatan organisasi perempuan provinsi dan kab/kota
- Meningkatnya jumlah perempuan untuk aktif dalam organisasi.

4. Kegiatan Koordinasi Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp130.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp129.390.500,00 (99,53%)

Output kegiatan :

- Sinkronisasi dan terkoordinasinya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat, terkendalinya dan terpantaunya kegiatan pada Biro Kesra dan Kemasyarakatan

Outcome kegiatan :

- Tersusunnya program dan kegiatan serta pelaporan Biro Kesra dan Kemasyarakatan, terwujud dan terciptanya budaya kerja yang baik, terwujud dan tersusunnya kegiatan yang berkelanjutan pada Biro Kesra dan Kemasyarakatan

5. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp95.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp94.000.000,00 (98,95%)

Output kegiatan :

- Terbinanya mental dan spiritual masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal
- Terciptanya dan sinerginya kegiatan transmigrasi antar dinas terkait

Outcome kegiatan :

- Terciptanya suasana yang kondusif antar masyarakat transmigrasi dan lokal
- Terpantaunya kegiatan para masyarakat transmigrasi

6. Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp242.129.200,00 (100%)

Output kegiatan :

- Terbinanya tim pembina UKS di 11 kab/kota
- Koordinasi pengiriman peserta Jambore
- Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam Lomba sekolah sehat tingkat Provinsi

Outcome kegiatan :

- Terciptanya Pembinaan UKS dan Kesehatan di Provinsi Jambi

7. Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Jasmani serta Peningkatan Kesegaran Jasmani, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp81.430.000,00 dengan realisasi keuangan Rp80.581.000,00 (98,96%)

Output kegiatan :

- Pelaksanaan senam bagi PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi sebanyak 25 kali
- Terseleksinya pemuda pelopor yang berkualitas untuk mewakili Provinsi Jambi di tingkat Nasional

Outcome :

- Terciptanya aparatur yang sehat serta terciptanya rasa kebersamaan antar aparatur pemerintah
- Meningkatnya kelompok-kelompok pemuda pelopor yang berkualitas baik ditingkat provinsi maupun nasional

8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp405.506.500,00 dengan realisasi keuangan Rp404.793.738,00 (99,82%)

Output kegiatan :

- Tersedianya Obat obatan dan Alat Kesehatan di Poliklinik Kantor Gubernur Jambi

Outcome kegiatan :

- Meningkatnya Kesehatan PNS dan Keluarganya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

G. Biro Organisasi

Pada tahun 2011, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.203.000.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp2.094.441.700 ,00 atau 95,07% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bidang kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp228.377.700,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp227.925.250,00 atau terealisasi sebesar 99,80%. Adapun output yang dihasilkan adalah terinventarisirnya data tentang PNS dilingkup Sekretaris Daerah baik tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, jumlah pegawai yang mutasi, jumlah PNS yang pensiun dan yang diberhentikan. Secara umum permasalahan yang dihadapi untuk

meningkatkan kinerja program adalah belum disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi. Untuk itu, sebagai solusi kedepan diupayakan melalui penyusunan SOP pelayanan administrasi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan dan analisis jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp496.091.800,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp493.811.800,00 atau 99,54%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersusunnya Peraturan Gubernur tentang instrumen analisis jabatan, jenis dan jumlah tenaga fungsional. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional. Untuk itu, sebagai solusinya dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan melaksanakan sosialisasi tentang peran dan fungsi jabatan fungsional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp152.880.000, dengan tingkat realisasi sebesar Rp152.880.000,00 atau 100%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah terkirimnya PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi yang mengikuti diklat, kursus dan lain-lain.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Peraturan Daerah.

Untuk mendukung keberhasilan program ini dialokasikan anggaran dana sebesar Rp1.325.650.500,00 dan teralisasi sebesar Rp1.219.824.650,00 atau 92,02%. Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah :

- a. Tersusunnya LAKIP Tahun 2010, RKT Pemerintah Propinsi Jambi Tahun 2011 dan LAKIP Sekretariat Daerah Propinsi Jambi Tahun 2010
- b. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas dan terlaksananya Sosialisasi Tata Naskah dinas yang diarahkan sebagai langkah strategis dalam upaya terciptanya pelayanan yang dihadapi aparatur pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel. Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, workshop Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta sosialisasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

H. Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA

Pada tahun 2011, alokasi anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar Rp3.286.746.800,00 diarahkan untuk melaksanakan 6 (enam) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp1.140.756.000,00 dengan realisasi Rp937.454.262,00 atau 82,18%. Dari program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Tertatanya administrasi pada Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- c. Terpantaunya perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di danai oleh APBD Provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
- b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- c. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing-masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
- c. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- d. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp148.600.000,00 dengan realisasi Rp148.320.000,00 atau 99,81%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data Pendapatan dan Keuangan.
- b. Terhimpunnya data Penanaman Modal.
- c. Terhimpunnya data BUMD/BUMN dan Kerjasama Secara umum.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih sulitnya memperoleh data tentang perkembangan BUMD/BUMN di Provinsi Jambi.
- b. Penyampaian laporan penanaman modal yang tidak tepat waktu oleh instansi terkait.
- c. Tidak tersedianya beberapa data penanaman modal di kab/kota atau instansi terkait.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh adalah :

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pihak pemerintah dengan BUMD/BUMN.
- b. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi terhadap instansi terkait agar menyampaikan laporan penanaman modal tepat waktu
- c. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi kepadakab/kota atau instansi terkait agar aktif dalam penghimpunan data penanaman modal.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi dibidang KOPERINDAG

Pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini Rp145.619.200,00 dengan realisasi sebesar Rp145.043.500,00 atau 99,60%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data harga kebutuhan bahan pokok masyarakat
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang koperindag.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak ditemukan produk yang sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi beredar di pasaran.
- b. Masih kurangnya dukungan infrastruktur jalan menuju sentra produksi industri (pertanian, kerajinan, UMKM dan lainnya) baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat ditempuh adalah :

- a. Membuat himbauan kepada instansi terkait untuk melakukan usaha-usaha penstabilan harga bahan kebutuhan pokok dipasar (operasi pasar dan pasar murah).
- b. Membuat himbauan kepada instansi agar menangani masalah produk yang tidak layak konsumsi di pasar.
- c. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka untuk memperlancar transportasi ke sentra produksi industri (pertanian, kerajinan UMKM dan lainnya) agar dapat meningkatkan infrastruktur jalan ke lokasi tersebut.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp325.071.600,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp325.054.700,00 atau 99,99%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang dan SDA.
- c. Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertaraf nasional (antara lain Pekan Raya Jakarta)

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya Koordinasi, dan Sinergitas antar Lintas Sektoral dan Dinas/Instansi terkait.
- b. Masih kurang sinkronnya Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan infrastruktur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata baik kualitas dan kuantitasnya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan intensitas Rapat Koordinasi dengan dan antar Dinas/Instansi dan dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengembangan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.
- b. Membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Pembangunan Bidang Kebudayaan Pariwisata dan Promosi Industri Kepariwisata.
- c. Memberi masukan kepada instansi terkait agar dapat meningkatkan infrastruktur bidang kebudayaan dan pariwisata.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp410.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp407.514.000,00 atau 99,35%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalannya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan pelabuhan dan terjalannya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum
- c. Terjalannya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui antara lain adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota belum optimal.
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitasi Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Masih terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota.
- b. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.
- c. Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan guna terciptanya kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp1.116.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.075.392.700,00 atau 96,32%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terkoordinirnya keikutsertaan Provinsi Jambi pada Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 201, dalam rangka mewujudkan petani mampu, maju dan mandiri serta mempunyai profesionalisme melalui karya dan keterampilan.
- b. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- c. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sektor pertanian, ketahanan pangan dan penyuluhan.

- d. Tertibnya penyaluran pupuk bersubsidi.
- e. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Masih kurang lengkapnya data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah
- b. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Kab/Kota baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Kurang dipahaminya aturan kehutanan oleh aparat yang berkedudukan disekitar kawasan hutan, sehingga ada aparat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah di kawasan hutan tersebut.
- d. Masih banyak oknum-oknum yang menyelewengkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/Kota melalui pelaksanaan rapat koordinasi guna melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah
- b. Agar Pemerintah Kab/Kota menyediakan formasi tenaga Penyuluh pada penerimaan pegawai yang akan datang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pemerintah Kab/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait agar dapat mengawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada pengecer yang ada di daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi penyelesaian konflik kawasan hutan dengan pemilik izin Hutan dan sosialisasi mengenai peraturan di bidang kehutanan.

I. Biro Aset

Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, pada tahun anggaran 2011 dialokasikan dana sebesar Rp13.521.769.450,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp13.012.524.149,00 atau setara dengan 96,23%. Dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program-program sebagai berikut.

Tabel 4.47 Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Asset

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.663.001.750	2.477.293.250	93,03
	1. Kegiatan Pengadaan Meubeler	61.650.000	60.650.000	98,38
	2. Kegiatan Pengadaan Komputer	97.732.500	97.732.500	100
	3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	2.503.619.250	2.318.910.750	92,62
2	Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)	5.685.500.000	5.516.568.000	97,03
	1. Kegiatan Pengadaan Dump Truck (Roda 6)	2.280.000.000	2.240.000.000	98,25
	2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 3	448.000.000	325.600.000	72,68
	3. Kegiatan Pengadaan Dinas Operasional (SAMISAKE)	2.957.500.000	2.950.968.000	99,78
3	Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah	979.356.250	957.734.600	97,79
	1. Kegiatan Inventarisasi dan Mutasi Asset Bergerak/Tidak Bergerak	330.917.100	328.962.000	99,41
	2. Kegiatan Penilaian Asset dan Penyusunan Standar Satuan Harga	353.278.100	350.807.100	99,3
	3. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Asset Dan Penyusunan Laporan	295.161.050	277.965.500	94,17
4	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.193.911.450	3.849.482.700	91,79
	1. Kegiatan Inventaris Dan Perubahan Status Hukum Barang Daerah Milik Provinsi Jambi	193.626.100	192.653.100	99,5
	2. Kegiatan Pengadaan Dan Pengamanan Tanah Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	2.375.100.000	2.374.179.500	99,96
	3. Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBM, Evaluasi Dan Monitoring	474.295.000	317.274.000	66,89
	4. Kegiatan Sosialisasi dan BinteK Permendagri No 17 Tahun 2007 Dan PP No 6 Tahun 2006	307.006.800	284.786.800	92,76
	5. Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi	264.738.800	263.968.500	99,71
	6. Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan	238.454.100	231.798.500	97,21
	7. Kegiatan Pelayanan Administrasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Asset Pemerintah Provinsi Jambi	340.690.650	184.822.300	54,25
Total		13.521.769.450	13.012.524.149	96,23

Dari total anggaran yang ada pada Biro PAKD sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, Program SAMISAKE mendapat alokasi sebesar Rp5.685.500.000,00 atau setara dengan 42,05% dari total anggaran. Selanjutnya Program Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.193.911.450 atau setara dengan 31,02%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp2.663.001.750 atau setara dengan 19,69% dan Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah sebesar Rp979.356.250 atau setara dengan 7,24%. Adapun *output* dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; untuk pencapaian pelaksanaan dari program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Meubeler dengan alokasi dana sebesar Rp61.650.000 dan terealisasi sebesar Rp60.650.000 atau setara dengan 98,38%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pada Biro PAKD Setda Provinsi Jambi dengan *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang meliputi 4 set Meja $\frac{1}{2}$ biro, 1 set meja biro, 10 set meja pelaksana dan 1 set meja rapat.
2. Kegiatan Pengadaan Komputer dengan alokasi dana sebesar Rp97.732.500 dan terealisasi Rp97.732.500 atau setara 100%, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas staf dengan *output* yang dihasilkan adalah tersedianya 5 unit Personal Computer, 1 paket kabel LAN, 1 set LCD Proyektor, 2 unit laptop, 6 unit printer dan 5 unit UPS.
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dialokasikan dana sebesar Rp2.503.619.250 dengan realisasi sebesar Rp2.318.910.750 atau 92,62%. Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan fungsional asset Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun *output* dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah terlaksananya rehabilitasi Asrama Mahasiswa Jambi di Bandung, Rumah Dinas Eks Dokter RSUD Raden Mattaher Jambi, Rumah Kopel Eks Kehutanan, Pembangunan Gedung Lomba Sekolah (TPUKS), Rehab Gedung BKMT Provinsi Jambi, Asrama Mahasiswa Jambi di Yogyakarta, Kantor Pertambangan Provinsi Jambi, Gedung DLLAJ, TK. Pertiwi II, Rumah Eks Disperindag, Gedung Dharma Wanita, Gedung Eks Satpol PP (BNP) dan Pengadaan Gedung Mess Mahasiswa di Mesir.

B. Program SAMISAKE; dalam rangka penanganan masalah kebersihan khususnya masalah persampahan di Provinsi Jambi dan dalam upaya mendukung program pembangunan yang *pro environment*, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengadaan *Dump Truck*, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.280.000.000 dan terealisasi sebesar Rp2.240.000.000 atau setara dengan 98,25%. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan penanganan masalah persampahan di kecamatan dalam Kota Jambi, untuk itu melalui kegiatan ini disediakan *dump truck* dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan sampah dari TPS ke TPA. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 8 unit kendaraan roda 6 atau *dump truck* untuk 8 kecamatan di Kota Jambi.

2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 3 dengan alokasi dana sebesar Rp448.000.000 dan terealisasi sebesar Rp325.600.000 atau setara dengan 72,68%. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penanganan persampahan di kelurahan dalam Kota Jambi yang berfungsi untuk mengumpulkan sampah diperumahan dan pemukiman untuk selanjutnya dibawa ke TPS. Dari kegiatan ini *output* yang dihasilkan adalah tersedianya 16 unit kendaraan roda 3 di setiap kelurahan dalam Kota Jambi.
 3. Kegiatan Pengadaan Dinas Operasional SAMISAKE dengan dukungan dana sebesar Rp2.957.500.000 dan terealisasi sebesar Rp2.950.968.000 atau setara dengan 99,78%. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan kendaraan angkutan sampah diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang ditempatkan di masing-masing kecamatan ibu kota Kabupaten/Kota. Adapun *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya 10 unit kendaraan roda enam (*Dump Truck*) untuk masing-masing kecamatan ibu kota Kabupaten/Kota.
- C. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah; dalam rangka mencapai optimalisasi pengelolaan asset dan kekayaan daerah Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut.
- a. Kegiatan Inventarisasi dan Mutasi Asset Bergerak/Tidak Bergerak, dalam pelaksanaannya kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp330.917.100 dengan realisasi sebesar Rp328.962.000 atau setara dengan 99,41%. Adapun *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini terbentuknya Tim Inventarisasi Asset Pemerintah Provinsi Jambi, buku inventarisasi Asset Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilaksanakannya rekonsiliasi data inventarisasi asset berupa KIR, KIB dan buku inventarisasi asset seluruh SKPD dilingkungan Pemprov. Jambi, laporan rekonsiliasi mutasi barang bergerak/tidak bergerak, telah terlaksananya koordinasi dengan lembaga terkait meliputi BPK-RI dan BAKD Kemendagri.
 - b. Kegiatan Penilaian Asset dan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan alokasi dana sebesar Rp353.278.100 yang terealisasi sebesar Rp328.962.000 atau setara dengan 99,30%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah diterbitkannya SK. Gubernur Jambi No. 136/Kep.Gub/BPAKD/2011, diterbitkannya buku standar harga barang dan jasa tahun 2012, terbentuknya Tim Penilaian Asset Pemprov. Jambi dan telah dilakukannya penilaian asset Pemprov. Jambi yang tadinya belum ada nilainya.
 - c. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Asset dan Penyusunan Laporan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan asset dan penyusunan laporan asset Pemprov. Jambi dialokasikan dana sebesar Rp295.161.050 yang terealisasi Rp277.965.500 atau setara dengan 94,17% dengan *output* kegiatannya adalah telah dilaksanakannya rekonsiliasi dan rekapitulasi data Neraca Aset tetap per 31 Desember dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, tersusunnya laporan data belanja modal triwulan I, II dan III, telah dilaksanakannya konsultasi tentang operasionalisasi aplikasi SIPKD Asset di BAKD Kemendagri RI dan dilaksanakannya konsultasi terhadap aplikasi SIMDA Asset di BPKP.

- D. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah; untuk mencapai efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah, sehingga dapat didayagunakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka untuk mencapai tujuan dari program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
- a. Kegiatan Inventaris dan Perubahan Status Hukum Barang Daerah Milik Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp193.626.100 dengan tingkat realisasi sebesar Rp192.653.100 atau setara dengan 99,50%. Adapun *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah telah tersusunnya *data base* asset Pemprov. Jambi dan telah dilaksanakannya pemasangan labelisasi asset Pemprov. Jambi dilingkungan Setda. Pemerintah Provinsi Jambi serta telah dilaksanakannya kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka membangun Aplikasi SIMDA Asset Pemprov. Jambi.
 - b. Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Tanah Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi dialokasikan dana sebesar Rp2.375.100.000 dengan realisasi sebesar Rp2.374.179.500 atau setara dengan 99,96%. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan tanah milik Pemprov. Jambi. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya tanah untuk MUI Provinsi Jambi dengan luas 1.430 M², Tanah Tugu Jam Seberang seluas 4.208 M² dan untuk Madrasah dengan luas 248 M².
 - c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Evaluasi dan Monitoring dengan jumlah anggaran sebesar Rp474.295.000 dan terealisasi sebesar Rp317.274.000 atau setara dengan 66,89%, adapun *output* dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi dan terinventarisasinya RKBMD dan RKPBMMD seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
 - d. Kegiatan Sosialisasi dan BinteK Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp307.006.800 yang terealisasi sebesar Rp284.786.800 atau setara dengan 92,76%. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan para *stakeholders* pengelolaan barang milik daerah, adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 kepada 112 peserta (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, terbentuknya Tim Pemeriksa Barang, telah dilaksanakannya dan terekapitulasinya hasil pemeriksaan barang milik pemerintah.
 - e. Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan asset milik Pemprov. Jambi dalam rangka peningkatan PAD, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp238.454.100 dengan tingkat realisasi penyerapan dana sebesar Rp231.798.500 atau setara dengan 97,21%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana pemanfaatan asset yang dimiliki oleh Pemrov. Jambi.

- f. Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan di SKPD lingkup Pemrov. Jambi. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp238.454.100 dan terealisasi sebesar Rp231.798.500 atau setara dengan 97,21%. Dari pelaksanaan kegiatan ini, *output* yang dihasilkan adalah terhimpunnya data barang milik daerah yang akan dihapuskan oleh masing-masing SKP lingkup Pemprov. Jambi dan telah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap usulan penghapusan barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapuskan.
- g. Kegiatan Pelayanan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Asset Pemerintah Provinsi Jambi, secara umum kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan administrasi ketatausahaan Biro PAKD Setda Provinsi Jambi, untuk mendukung kelancarannya dialokasikan dana sebesar Rp340.690.650 dengantingkat realisasi sebesar Rp184.822.300 atau setara dengan 54,25%, jika dilihat dari persentase realisasi anggaran pada kegiatan ini, *relative* rendah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Surat Keputusan Tim Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemprov. Jambi, tersusunnya Renstra BPKAD Setda Provinsi Jambi, tersusunnya laporan Kegiatan untuk bahan ulang tahun Provinsi Jambi 6 Januari 2011 dan tersusunnya LAKIP BPKAD Setda Provinsi Jambi.

4.1.18.2 Sekretariat DPRD

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diterapkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi tujuan, sasaran, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu : Memberikan Pelayanan Administrasi kepada Anggota Dewan.

Gambaran umum mengenai bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam bidang administrasi Perkantoran. Untuk mencapai tujuan dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp6.989.295.440,00 yang meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air/Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Intalasi Listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis. Melalui program/kegiatan Tahun Anggaran 2011 tersebut telah terealisasi dana sebesar Rp6.080.065.143,00 (86,99%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Untuk mencapai tujuan dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp3.184.360.000,00 yang meliputi kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Meubeuler, Pengadaan Komputer, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. Melalui Program/Kegiatan TA 2011 tersebut telah terealisasi dana sebesar RP3.017.272.890,00 (94,75%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp414.205.000,00 untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dan telah terealisasi sebesar Rp409.355.000,00 (98,83%).

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp154.000.000,00 dengan kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis, dan telah terealisasi sebesar Rp120.750.000,00 (78,41%).

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD sesuai Program dan Rencana Kinerja yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan program tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp15.421.747.160,00 dengan beberapa kegiatan yaitu: Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, Rapat-rapat Paripurna DPRD, Reses, Kunker dan Peninjauan Lapangan, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pembahasan Ranperda Inisiatif. Realisasi Program tersebut sebesar Rp14.232.654.836,00 (92,29%).

4.1.18.3 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan UU no. 18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi ditetapkan dengan Perda No. 15 tahun 2008.

Sedangkan Fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang Daerah

Meskipun Balitbangda merupakan Institusi Penunjang yang tidak langsung secara teknis, namun Balitbangda berperan memberikan masukan dalam penetapan suatu kebijakan dan pendorong penerapan Teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai kearifan lokal.

Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang untuk melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan Jambi Emas 2015.

Tahun Anggaran 2011 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi memperoleh alokasi dana pembangunan melalui APBD Jambi sebesar Rp7.855.049.181 dan dana APBD Perubahan sebesar Rp300.000.000,00 yang tertuang dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program penelitian dan pengembangan.

a. Penelitian/Kajian Peningkatan Jangkauan Kualitas Pendidikan (RSBI).

- **Tujuan Penelitian** Mengetahui kinerja Sekolah RSBI Tingkat SMA di Provinsi Jambi berdasarkan Permendiknas No.78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah .
- **Rekomendasi yang dihasilkan** diantaranya dalam menetapkan RSBI harus berdasarkan hasil Evaluasi dari sekolah yang valid. Sehingga kesiapan sekolah menuju RSBI dan waktu yang diperlukan dapat diperkirakan.

b. Penelitian/Kajian Terhadap Jumlah Pegawai Yang Ideal di Provinsi Jambi.

- **Tujuan Penelitian** Mengetahui kebutuhan PNS yang tepat di Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Permendagri No.26 Tahun 2011 tentang Pedoman-Pedoman Perhitungan Kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah.
- **Rekomendasi** yang dihasilkan antara lain penempatan Pegawai disesuaikan dengan jumlah kelebihan dan kekurangan Pegawai di tiap SKPD dan berdasarkan spesifikasi keahlian dan bidang pekerjaan.

c. Pengembangan Kelembagaan HKI di Provinsi Jambi.

- **Kegiatan** ini mempunyai tujuan menginventarisasi potensi HKI di Provinsi Jambi, mensosialisasikan HKI ke masyarakat umum, Konsultasi HKI, memfasilitasi Pendaftaran HKI.
- **Rekomendasi** antara lain Sistem HKI di daerah Jambi masih perlu untuk diperkuat melalui sosialisasi, diseminasi, konsultasi dan fasilitasi permohonan HKI oleh Sentra HKI Balitbangda.

d. Penelitian/Kajian Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Ekonomi Pedesaan Dalam mendukung Program Samisake di Provinsi Jambi.

- **Tujuan dari Penelitian** ini adalah mengkaji pembangunan infrastruktur untuk percepatan ekonomi pedesaan di Provinsi Jambi berdasarkan prinsip-prinsip acceptable, transparent dan sustainable.
- **Rekomendasi** yang dihasilkan antara lain adalah melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholders (Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat setempat, lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Desa).

e. Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Daerah di Provinsi Jambi.

- **Tujuan Penelitian** ini Menyediakan informasi data sebagai sumber PAD untuk membantu merumuskan kebijakan dan arahan strategi secara terintegrasi dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Jambi .
- **Rekomendasi** yang dihasilkan antara lain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait langsung dengan PAD diharapkan dapat menetapkan target mendekati potensi pajak daerah. Data Base potensi PAD perlu dimiliki dan agar dapat diperbaharui dalam bentuk Pemutakhiran Data setiap tahun.

f. Penelitian/Kajian tentang Pengembangan BUMD di Provinsi Jambi.

- **Tujuan dari Penelitian** ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah pelanggan BUMD, jumlah karyawan, sistem pelayanan banyaknya kantor cabang dan akses pelanggan untuk mendapatkan produk dan kemudahan melakukan pembayaran tagihan, penyertaan modal pihak ketiga, peraturan atau kebijakan yang mendukung operasional BUMD dan jumlah manajer terhadap keuntungan BUMD di wilayah Provinsi Jambi dan Kabupaten.
- **Rekomendasi** sebagai berikut Pihak Pemerintah dan legislatif perlu memberikan hak otonomi lebih luas kepada BUMD untuk melakukan kebijakan bisnis agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

g. Penelitian/Kajian tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

- **Tujuannya penelitian** antara lain untuk mengetahui model pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
- **Rekomendasi** sebagai berikut perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi secara sinergi kepada kelompok sasaran, tentang maksud dan tujuan Program PUAP dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi dan Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan Pertanian Daerah.

h. Penelitian/Kajian Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mendukung Program Samisake (Pertanian, Peternakan dan Perkebunan).

- **Tujuannya Penelitian** adalah sebagai berikut untuk mendorong perkembangan usaha tani melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi dan dapat dikembangkan secara ekonomis melalui dukungan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- **Rekomendasi** sebagai berikut perlu ditingkatkan Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) melalui Pelatihan Inovasi, Pemerintah Kecamatan sebagai penanggungjawab pengelola Samisake perlu mempertimbangkan Ad/ART kelompok sebagai salah satu syarat bagi calon Penerima Program samisake, Pemerintah Provinsi Jambi melalui koordinasi kabupaten/Kota perlu melakukan inisiatif dan fasilitasi agar Kecamatan segera menyusun Rencana Kerja Program Samisake.

i. Operasional Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi Dan Pemasaran Iptek.

- **Tujuan Kegiatan** untuk memasyarakatkan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- **Hasil dari kegiatan** lomba karya Ilmiah dalam rangka Hari kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu untuk Tingkat SLTA dan Tingkat Perguruan Tinggi.

j. Roadmap Pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Masurai.

- **Tujuan Penelitian** sebagai berikut mengidentifikasi dan menganalisis potensi multi sektor/subsektor dalam pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Masurai Kabupaten Merangin yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, infrastruktur, lingkungan, sosial budaya, perindustrian dan perdagangan, pariwisata serta investasi (penanaman modal).
- **Dari Penelitian ini dihasilkan Rekomendasi** yaitu teridentifikasinya data karakteristik dan potensi wilayah Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang dan Lembah Masurai, tersusunnya *grand strategy* (strategi makro) pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Masurai Kabupaten Merangin dan tersedianya *mapping* program dan kegiatan tiap SKPD yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Masurai Kabupaten Merangin untuk tiap sektor/sub sektor.

k. Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Perundang-undangan Daerah serta Isu Strategis/Aktual Pemerintah Daerah.

- **Tujuan Penelitian dan Pengkajian** adalah untuk menyusun Naskah Akademik sistem dan prosedur pengkajian produk hukum daerah Provinsi Jambi dan melihat sejauhmana peran SKPD sebagai pemrakarsa dan pelaksana pengkajian produk hukum daerah.
- **Penelitian ini menghasilkan Rekomendasi** yaitu dalam pembentukan Ranperda berdasarkan Peraturan terkait hendaknya harus dibuat Naskah Akademik, untuk membuat Naskah akademik diserahkan kepada lembaga yang berwenang melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Naskah Akademik secara khusus, yang dalam hal ini berdasarkan Tupoksinya adalah Balitbangda Provinsi Jambi.

l. Penelitian/Kajian tentang Pemanfaatan Corporated Sosial Responsibility (CSR).

- **Tujuannya Penelitian** ini adalah menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang identifikasi potensi ketersediaan data CSR dan Institusi penyedia dana serta bentuk program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan, merumuskan pola sinergitas pengelolaan dana CSR antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga memiliki standarisasi dalam sistem dan keterpaduan dalam mencapai tujuan guna mendukung capaian Jambi Emas 2015.
- **Penelitian ini menghasilkan beberapa Rekomendasi yakni** perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap model pengelolaan dana CSR, dengan model konsorsium, dalam kaitannya dengan Program Samisake yang telah berjalan selama ini.

m. Kaji Terap Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Keriting Unggul Dan Cabai Hibrida Unggul Jambi di Kecamatan Jangkat kabupaten Merangin.

- Tujuan penelitian sebagai berikut Aplikasi teknologi organik (MOL keong Mas dan *Trichokompos*) dalam pengembangan cabai keriting unggul nasional di tiga lokasi Desa Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, mendapatkan Keragaman genetik (varians) Tanaman Cabai hibrida unggul Jambi yang memiliki karakter spesifik rasa pedas, ukuran buah besar, warna merah terang dan berdaya hasil tinggi.

n. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Mataher.

- Tujuan adalah untuk mengetahui kondisi eksisting unit pelayanan pada bidang kajian Provinsi Jambi, terukurnya indeks kepuasan masyarakat Provinsi Jambi tahun 2011, terpetakannya persepsi masyarakat akan pelayanan publik di Provinsi Jambi.
- Adapun Rekomendasi yang dihasilkan adalah pentingnya untuk dilakukan pembenahan pada komponen unit pelayanan yang masih berada di bawah nilai standar pelayanan, pentingnya pemusatan kajian yang berkenaan dengan komponen kecepatan pelayanan, pembiayaan pelayanan, dan keberadaan petugas pelayanan sebagaimana yang paling banyak dipermasalahkan dari beberapa unit pelayanan yang nilainya di bawah standar pelayanan.

o. Efektifitas Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Peternak Pada Kawasan Sentra Produksi Ternak Sapi di Provinsi Jambi

- **Tujuan Penelitian** ini sebagai berikut menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah pada kawasan sentra produksi ternak sapi di Provinsi Jambi, menganalisis dampak kebijakan bantuan ternak sapi terhadap kesejahteraan peternak pada wilayah sentra produksi ternak sapi di Provinsi Jambi.
- **Rekomendasi** kebijakan pemerintah berupa bantuan ternak sapi pada kawasan sentra produksi Provinsi Jambi berdampak pada kesejahteraan peternak namun dampaknya masih kecil, oleh karena untuk dapat memberikan dampak yang lebih besar maka perlu peningkatan kuantitas dan kualitas program bantuan.

4.1.18.4 Inspektorat Provinsi Jambi

Sejalan dengan visi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efisien, efektif melalui pengawasan yang profesional, maka pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp6.346.136.000,00 dengan 6 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, 5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Selanjutnya dalam rangka mencapai misi dari Inspektorat Provinsi Jambi yaitu 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, 3) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, 4) dan menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp5.808.139.024,00 atau 91,53%. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.48 Capaian Program Inspektorat Tahun 2011

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.635.144.900	1.491.580.424	91,22
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	420.444.100	414.392.700	98,56
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.500.000	28.500.000	100
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3.691.908.000	3.598.484.000	97,47
5.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	253.469.000	76.291.000	30,1
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	316.670.000	199.590.500	63,03
Jumlah		6.346.136.000	5.808.838.624	91,53

Dari data tersebut terdapat 2 (dua) program yang realisasinya belum maksimal yaitu Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Guna pencapaian target dari program tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi dalam hal

peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kementerian Teknis lainnya. Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur Inspektorat Provinsi Jambi sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis atas kerjasama tersebut, sehingga terjadi efisiensi dari program ini hingga 69,90%. Begitupula dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 63,03%, hal inipun berdampak positif dengan adanya kerjasama dengan BPKP Provinsi Jambi, Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, dan Provinsi Lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Kegiatan utama Inspektorat Provinsi Jambi berupa pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut termasuk dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.916.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.910.910.000,00 atau 99,69%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeriksaan/pembinaan terhadap 94 Objek Pemeriksaan (Obrik) dengan 94 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 94,69% dari target yang telah rencanakan sebelumnya. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel 4.29 berikut :

Tabel 4.49 Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2011

No.	Uraian	Pelaksanaan	Realisasi	
			Obrik	LHP
1.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	Januari	43	43
2.	Review Laporan Keuangan	Februari	1	1
3.	Monitoring Samisake	Desember	4	4
4.	Reguler Pemprov Jambi	Maret s.d Des	38	38
5.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati			
a.	Kabupaten Batanghari	Feb s.d Maret	1	1
b.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Feb s.d Maret	1	1
c.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	April s.d Mei	1	1
d.	Kabupaten Bungo	Juni s.d Juli	1	1
e.	Kabupaten Tebo	Juni s.d Juli	1	1
f.	Kabupaten Muaro Jambi	Juli s.d Agustus	1	1
g.	Kabupaten Sarolangun	Juli s.d Agustus	1	1
h.	Kota Sungai Penuh	Juni	1	1
Jumlah			94	94

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diupayakan penyelesaiannya. Dari 561 temuan dengan 1.092 rekomendasi, Inspektorat Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2011, telah ditindaklanjuti sebesar 60% dengan katagori selesai dan 40% katagori dalam proses. Jumlah kerugian negara telah ditarik sebesar Rp555.208.614,25 atau 51,26% dari seharusnya Rp1.083.036.476,17 selebihnya dalam katagori dalam proses yang meruapkan hasil pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2011.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2011 sebanyak 243 temuan dengan 334 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 235 rekomendasi atau 70,39% sedangkan 99 rekomendasi atau 29,64% lainnya masih dalam proses. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2009-2011 sebanyak 227 temuan dengan 600 rekomendasi, dari sejumlah rekomendasi tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan terhadap tindak lanjut pada beberapa SKPD Provinsi Jambi dengan hasil selesai tindak lanjut sejumlah 368 rekomendasi atau 61,33% dan sisanya sejumlah 232 rekomendasi atau 38,67% pada katagori dalam proses, sisa rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang baru selesai dilaksanakan pada tahun 2011.

Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan BPK RI dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.50 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009 s.d 2011.

No	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok temuan	Temuan Pemeriksaan			Tindak Lanjut			Saldo Temuan		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
1	2	3		4	3		4	3		4
A HAPSEM II TA 2011										
1	Perhitungan Anggaran									
2	Temuan Kerugian Keuangan Negara									
3	Temuan Keuangan lainnya	1	1	639.896.950,00				1	1	639.896.950,00
4	Temuan Non Keu/ Administrasi	5	8	0,00				5	8	0,00
Sub Jumlah (A)		6	9	639.896.950,00	0	0	0	6	9	639.896.950,00
B HAPSEM I TA 2011										
1	Perhitungan Anggaran									
2	Temuan Kerugian Keuangan Negara									
3	Temuan Keuangan lainnya	4	12	12.354.444,00				4	12	12.354.444,00
4	Temuan Non Keu/ Administrasi	8	19	605.071.304,00				8	19	605.071.304,00
Sub Jumlah (B)		12	31	617.425.748,00	0	0	0	12	31	617.425.748,00

No	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok temuan	Temuan Pemeriksaan			Tindak Lanjut			Saldo Temuan		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
1	2	3		4	3		4	3		4
C HAPSEM II TA 2010										
1	Perhitungan Anggaran	3	7					3	7	
2	Temuan Kerugian Keuangan Negara	2	8	1.984.397.681,35			1.427.206.040,24	2	8	557.191.641,11
3	Temuan Keuangan lainnya	13	27	4.222.596.378,01	2	2	867.463.819,01	11	25	3.355.132.559,00
4	Temuan Non Keu/ Administrasi	17	45	2.348.368.346,00	2	4	266.897.847,00	15	41	2.081.470.499,00
Sub Jumlah (C)		35	87		4	6		31	81	5.993.794.699,11
				8.555.362.405,36						
D HAPSEM I TA 2010										
1	Perhitungan Anggaran	3	13					3	13	
2	Temuan Kerugian Keuangan Negara									
3	Temuan Keuangan lainnya									
4	Temuan Non Keu/ Administrasi	7	15					7	15	0,00
Sub Jumlah (D)		10	28		0	0	0	10	28	-
				-						

No	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok temuan	Temuan Pemeriksaan			Tindak Lanjut			Saldo Temuan		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
E	s.d HAPSEM II TA. 2009									
1	Perhitungan Anggaran	19	41	57.363.473.065,34	18	37	56.397.159.765,34	1	4	966.313.300,00
2	Temuan Kerugian Keuangan Negara	26	78	192.919.321.749,72	22	59	192.543.952.249,72	4	19	375.369.500,00
3	Temuan Keuangan lainnya	46	112	69.592.853.573,80	43	104	69.005.060.499,80	3	8	587.793.074,00
4	Temuan Non Keu/ Administrasi	73	214	70.432.678.406,35	58	162	70.432.678.406,35	15	52	0,00
	Sub Jumlah (E)	164	445	390.308.326.795,21	141	362	388.378.850.921,21	23	83	1.929.475.874,00
	TOTAL	227	600	400.121.011.898,57	145	368	390.940.418.627,46	82	232	9.180.593.271,11

Tabel. 4.51 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2009 s.d 2011.

No	Hasil Pemeriksaan Semesteran	Temuan Pengawasan			Tindak Lanjut			Saldo Temuan		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Sara n	Nilai	Temua n	Sara n	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	HP.Semester II TA 2011	146	290	353.285.354,30	24	42	28.140.209,38	122	248	325.145.144,92
B	HP.Semester I TA 2011	73	137	40.505.697,00	46	82	22.363.590,00	27	55	18.142.107,00
C	HP.Semester II TA 2010	58	117	33.460.580,38	32	64	22.097.720,38	26	53	11.362.860,00
D	HP.Semester I TA 2010	44	92	263.551.667,50	33	66	185.794.061,50	11	26	77.757.606,00
E	HP.Semester II TA 2009	240	456	392.233.276,99	207	397	296.813.032,99	33	59	95.420.244,00
TOTAL		561	1092	1.083.036.576,17	342	651	555.208.614,25	219	441	527.827.961,92

Selain kegiatan yang bersifat rutinitas dan terjadual, Inspektorat Provinsi Jambi juga melaksanakan tugas yang bersifat insidentil berupa penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat. Pada tahun 2011 berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.51 Rekapitulasi Klasifikasi Pengaduan Masyarakat Posisi per Desember 2011

No.	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Klasifikasi Dumas									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MenPAN & Reforma si Birokrasi	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	Itjen Kemendagri	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	Gubernur Jambi	23	6	-	3	8	2	1	-	1	-	2
4	BKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	12	3	1		3	1	1	-	-	1	2
JUMLAH		42	13	1	3	13	4	2	-	1	1	4

Keterangan :

- 01 : Penyalahgunaan Wewenang
- 02 : Pelayanan Masyarakat
- 03 : Korupsi/Pungutan Liar
- 04 : Kepegawaian/Ketenagakerjaan
- 05 : Pertanahan/Perumahan
- 06 : Hukum Peradilan
- 07 : Kewaspadaan Nasional
- 08 : Tata Laksana Pemerintahan
- 09 : Lingkungan Hidup
- 10 : Umum

Pelimpahan penyelesaian atas pengaduan masyarakat dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jambi cq. Inspektorat Provinsi Jambi dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 13 surat atau 30,95%, Kepegawaian/Ketenagakerjaan 13 pengaduan atau 30,95%, pertanahan/perumahan sebanyak 4 surat atau 9,52%, Umum sebanyak 4 surat atau 9,52%, Korupsi/Pungutan liar sebanyak 3 surat atau 7,14%, Hukum Peradilan sebanyak 2 surat atau 4,76%, Pelayanan masyarakat sebanyak 1 surat atau 2,38% Tata Laksana Pemerintahan sebanyak 1 surat atau 2,38% Lingkungan hidup sebanyak 1 surat atau 2,38%. Sedangkan tujuan surat pengaduan masyarakat paling banyak ditujukan langsung kepada Gubernur Jambi yaitu sebanyak 15 surat atau 35,71%, Lembaga lain sebanyak 15 surat atau 35,71%, dan kepada Inspektorat Provinsi sebanyak 8 surat atau 19,05% dan Bupati/Walikota sebanyak 4 surat atau 9,52%.

Tabel 4.52 Rekapitulasi Tujuan Dumas Posisi per Desember 2011

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tujuan Surat			
			Gub	Bupati/ Walikota	Inspektorat Provinsi	Lembaga Lain
1	MenPAN dan Reformasi Birokrasi	4	-	1	3	-
2	Itjen Kemdagri	3	3	-	-	-
3	Gubernur Jambi	23	12	3	1	7
5	Setneg	12	-	-	4	8
Jumlah		42	15	4	8	15

Dari data tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah menindaklanjuti atas surat pengaduan tersebut berupa pemeriksaan, klarifikasi dan penegasan terhadap surat pengaduan dengan hasil; 10 surat pengaduan dilakukan pemeriksaan, 23 surat dilakukan klarifikasi, dan 1 surat belum ditindaklanjuti dan 8 surat tidak ditindaklanjuti.

Tabel 4.53 Rekapitulasi Tindak Lanjut Surat Dumas Posisi per Desember 2011

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tindak Lanjut Surat				
			Diperiksa	Klarifikasi	Penegasan	Tidak Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
1	MenPAN & Reformasi Birokrasi	4	-	4	-	-	-
2	Itjen Kemendagri	3	1	2	-	-	-
3	Gubernur Jambi	23	9	8	-	-	1
4	BKN	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	12	-	9	-	8	-
Jumlah		42	10	23	-	8	1

Penanganan surat pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sebanyak 23 surat pengaduan yang disampaikan kepada Gubernur baik langsung maupun tidak langsung, telah dilakukan klarifikasi sebanyak 16 surat dan telah dilakukan 7 pemeriksaan dengan hasil bahwa pengaduan masyarakat tersebut terbukti.
- Surat Pengaduan yang diterima dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3 surat telah ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi.
- Sekretariat Negara meneruskan surat pengaduan kepada Gubernur/ Inspektorat Provinsi Jambi sebanyak 12 surat pengaduan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 12 surat telah diklarifikasi.
- Surat Pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 4 surat telah dilakukan klarifikasi.

Tabel 4.54 Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Dumas Posisi per Desember 2011

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Hasil Tindak Lanjut Surat					
			Diperiksa		Klarifikasi		Penegasan	
			Terbukti	Tidak Terbukti	TS	TTS	TS	TTS
1	MenPAN dan Reformasi Birokrasi	4	-	-	-	4	-	-
2	Itjen Kemdagri	3	-	-	2	1	-	-
3	Gubernur Jambi	23	6	1	3	13	-	-
4	BKN	-	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	12	-	-	1	8	-	-
Jumlah		42	6	1	6	26	-	-

Keterangan :

TS : Tuntas.

TTS : Tidak Tuntas

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program dan kegiatan prioritas Inspektorat Provinsi Jambi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Jumlah Personil yang memahami Kasus-kasus tertentu.
2. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
4. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
5. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikutkan personil Inspektorat Provinsi Jambi untuk mengikutkan Diklat Khusus seperti Diklat Audit Investigasi.
2. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP
4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
5. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

4.1.18.5 Kantor Perwakilan Jambi di Jakarta

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang penghubung yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas perbantuan (desentralisasi) yang diberikan oleh Pemerintah Kepada Gubernur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai fungsi 1) Perumusan kebijakan, pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman, 2) Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Swasta di Jakarta, 3) Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah daerah di Jakarta dan Daerah lainnya, 4) Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya, 5) Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah di Jakarta, 6) Penghubung Pemerintah Kabupaten/Kota serta Legislatif dengan Lembaga Departemen 7) Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, 8) Pengelolaan ketatausahaan dan 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai misi yaitu 1) Melayani dan melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas kerjasama Pemerintah Jambi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sehingga mempercepat jalannya Administrasi Pemerintah dan Pembangunan, 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, 3) Melaksanakan promosi pembangunan dalam rangka mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan investasi serta berperan aktif dalam upaya Pembinaan masyarakat Daerah Jambi sebagai asset dalam Pembangunan Daerah.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai “Show Window” dan pilar utama dalam pengembangan Potensi Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan dalam peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut masuk dalam Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp952.051.000,00 dan terealisasi sebesar Rp919.093.438,00 atau 96,54%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan pelayanan publik mencapai 63,16% dan kegiatan Peningkatan seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi mencapai 99,30%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, dapat dilihat dari realisasi kontribusi, retribusi sewa mess Jambi yang meningkat sebesar Rp2.461.700.000,00 atau 29,39% dibanding tahun 2010 sebesar Rp1.913.425.000,00 dengan peningkatan target sebesar 12,8%.

Secara keseluruhan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari sisi penyerapan keuangan sebesar 88.22% dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.55 Realisasi pelaksanaan program Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta tahun anggaran 2011

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	4.445.159.000	4.006.652.424	90,14
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.738.470.000	2.540.660.897	92,78
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56.625.000	56.400.000	99,6
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.100.000	53.502.000	98,89
5.	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	506.800.000	141.422.615	27,91
6.	Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	952.051.000	919.093.438	96,54

Dari data tersebut terdapat 1 (satu) program yang realisasinya belum maksimal yaitu program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah. Hal ini dikarenakan Kantor Perwakilan Pemprov Jambi telah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan daerah serta Kantor Perwakilan yang ada diseluruh Indonesia guna peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga terjadi penghematan anggaran.

4.1.18.6 Sekretariat KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu wadah aktualisasi bagi anggota Korpri, keberlangsungan, dan kesinambungan pemerintahan sangat bergantung pada profesionalisme para anggota Korpri dalam menjalankan rencana, program dan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat kopri tertuang dalam beberapa program prioritas yaitu :

- a) Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah dilaksanakan kegiatan pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI yang bertujuan melakukan pembinaan serta memfasilitasi pemasalahan organisasi dan hukum di Bidang Kesadaran Hukum dan Kelembagaan, dengan terbentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Jambi dapat menciptakan rasa aman bagi anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
- b) Program Kerjasama peningkatan olahragawan anggota KORPRI yang berbakat dan berprestasi. Untuk mencapai sasaran program peningkatan olahragawan anggota KORPRI dilaksanakan kegiatan MUSPROV BAPOR KORPRI dan kegiatan Pekan Olah Raga KOPRI Provinsi Jambi yang bertujuan untuk Meningkatkan kerjasama, solidaritas, kekompakan dan sportifitas antara sesama anggota KORPRI.

4.1.19 Kepegawaian

4.1.19.1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, BKD adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di atas, BKD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian ;*epe*
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang
- c. Kepegawaian ;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengurusan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Daerah lainnya;
- h. Pembinaan di bidang kepegawaian terhadap seluruh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas maka pada tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:*Ba*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini adalah memberikan dan menyediakan dukungan dan fasilitas yang memadai dan cukup untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Sasaran program adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian Provinsi Jambi dengan dukungan dana sebesar Rp598.534.675,00. Untuk mencapai tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini telah dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- 10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah terealisasi sebesar 82,11%, dengan realisasi terkecil adalah pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu sebesar 38,80%. Hal ini disebabkan oleh penghematan dalam pemakaian energi di BKD Provinsi Jambi. Secara umum tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program ini karena kegiatan yang ada bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional yang tiap bulan dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan daya dukung pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian BKD Provinsi Jambi dengan total anggaran sebesar Rp717.504.000,00. Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Program ini telah terealisasi sebesar 89,14% dengan realisasi terkecil pada kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yaitu sebesar 55,31%. Hal ini terjadi karena selama tahun 2011, pemeliharaan hanya bersifat berkala dan tidak perlu melakukan perbaikan berat.

Sama halnya dengan program pelayanan administrasi perkantoran, secara umum program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini juga tidak menemukan masalah dalam pelaksanaannya karena kegiatan yang ada bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional yang tiap bulan dilaksanakan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program peningkatan disiplin aparatur adalah terwujudnya sosok PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku serta tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana diharapkan setiap PNS mengerti akan kewajiban dan haknya. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, kedisiplinan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pengembangan disiplin PNS pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini, telah dianggarkan dana sebesar Rp105.000.000,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS.

Adapun realisasi pelaksanaan program ini adalah sebesar 94,58% dan secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil guna mewujudkan pedoman kerja bagi seluruh aparatur. Untuk mencapai tujuan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, telah dianggarkan dana sebesar Rp401.491.825,00 dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.

Dalam pelaksanaannya program ini telah terealisasi sebesar 78,80% dengan realisasi terkecil pada kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah, yaitu sebesar 71,61%. Hal ini terjadi karena masih kurangnya minat PNS Daerah untuk menjadi tenaga fungsional, sehingga serapan dana dalam kegiatan ini lebih banyak untuk mengikuti diklat struktural.

Untuk kegiatan seleksi calon pejabat struktural terus berproses seiring dengan usulan dan atau konsultasi calon pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Menurut data yang terhimpun, calon pejabat struktural yang telah diproses meliputi:

a. Kabupaten Merangin	= 3 orang
b. Kabupaten Sarolangun	= 19 orang
c. Kabupaten Tanjab Barat	= 46 orang
d. Kabupaten Tebo	= 27 orang
e. Kabupaten Muaro Jambi	= 15 orang
f. Kota Jambi	= 6 orang
g. Kota Sungai Penuh	= 27 orang

Sementara itu, proses BAPPERJAKAT dalam jabatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk seleksi calon pejabat struktural dari bulan Januari s/d September 2011 meliputi eselon II sebanyak 33 orang, eselon III sebanyak 154 orang dan eselon IV sebanyak 298 orang. Sedangkan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional adalah sebanyak 892 orang.

Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS, dipergunakan bagi PNS yang mengikuti diklat, bintek, dan diklatpim dengan pengiriman sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2011, terdapat 1 (satu) orang PNS BKD Provinsi Jambi yang mengikuti Diklatpim Tk. IV dan untuk Diklatpim Tk. III sebanyak 3 (tiga) orang.

Sementara kepesertaan Diklatpim Tk. II Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Bidang SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklatpim Tk. II sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebesar Rp2.741.415.600,00 dan telah terealisasi sebesar 92,52%. Untuk mendukung program ini, telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Secara umum, tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Melalui kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, telah dibangun Sistem Informasi Kepegawaian dengan bentuk keluaran 1 (satu) laporan, yaitu DUK dan Pengembangan/ Pembangunan aplikasi yang dapat menghasilkan berbagai laporan yang akan dipergunakan yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, bahwa untuk proses pemberian Nomor Indentitas PNS (NIP), Pemberian Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS, Penetapan Keputusan Pensiun PNS dan Peremajaan Data Kepegawaian PNS dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer yang terintegrasi antara BKN, Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini BKD. Diharapkan dengan perangkat pendukung SAPK dan jaringan bersama dengan PT. Telkom, kedepan akan dilanjutkan dengan validasi data PNS berdasarkan Unit organisasi dan pangkat.

b) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

Kendala pada pelaksanaan kegiatan ini adalah keluarnya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor : 141 PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Moratorium/Penundaan Penerimaan PNS dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisiensi anggaran. Penundaan Sementara Penetapan Tambahan Formasi untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Oleh sebab itu Kegiatan Penerimaan Seleksi Penerimaan CPNS pada tahun 2011 ditujukan untuk penyelesaian Tenaga Honorer yang masih dalam proses penyelesaian di Kantor Badan Kepegawaian Negara, dimana untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tenaga Honorer yang sudah masuk dalam Data Base sebanyak 238 orang.

c) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi ini tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2011 telah diberikan satyalancana karya satya untuk 10 tahun kepada 121 orang, 20 tahun kepada 305 orang, dan 30 tahun kepada 66 orang.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian cuti bagi PNS, pembuatan kartu Istri dan Kartu Suami (Karis/Karsu) dan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg). Adapun Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti selama tahun 2011 adalah sebanyak 68 orang, dengan rincian cuti tahunan sebanyak 5 orang, cuti hamil sebanyak 1 orang, cuti melaksanakan umroh/ haji sebanyak 58 orang, dan cuti sakit sebanyak 5 orang. Sementara untuk pembuatan Karis telah dilaksanakan sebanyak 153 buah dan Karsu sebanyak 135 buah, sedangkan pembuatan Kartu Pegawai sebanyak 196 buah.

d) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ini tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Dari tiga kategori penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, pada tahun 2011 telah dilaksanakan hukuman disiplin ringan terhadap 23 orang berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sementara hukuman disiplin sedang tidak ada dan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat telah dilaksanakan kepada 4 (empat) orang.

e) Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN. Pada tahun 2011 calon seleksi yang memenuhi syarat administrasi adalah sebanyak 313 orang dan setelah diseleksi kembali maka jumlah calon seleksi yang memenuhi syarat psikologi adalah sebanyak 241 orang. Pada tahap seleksi kesehatan, jumlah calon yang memenuhi syarat berkurang menjadi 189 orang, dan jumlah ini kembali berkurang pada saat seleksi kesemaptaaan, dimana yang memenuhi syarat kesemaptaaan hanya 170 orang. Hasil tahap tes akademik calon yang terjaring berjumlah 65 orang, yang selanjutnya berhak mengikuti PANTUKHIR di Kampus IPDN Jatinangor. Setelah pelaksanaan PANTUKHIR, maka jumlah putra-putri asal Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN adalah **sebanyak 63 orang**.

f) Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam kegiatan ini, meliputi sub kegiatan Ujian Dinas yang diikuti oleh 158 orang Ujian Dinas Tingkat I dan 109 orang untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II, dan sub kegiatan rapat kerja kepegawaian se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2011. Secara umum tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

g) Kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat dan Proses Seleksi Pensiun Bagi PNS

Kegiatan seleksi kenaikan pangkat dan proses seleksi pensiun bagi PNS ini tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Sampai dengan TMT Bulan Oktober 2011 telah diselesaikan kenaikan pangkat PNS sebanyak 902 orang, yang terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi sebanyak 606 orang dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 296 orang.

Sementara untuk penyelesaian usul pensiun PNS, telah dilakukan ke BKN Regional VII Palembang sebanyak 254 orang dan BKN Pusat dan Sekretariat Negara sebanyak 31 orang.

h) Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pemberian bantuan tugas belajar kepada 1 orang PNS tugas belajar untuk jenjang S.1, 10 orang untuk PNS tugas belajar S.2, dan 10 orang untuk PNS tugas belajar S.3. Sedangkan pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar pada Program Pascasarjana (S.2) telah dilaksanakan untuk 3 orang.

i) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini merupakan untuk pemenuhan tugas pokok dan fungsi serta guna melakukan penguatan kelembagaan BKD, yaitu untuk melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2011.

j) Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kegiatan ini tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2011 diprioritaskan pada CPNS Daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diangkat menjadi PNS, baik melalui pelamar umum maupun dari tenaga honorer sebanyak **593 orang**.

4.1.19.2. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

1. Program Diklat Manajemen Pemerintahan

Program Diklat Manajemen Pemerintahan ditujukan untuk mendukung kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja, dengan didukung kegiatan Diklat Manajemen Tata Pemerintahan, Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp466.435.240,00 dengan realisasi sebesar Rp419.046.910,00 . Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sehingga meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini kurangnya Ketersediaan tenaga pengajar dilingkungan Pemerintah Prov. Jambi, Kurangnya minat aparatur untuk mengikuti Diklat dan Tidak terdatanya para camat yang mengikuti Diklat PPAT. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Perlunya penambahan tenaga Widyaiswara, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur dan Harus mengadakan pendataan camat yang telah mengikuti Diklat PPAT.

2. Program Diklat Fungsional

Program ini bertujuan untuk mendukung kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp243.406.670,00 dengan realisasi sebesar Rp187.622.980,00. Dengan terlaksananya program ini dapat meningkatkan kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam program ini.

3. Program Diklat Teknis

Untuk mencapai sasaran Program Diklat Teknis didukung oleh kegiatan, Diklat teknis Bendahara Keuangan Daerah pada SKPD, Diklat Teknis Pengelolaan barang Daerah. Dengan terlaksananya program ini, dapat

meningkatkan kapasitas maupun kemampuan aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah.

Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp44.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.765.000,00. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, Masih kurangnya koordinasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan pada SKPD, Masih kurangnya minat aparatur yang ikut serta dalam Pengelola Barang Daerah, Masih kurangnya minat aparatur dalam Wirausaha bagi PNS Jelang Pensiun.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Harus mengadakan koordinasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan pada SKPD, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur.

4. Program Diklat Struktural

Tujuan dari program Diklat Struktural adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur para pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung kegiatan, Diklat Pim Tk IV, Diklat Pim Tk III, Diklat Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp813.848.000,00 dengan realisasi sebesar Rp797.024.350,00.

Dengan terlaksananya program ini, dapat meningkatkan perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparatur pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

4.1.20. Komunikasi Dan Informatika

4.1.20.1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dalam pelaksanaan sehari-harinya dibantu oleh Sekretariat KPID Provinsi Jambi, dimana Sekretariat KPID Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi menjembatani dan memfasilitasi tugas dan fungsi komisioner dengan tugas fungsi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Perencanaan Strategis KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan.

Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan antara lain menyangkut komitmen, kebersamaan, sinergitas, integritas dan profesionalisme, semua elemen yang terlibat dalam mengupayakan pencapaian cita-cita sistem penyiaran daerah di Jambi seperti dinyatakan dalam Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi.

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut : "Terwujudnya Sistem Penyiaran yang Berkeadilan,

Bermartabat dan Bermanfaat guna Mendukung Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015”

Misi dari KPID Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut :

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil,merata, dan seimbang;
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib,teratur adan memiliki kepastian hukum;
3. Membangun iklim persaaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;
4. Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya;
5. Mewujudkan profesionalisme di dibidang penyiaran melalui pengembangan SDM;

Dalam mengimplementasikan perencanaan KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dalam penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut kebijakan daerah yang dituangkan dalam kebijakan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan selama tahun 2011.

Selama tahun 2011 terdapat 4 macam pengaduan dari masyarakat dan telah dintaklanjuti penyelesaiannya, hal ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPID dalam menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan , sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Tabel 4.56 Daftar Nama Pengaduan dari masyarakat:

No	Nama Pengirim	Nama Acara	Permasalahan	No dan tanggal panggilan	Penyelesaian Permasalahan
1	Masyarakat	Sersan	Host merangkap sebagai narasumber	015/10/KPID/2011 4 Agustus 2011	Berjanji memperbaiki format acara
2	PT. Joita Pratama Widata. Angso Duo Sinema Production	FTV (film televisi) "Taqwa"	Penayangan FTV tanpa izin dari Produser	38/043/KPID/2011 14 November 2011	Berlanjut ke somasi
3	Masyarakat	Alam Bawah Sadar	Menunjukan adegan vulgar menganiaya bagian badan manusia	38/043/KPID/2011 14 November 2011	Tidak akan mengulangi kembali adegan yang di maksud
4	Masyarakat	Running Text pada Jambi TV	Mencemarkan nama baik keluarganya	38/043/KPID/2011 14 November 2011	Sudah diselesaikan ke dua belah pihak

Selama tahun 2011 Program yang telah dilaksanakan KPID meliputi dari:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dilingkungan kerja dan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari di Sekretariat KPID, berupa pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan 3 unit roda 2 serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Tenaga Sumber Daya Manusia yang profesional bagi tenaga Sekretariat KPID dengan mengikuti pelatihan teknis pengolahan aset dan Program Sitim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

3. Program Peningkatan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka pelaksanaan menunjang pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi KPD antara lain:

1. Dilaksanakannya seleksi dan penetapan Anggota KPID sebanyak 7 orang sesuai dengan SK. Gubernur Jambi Nomor 78 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011.
2. Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi Literasi Media yang diikuti Generasi Muda kalangan pelajar SLTP dan SLTA, Evaluasi Dengar Pendapat dari kalangan masyarakat, media masa dan penyiar serta Gemes Pedes dalam rangka penancangan nonton sehat yang di ikuti kalangan pelajar.

4.1.20.2. Kantor PDE

Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi merupakan salah satu Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga – lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok menyusun data dan informasi secara sistematis, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja dari Kantor PDE dilaksanakan beberapa program kegiatan penunjang yaitu :

1. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan memberikan pembinaan kepada setiap SKPD untuk lebih memahami tentang sistem informasi yang telah disediakan oleh KPDE sehingga sistem informasi

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pelaksanaan program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa dituangkan kedalam beberapa kegiatan :

- a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, hingga tahun anggaran 2011 seluruh SKPD dalam Provinsi Jambi telah tersambung dan telah terintegrasi melalui jaringan internet/intranet yang bekerja sama dengan PT. Inti Informatika Palembang selaku penyedia Bandwidth 5 Mbps.
- b) Kegiatan Pengkajian dan Pemafaatan Sistem Informasi dan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pada pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pengkajian sistem informasi yang dibutuhkan oleh SKPD dan dirancang sebuah sistem aplikasi yang menjadi kebutuhan dari SKPD tersebut dalam kegiatan ini telah dibangun beberapa aplikasi sebagai berikut :

Tabel 4.57 Aplikasi Yang telah dibangun oleh KPDE

No	Aplikasi	SKPD Pemakai
1.	Sistim Informasi Pemerintahan	Biro Pemerintahan
2.	Sistem Informasi Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
3.	Sistem Informasi Pertambangan dan Energi	Dinas Pertambangan dan energy
4.	Sistem Informasi Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5.	Sistem Informasi Kehutanan	Dinas Kehutanan

Terselenggaranya program ini tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana peralatan yang ada dan kerja sama antar instansi terkait, guna pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun semaksimal mungkin sehingga dapat membantu SKPD dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran.

4.1.21. Kearsipan dan Perpustakaan

4.1.21.1. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sebagai yang terdepan dalam penyajian informasi iptek dan kebudayaan serta sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam tatanan Pemerintah daerah dibidang Perpustakaan dan kearsipan, maka target-target kinerja yang harus dicapai dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah; Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional; Tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metoda pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan. Terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat dalam penemuan kembali. Terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan perpustakaan dan kearsipan.

Untuk mewujudkan itu, terdapat 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Untuk mencapai Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, didukung oleh kegiatan; pendataan dan penataan serta akuisisi dan

penelusuran arsip. Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan terlaksananya penelusuran arsip.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Masih rendahnya pengetahuan cara mengelola dan menata arsip sesuai ketentuan serta anggaran yang terbatas.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Mengusulkan penambahan tenaga fungsional arsiparis, Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya arsip dan keberadaan kantor arsip daerah dan, peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap .

2. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Untuk mencapai program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, didukung oleh kegiatan Produk perundang-undangan kearsipan dan citra Jambi dalam arsip serta peningkatan kerjasama. Dengan terlaksananya program ini, tersosialisasikannya JRA kepegawaian dan citra Jambi dalam arsip serta meningkatkan kerjasama kearsipan dengan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dengan Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip dan terbatasnya dana dalam menggalang kerjasama kearsipan. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, terus diupayakan melalui BinteK-binteK dan terus menjalin komunikasi kerjasama kearsipan dengan Provinsi tetangga.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Untuk mencapai program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan, didukung oleh kegiatan melaksanakan diklat penjenjangan arsiparis. Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pelaksanaan apresiasi kearsipan bagi pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip dan terbatasnya dana dalam menggalang kerjasama kearsipan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, terus diupayakan melalui BinteK-binteK dan terus meningkatkan apresiasi terhadap arsiparis.

4.1.21.2. Perpustakaan

Peran Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bersaing perlu meningkatkan kualitas pustakawan dan layanan perpustakaan sehingga dapat mendorong masyarakat yang belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan serta meletakkan landasan pembentukan watak kepribadian, pengamalan nilai-nilai budaya dan pola kebangsaan melalui pemberdayaan informasi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung peningkatan kualitas perpustakaan, terdapat 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Menengah

Tujuan program ini adalah terwujudnya pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Perpustakaan untuk Menurunkan

tingkat kerusakan bahan perpustakaan, dengan didukung kegiatan Fumigasi (pengasapan) terhadap buku-buku perpustakaan dan perbaikan buku-buku perpustakaan.

Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Perpustakaan serta Menurunnya tingkat kerusakan bahan perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya kesan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan hanya tempat menyimpan buku. Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan. Masih rendahnya anggaran dibidang Perpustakaan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Peningkatan koleksi perpustakaan, Peningkatan layanan perpustakaan, Peningkatan fasilitas layanan perpustakaan dan Pelestarian fisik bahan Perpustakaan.

2. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Tujuan program ini meningkatkan koleksi dan pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan minat dan budaya baca, dengan didukung kegiatan Layanan perpustakaan umum, Layanan perpustakaan keliling, identifikasi koleksi, Pameran buku, Penerbitan literature sekunder perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, penjilidan surat kabar dan majalah deposit, pengadaan bahan pustaka, Monitoring/pemantauan perpustakaan umum se Provinsi Jambi, Bimbingan minat baca dan Bintek tenaga pengelola masyarakat perpustakaan.

Dengan terlaksananya program ini, meningkatnya jumlah pengunjung serta terwujudnya perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan sehingga terwujudnya pelayanan kepada Pemustaka. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat sehingga tercapainya tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca. Terlaksananya pengembangan koleksi deposit serta koordinasi sehingga terwujudnya jumlah koleksi deposit dan pendayagunaan. Terlaksananya seleksi Buku Perpustakaan; Jumlah Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dan penerbitan litelatur sekunder sehingga tersedianya Koleksi Bahan Perpustakaan yang variatif. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi Perpustakaan sehingga terwujudnya masyarakat gemar membaca.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya kesan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan hanya tempat menyimpan buku. Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf

pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan. Rendahnya apresiasi terhadap pustakawan. Masih rendahnya anggaran dibidang Perpustakaan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Peningkatan koleksi perpustakaan, Peningkatan layanan perpustakaan, Peningkatan fasilitas layanan perpustakaan dan Pelestarian fisik bahan Perpustakaan, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Pameran perpustakaan, Publikasi melalui media cetak dan elektronik, Penyelenggaraan lomba dibidang perpustakaan, Melakukan Bimbingan dan menumbuhkan budaya baca dan menanamkan kecintaan anak sejak dini cinta terhadap Perpustakaan serta terus meningkatkan apresiasi terhadap pustakawan.

A. Capaian Kinerja

Tabel 4.58 Capaian yang telah diraih oleh BPAD Provinsi Jambi dapat dilihat dengan beberapa indikator sebagai berikut :

No	Uraian	s.d. 2010	2011
1.	Jumlah anggota perpustakaan	6.751 orang	8.951 orang
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	121.524 orang	132.461 orang
3.	Jumlah koleksi buku	142.814 buku	159.951 buku
4.	Pengelola kearsipan	40 orang	40 orang
5.	Jumlah Pustakawan	21 orang	24 orang
6.	Jumlah buku yg telah diperbaiki	4.371 eks	4.500 eks
7.	Fumigasi yg dilaksanakan	5 kali	1 kali
8.	Penjilidan majalah dan koran	15 jilid	20 jilid
9.	Jumlah karya cetak yg dpt dikumpulkan	750 eks	520 eks
10.	Jumlah entry literatur skunder	215 judul	320 judul
11.	Jumlah buku yg dialih mediakan	100 judul	200 judul
12.	Pengadaan bahan pustaka	2.400 eks	3.865 eks
13.	Pengolahan bahan pustaka	2.400 eks	3.865 eks
14.	Input data bibliografi pd pangkalan data (otomasi)	1.100 eks	1.800 eks
15.	Penyusunan literatur skunder :		
	- Katalog induk daerah	621 entri	464 entri
	- Daftar tambahan buku	118 entri	290 entri
	- Bibliografi khusus beranotasi	106 entri	70 entri
	- Abstrak laporan penelitian	37 entri	94 entri
16.	Pembuatan indeks dan laporan pemberkasan arsip	-	60.000.000,00
17.	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	-	50.000.000,00
18.	Telaksananya pameran kearsipdan	-	55.000.000,00
19.	Jumlah perpustakaan		
	a. Perpustakaan umum	85 buah	85 buah
	b. Perpustakaan perguruan tinggi	9 buah	9 buah
	c. Perpustakaan sekolah :		
	-SMA/MA	111 buah	111 buah

- SMP/MTs	220 buah	220 buah
- SD/MI	466 buah	466 buah
d. Perpustakaan khusus	104 buah	104 buah
e. Perpustakaan lainnya	4 buah	4 buah

B. Kendala dan Masalah

Adapun beberapa kendala dan permasalahan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas tenaga yang memiliki kemampuan dan kompetensi secara profesional pada masing-masing bidang, khususnya pada sub bidang perencanaan.
2. Belum mantapnya jaringan nasional antara Perpustakaan Nasional RI dengan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten / Kota maupun dengan Perguruan Tinggi se Indonesia.
3. Belum optimalnya sinergisitas dan kerjasama pengembangan perpustakaan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten / Kota dan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kementerian Agama dan Kementerian / lembaga lainnya.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perpustakaan disemua jenis perpustakaan dan kearsipan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung layanan perpustakaan dan kearsipan, masih adanya anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan dan kearsipan hanya sekedar tempat menyimpan buku dan arsip.
7. Sebagian masyarakat masih suka mendengar dan minta pendapat kepada orang-orang tertentu daripada mengambil rujukan / baca buku.
8. Masih rendahnya anggaran dibidang Perpustakaan dan kearsipan.
9. Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk.
10. Masih terbatasnya data tentang kondisi semua jenis perpustakaan di Provinsi Jambi
11. Masih kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap keberadaan Perpustakaan Umum maupun Perpustakaan Desa/ Kelurahan.
12. Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan pada sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi belum dikelola dengan baik.
13. Pemahaman dan kesadaran terhadap perpustakaan dan kearsipan relatif masih kurang.
14. Masih Terbatasnya peraturan perundang- undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
15. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka dan khasanah arsip.
16. Belum terwujudnya pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara optimal.
17. Belum diterbitkannya PP, juklak dan juknis tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

18. Masih terpisahnya gedung perpustakaan dan gedung arsip ($\pm$ 1 Km).
19. Letak gedung BPAD yang tidak strategis dan tidak representatif.

C. Langkah-langkah antisipatif

Dalam pelaksanaan program/kegiatan sudah tentu menghadapi hal –hal yang dapat mengganggu kelancaran baik secara teknis maupun non teknis untuk itu sangat perlu adanya langkah antisipatif dalam menembus kebuntuan guna mencapai target yang telah ditentukan, adapun langkah antisipatif tersebut antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Memberikan bimbingan teknis (Bintek) kepada tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Rehab/perbaikan gedung kantor Perpustakaan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan.
6. Pengadaan bahan pustaka sebanyak 23,079 eksemplar.
7. Mengajukan usul penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah.
8. Mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat)
9. Akan mengajukan usulan pembangunan gedung Perpustakaan yang representatif kepada Perpustakaan RI. Mengadakan pemilihan Pustakawan Teladan setiap tahun.
10. Melaksanakan survey ke desa-desa yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan keliling dan menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dengan kondisi daerah.

4.1.22. Badan Ketahanan Pangan

Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan selama Tahun 2011, dibiayai melalui 3 (tiga) sumber dana, yaitu ; APBD Provinsi Jambi, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program yang dibiayai oleh APBD 1(satu) program yakni :

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program peningkatan ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) aspek : yakni aspek distribusi pangan, konsumsi, ketersediaan dan keamanan pangan. Berdasarkan aspek distribusi pangan utama terutama komoditi beras dimana hasil pemantauan harga stabil, fluktuasi harga kurang dari 25%. Hal ini karena adanya kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di sentra produksi. Berdasarkan aspek konsumsi pangan. Rata-rata konsumsi energi rumah tangga di Provinsi Jambi sudah mencukupi standar yang dianjurkan yaitu mencapai 2.062 kkal/kap/hr. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah konsumsi energi rumah tangga di Provinsi Jambi sudah terpenuhi dan melebihi dari target PPH (2.000 kkal/kap/hr). Sedangkan dari aspek ketersediaan pangan, berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa : 1). Ketersediaan energi dari bahan pangan yang tersedia

untuk dikonsumsi penduduk provinsi Jambi sebesar Rp3.274 kkal/kap/hr. Angka tersebut telah melebihi AKG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2008) sebesar 2.200 kkal/kap/hr. 2). Komposisi ketersediaan energi tersebut masih belum berimbang. Energi yang bersumber dari pangan hewani masih kurang dan baru mencapai 153 kkal/kap/hr, 57,95% dari AKG sebesar 254 kkal/kap/hr.

Sedangkan untuk kelompok pangan lainnya sudah melebihi ketersediaan ideal, untuk padi-padian mencapai 143,55%, umbi-umbian 134%, minyak dan lemak 363,64%, buah biji berminyak 274,24% , kacang-kacangan 103,63%, gula 123,64% serta sayur dan buah 101,51%. Dari data ketersediaan energi tersebut dapat diketahui bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan, pada tahun 2011 sebesar 89,8.

Aspek keamanan pangan di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa terdapat penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berdasarkan hasil analisa dan pengujian secara laboratories yang dilakukan bekerjasama dengan Balai POM Jambi terhadap 59 sampel makanan jajanan anak sekolah hasil sampling dari 6 Kabupaten dan 1 Kota terdapat pelanggaran dalam penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada sampel hasil sampling yang dilarang seperti zat pewarna Rhodamin B, Boraks dan Siklamat. Sebagai tindak lanjut terhadap hasil uji petik keamanan pangan jajanan anak sekolah ini, maka disarankan agar :

- a. Dilakukan pembinaan terhadap produsen makanan jajanan anak sekolah yang bermasalah (tidak memenuhi syarat) melalui koordinasi dengan Dinas Perindag setempat
- b. Pembinaan dilakukan dengan cara bijaksana melalui pendekatan, sehingga akan tumbuh kesadaran produsen untuk tidak menggunakan BTP yang dilarang.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM di Jambi selaku unit kerja yang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap makanan, guna dilakukan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektifitas penyebaran informasi mutu dan keamanan pangan maka akan dilakukan sosialisasi melalui penyebaran leaflet oleh Sekretariat Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota maupun langsung kepada kelompok masyarakat.

4.1.23. Penyuluhan Pertanian

Urusan wajib penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jambi. Untuk mencapai berbagai sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka telah dilaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan antara lain; Pemberdayaan kelembagaan tani; pengembangan informasi dan teknologi penyuluh; penyusunan data base statistik kelembagaan penyuluh wilayah; monitoring dan evaluasi penyuluhan; koordinasi perencanaan dan perumusan program penyuluhan; Pemberdayaan kelembagaan tani; pekan daerah; pembinaan dan pelatihan SDM penyuluh dan petani.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, didapat output dan hasil dari kegiatan antara lain;

1. Terlaksananya pembinaan lembaga penyuluhan Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dengan hasil terciptanya keterpaduan dan sinergi program penyuluhan pada setiap tingkatan.

2. Tercetaknya Banner informasi teknologi penyuluhan pertanian dengan hasil terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat/petani dan kelompok tani.
3. Tersusunnya data base statistik kelembagaan penyuluh dengan hasil tersedianya data base statistik kelembagaan penyuluh.
4. Terlaksananya Pekan Daerah Pertanian dan Perikanan Provinsi Jambi untuk persiapan mengikuti Pekan Nasional Pertanian dan Perikanan ke 13 tahun 2011 di Kabupaten Tenggara. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, bahwa Provinsi Jambi dapat mengikuti berbagai even yang diperlombakan pada PENAS dan adanya peningkatan wawasan serta pengetahuan petani.
5. Teridentifikasinya perkembangan kelembagaan penyuluh di Provinsi Jambi, dengan hasil kegiatan adanya solusi dalam pemecahan berbagai permasalahan pengembangan kelembagaan penyuluh.

Akumulasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dicapai indikator program pembangunan penyuluhan yaitu :

1. Peningkatan jumlah balai penyuluh dan poslul di Provinsi Jambi sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.59 Data Balai penyuluhan, Penyuluh dan poslul yang ada di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	BPP	Penyuluh	Poslul
1	Jambi	8	62	8	48	4
2	Ma. Jambi	11	152	8	119	-
3	Batanghari	8	113	8	101	62
4	Tebo	12	105	12	106	-
5	Bungo	17	144	13	184	131
6	Sarolangun	10	141	10	165	29
7	Merangin	24	203	15	222	120
8	Tanjab Timur	11	93	11	96	-
9	Tanjab Barat	13	71	13	72	-
10	Kerinci	12	209	12	225	75
11	Sungai Penuh	5	69	5	56	-
12	Provinsi	-	-	-	21	
J u m l a h		131	1,362	115	1415	421

*)Data Dari Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penyuluhan Set. Bakorluh 2011

2. Peningkatan jumlah kelembagaan tani di Provinsi Jambi.
 - a) Kelompok Tani

Kelembagaan tani mengalami peningkatan dari 14 persen pada tahun 2005 menjadi 17 persen di tahun 2011 atau terjadi peningkatan setiap tahunnya lebih kurang 20%.

Perkembangan kelanjutan dari kelembagaan tani terutam pada tingkat kemampuan kelompok tani disetiap tingkatan , untuk tingkat BDK ; 20%, Pemula; 45%, Lanjut; 28%, Madya; 7%, Utama% hal ini tingkat kemampuan kelompok tani di nominasi oleh Pemula dan lanjut.

Tabel 4.60 Data kelompok tani Kabupaten kota se provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota	Tingkat Kemampuan				
						BDK	P	L	M	U
1	Batang Hari	8	113	714	19.930	109	375	220	26	1
2	Sarolangun	10	141	616	16.014	-	250	336	30	-
3	Bungo	17	144	725	18.491	222	349	140	12	2
4	Tanjab Barat	13	70	813	22.064	164	423	203	23	-
5	Kota Sei. Penuh	5	68	448	9.485	175	184	80	9	-
6	Kerinci	12	209	1.311	31.356	430	505	322	52	2
7	Tebo	12	105	503	21.225	-	73	106	21	1
8	Kota Jambi	8	62	125	2.687	2	35	55	31	2
9	Tanjab Timur	11	93	1.110	19.895	203	282	185	119	19
10	Merangin	24	203	1.113	35.968	132	389	436	149	18
11	Muara Jambi	8	152	1.035	16.512	-	678	315	42	-
JUMLAH		128	1.361	8.377	213.627	1.561	3.297	2.099	495	48

b) Gapoktan

Kondisi Gapoktan sampai tahun 2011, untuk Gapoktan Puap berjumlah 652 gapoktan dan selebihnya gapoktan LDPM- Luep, Lumbung Pangan dan mandiri pangan, yang telah mencapai satu Gapoktan satu desa sehingga masih kurang 260 Gapoktan.

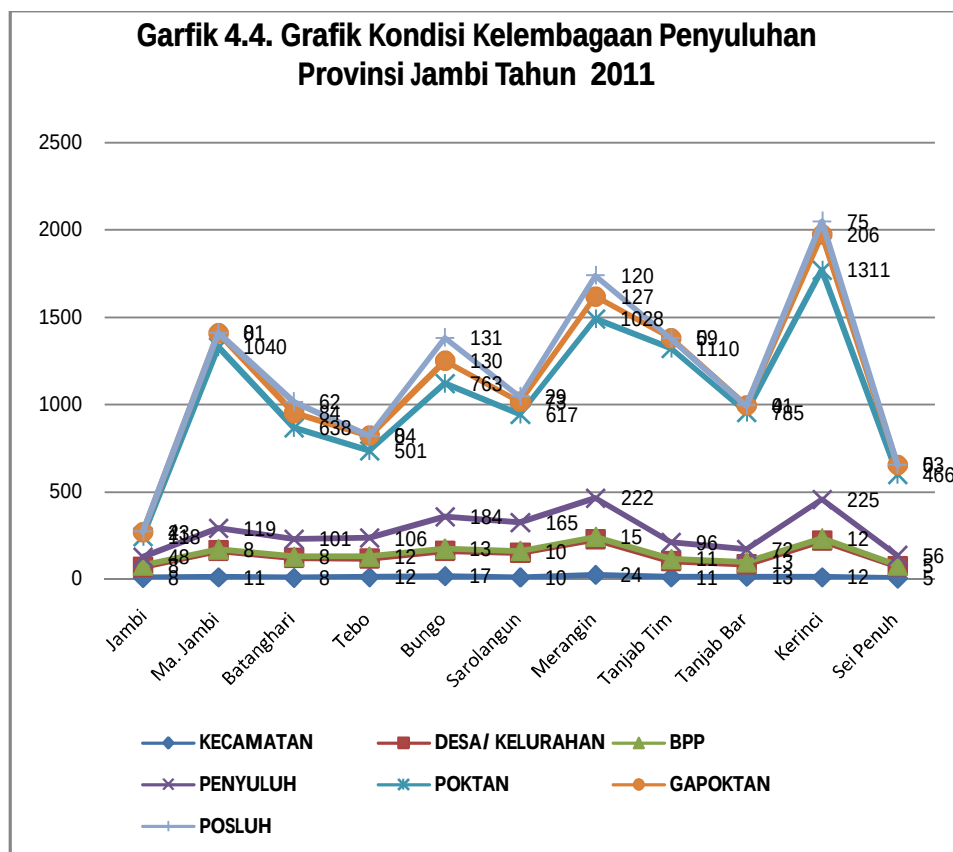
Tabel 4.61 Kondisi Gapoktan Provinsi Jambi 2011

NO	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	Poktan	Gapoktan
1	Jambi	8	62	125	24
2	Ma. Jambi	11	151	1.035	143
3	Batanghari	8	113	714	108
4	Tebo	12	106	503	103
5	Bungo	17	146	725	107
6	Sarolangun	10	141	616	131
7	Merangin	24	203	1	149
8	Tanjab Tim	11	93	1	93
9	Tanjab Bar	13	70	813	70
10	Kerinci	12	209	2	122

11	Sei Penuh	5	69	448	53
12	Provinsi	-	-		
Jumlah		131	1	9	1.103

c) Kelembagaan Penyuluhan

Gambar 4.16 Grafik Kondisi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi Jambi Tahun 2011



d) Kelembagaan tani

Jumlah kelembagaan tani (kelompok tani) di Provinsi Jambi sebanyak 8.377 Kelompok tersebar di 1.362 Desa/ kelurahan 131 desa kecamatan dan 11 Kabupaten /kota. Dari jumlah kelompok tani tersebut yang terbanyak Kabupaten Kerinci sebanyak 1.137 Kelompok ,Kabupaten Merangin 1.060 kelompok, Kabupaten Kabupaten Tanjab Timur 796 Kelompok, Tanjab Barat 785 Kelompok.

4.2 URUSAN PILIHAN

4.2.1. Pertanian

4.2.1.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada dasarnya

merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir.

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai SKPD yang melaksanakan sebagian dari fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pertanian pada tahun anggaran 2011 memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp14.855.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai 9 program dengan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Dari program prioritas tersebut, pada tahun 2011 Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar 42.065 ton atau sebesar 6,69% jika dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 628.828 ton GKG menjadi 670.893 ton GKG pada tahun 2011. Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,67 Kw/Ha (1,65%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 7.636 Ha (4,96%).

Namun demikian, produktivitas tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, yaitu sebesar 43,58 Kw/Ha, sementara produktivitas yang telah dicapai adalah sebesar 41,53 Kw/Ha. Hal tersebut disebabkan adanya musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2011, sehingga lahan-lahan yang biasa ditanami padi ladang menjadi lebih kering dan pecah-pecah serta tidak memungkinkan untuk ditanami karena ketersediaan air tanahnya juga diragukan keberadaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan jadwal tanam dan pergeseran musim tanam.

Komoditi Kedelai juga mengalami peningkatan produksi pada tahun 2011 yaitu dari 5.320 ton pada tahun 2010 menjadi 6.842 ton, atau meningkat sebesar 1.522 ton (28,61%), yang disebabkan karena peningkatan luas panen seluas 1.164 Ha (27,43%), demikian juga produktivitas kedelai yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 Kw/Ha (0,93 %) dibanding tahun sebelumnya.

Untuk komoditi jagung, terjadi penurunan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010 dari 30.691 ton menjadi 27.637 ton pada tahun 2011 atau mengalami penurunan sebesar 3.054 ton (9,95)%. Penurunan produksi jagung ini terjadi karena adanya pengurangan luas panen sebesar 979 Ha (11,82%) yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim dan bencana alam kekeringan, sehingga banyak lahan produktif dan pertanaman yang mengalami puso akibatnya terjadi pergeseran jadwal tanam.

Tabel 4.62 Perkembangan Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2010–2011

No	Uraian	2010	Aram III 2011	Perkembangan 2011 Thdp 2010
----	--------	------	------------------	--------------------------------

				(+/-)	(%)
1.	<u>LUAS PANEN (Ha)</u>				
	Padi	153.897	161.533	7.636	4.96
	- Padi Sawah	124.557	136.321	11.744	9.43
	- Padi Ladang	29.320	25.212	-4.108	-14,01

No	Uraian	2010	Aram III 2011	Perkembangan 2011 Thdp 2010	
				(+/-)	(%)
	Jagung	8.280	7.301	-979	-11,82
	Kedelai	4.243	5.407	1.164	27.43
	Kacang Tanah	1.469	1.315	-154	-10,48
	Kacang Hijau	416	407	-9	-2,16
	Ubi Kayu	2.895	2.839	-56	-1,93
	Ubi Jalar	2.200	2.659	459	20,86
2.	<u>PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)</u>				
	Padi	40,86	41,53	0,67	1,65
	- Padi Sawah	43,15	43,54	0,39	0,91
	- Padi Ladang	31,15	30,69	-0,46	-1,47
	Jagung	37,07	37,85	0,78	2,12
	Kedelai	12,54	12,65	0,12	0,92
	Kacang Tanah	12,14	12,56	0,43	3,5
	Kacang Hijau	11,11	11,15	0,05	0,44
	Ubi Kayu	136,66	137,99	1,33	0,97
	Ubi Jalar	96,3	231,08	134,78	140
3.	<u>PRODUKSI (Ton)</u>				
	Padi	626.828	670.893	42.065	6,69
	- Padi Sawah	537.505	593.520	56.015	10,42
	- Padi Ladang	91.323	77.373	-13.950	-15,27
	Jagung	30.691	27.637	-3.054	-9,95
	Kedelai	5.320	6.842	1.522	28,61
	Kacang Tanah	1.783	1.652	-131	-7,35
	Kacang Hijau	462	454	-8	-1,73
	Ubi Kayu	39.564	39.175	-389	-0,98
	Ubi Jalar	21.185	61.445	40.260	190

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2011, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 95,73 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 93,96. Perkembangan NTP tahun 2011 selengkapnya dapat dilihat ada tabel berikut ini

Tabel 4.63 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Selama Tahun 2011

No.	Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)
-----	-------	--------------------------

		Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
1.	Januari	96,84	96,77
2.	Februari	96,59	95,58
3.	Maret	96,39	94,88
4.	April	96,18	95,05
5.	Mei	96,89	94,76
Nilai Tukar Petani (NTP)			
No.	Bulan	Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
6.	Juni	96,48	94,21
7.	Juli	96,04	94,29
8.	Agustus	94,96	93,00
9.	September	94,78	93,15
10.	Oktober	94,81	91,32
11.	November	95,50	92,07
12.	Desember	94,32	92,44
Rata-rata		95,82	93,96

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2011, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

- Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.
- Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
- Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprota, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usahatani menikmati nilai tambah yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain : 1) Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll, 2) Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah

kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan, 3) Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar, 4) Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak, 5) Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan 6) Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam rangka adopsi dan aplikasi penerapan teknologi yang sesuai dengan rekomendasi, sehingga nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan produksi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan 3 kegiatan yaitu : a) Diklat Pasca Panen dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebanyak 1 angkatan dengan melibatkan 50 orang petani yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sebagai peserta; b) Diklat Agribisnis Kentang/Sayuran sebanyak 3 angkatan yang melibatkan 85 orang petani yang telah ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya, dan c) Diklat Agribisnis Padi Organik melatih petani sebanyak 25 orang dalam 1 angkatan.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini secara umum bertujuan mendorong terjadinya ketahanan pangan masyarakat. melalui pendekatan pengembangan kawasan, produksi dan sistem serta kelembagaan. Guna mendukung program tersebut maka dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan rancangan penyusunan program, anggaran, pengumpulan dan pelaporan serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui APBD Provinsi Jambi Tahun 2011 sebesar Rp775.937.500,00, melaksanakan program ini dengan melakukan kegiatan Pertemuan Mantri Tani, Rapat Teknis, Kegiatan Seminar serta Gelar Teknologi Pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan tujuan antara lain : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran organik, dan tanaman hias, 3) Meningkatkan pengembangan hortikultura, 4) Meningkatkan ketersediaan benih padi, benih sumber kedelai, jagung dan kacang tanah, benih sumber BPMT, kentang G1, G2 dan G3 di BBU, 5) Meningkatkan ketersediaan benih di penangkar, dan 6) Meningkatkan kelompok penangkar benih, dan meningkatnya ketersediaan benih padi gogo dan benih padi dataran tinggi hasil pemurnian.

Melalui Dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2011 sebesar Rp7.850.275.500,00, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan program

ini melalui kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Akselerasi Peningkatan produksi Padi yang dilaksanakan di 11 kab/kota, 2) Pengembangan Sentra Jagung komposit seluas 50 Ha yang tersebar di 11 kab/kota, 3) Perbanyak benih sumber palawija dengan capaian meningkatnya ketersediaan benih sumber kedelai label ungu sebanyak 3 ton, benih jagung label ungu sebanyak 3 ton, serta benih kacang tanah sebanyak 750 kg, 4) Perbanyak benih padi unggul bermutu seluas 10 Ha di Kecamatan Lubuk Ruso, Kabupaten Batang Hari dengan peningkatan ketersediaan benih padi unggul bersertifikasi sebanyak 15 ton, 4) Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik di petani dan pondok pesantren di 10 kab/kota, dan 5) Pengembangan Teknologi PHT berbasis Agens Hayati, yang dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu Kec. Air Hitam (Sarolangun), Kec. Bram Itam (Tanjung Barat), Kec. Muara Tembesi (Batang Hari), Kec. Berbak dan Muara Sabak (Tanjatim).

4. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/Sarana Prasarana Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : a) Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan secara 6 tepat, b) Meningkatkan pembinaan pengembangan alsin dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan operator UPJA, c) Meningkatkan kelompok P3A/GP3A berprestasi, d) Meningkatkan kelompok tani TAM berprestasi, e) Meningkatkan ketersediaan SID cetak sawah, dan f) Meningkatkan produktivitas lahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2011 melalui dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 2.229.285.000,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1) kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilakukan di 11 kab/kota di Provinsi Jambi; 2) kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, dimana melalui kegiatan ini telah terlaksana pengadaan alat dan mesin pertanian seperti hand tractor standar sebanyak 20 unit, hand tractor modifikasi sebanyak 5 unit, dan power thresher sebanyak 7 unit, Pembelajaran operator UPJA ke pabrikaan yaitu ke Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 orang, demonstrasi dan aplikasi teknis alsintan sebanyak 40 orang dan evaluasi pengembangan alsintan sebanyak 22 orang; dan 3) kegiatan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Tata Air Mikro (TAM), dimana melalui kegiatan ini telah terbina kelompok pengelola TAM di 4 kabupaten/kota, yaitu Tanjung Jabung Barat (600 ha), Tanjung Jabung Timur (600 ha), Kerinci (600 ha) dan Sungai Penuh (200 ha).

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional)

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional) mempunyai tujuan antara lain : meningkatkan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan promosi dan pelayanan informasi pasar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui APBD Provinsi Jambi tahun 2011 sebesar Rp257.203.000,00 telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen, Pengembangan Mutu, Standarisasi dan Sertifikasi Produk Tanaman Pangan, Pengembangan Pengolahan Hasil TPH dan Pengembangan Pemasaran Hasil TPH. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui

Apresiasi Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Pangan, Temu Usaha Penggilingan Padi se-Indonesia serta Bintel Pelayanan Informasi Pasar dan Fasilitasi Petugas PIP.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 menargetkan PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp161.000.000,00 (287,5%) dibanding target tahun 2010 yaitu sebesar Rp56.000.000,00. Realisasi tahun 2011 sebesar Rp165.056.000,00 (102,52%). Target dan Realisasi PAD Tahun 2011 dibandingkan 2010 seperti tertera pada tabel 4.59 berikut;

Tabel 4.64 Target dan Realisasi PAD Tahun 2010 - 2011 Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

dalam ribuanrupiah

No	BBI/Taman Anggrek	Tahun 2010			Tahun 2011			% Realisasi 2011 : 2010
		Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BBI Sukajaya Padi	15.000	15.530	103,5	56.000	50.036	100,1	360,82
2.	BBI Palawija Sebapo	14.500	29.150	201	45.000	47.370	105,3	162,5
3.	BBI Palawija Alai Ilir	3.000	3.780	126	-	-	-	-
4.	BBI Hortikultura Sungai Tiga	10.000	10.625	106,3	16.000	16.150	100,9	152
5.	BBI Kentang Kayu Aro	9.000	9.020	100,2	20.000	20.000	100	221,73
6.	BBU Kentang Jangkat	2.000	2.000	100	20.000	20.000	100	1.000,00
7.	Taman Anggrek	2.500	2.500	100	4.000	5.500	137,5	220
Jumlah		56.000	72.605	129,7	161.000	165.056	102,5	227,33

4.2.1.2. Perkebunan

Pada tahun anggaran 2011 sektor perkebunan melalui Dinas Perkebunan provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi melalui APBD Murni sebesar Rp8.200.000.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp10.171.300.000,00 dengan total dana Rp18.371.300.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan RSPO, Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan, Pelatihan Petani dan Petugas dalam Penentuan Kadar Karet Kering, Pembinaan Penangkar Benih Perkebunan dan Pelatihan Petugas Pengawas Benih Tanaman serta pemberdayaan pondok Pesantren di bidang perkebunan juga pembibitan kelapa sawit bersubsidi.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan program ini adalah dengan meningkatkan

promosi dan Peluang Pasar serta Kerjasama IMT-GT, peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB), Pembinaan dan Informasi Harga Pasar Lelang Karet serta Agribisnis Pemanfaatan Sabut dan Tempurung Kelapa, Pengawasan Peredaran Mutu Bibit Perkebunan dan Tata Niaga TBS serta Penerapannya, juga pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian telah dilakukan Fasilitas Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP), Pelatihan SID Aspek Pengelolaan Lahan dan Air, Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH, Perbanyakan, Penyebaran dan BinteK Perbanyakan Agens Hayati, Pembinaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB, Penyediaan Sarana Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan utama yang dilakukan dengan anggaran yang cukup besar, antara lain :

- 1) Pengembangan Karet Rakyat seluas 1.500 Ha. Kegiatan ini telah dimulai tahun 2006 yang lalu sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan peremajaan dan pengembangan karet rakyat melalui berbagai sumber pembiayaan seluas 86.127,4 Ha. Pengembangan karet sumber dana APBD P Provinsi tahun 2011 ini, dilaksanakan seluas 1.500 Ha yang didistribusikan bagi 7 kabupaten yaitu : Ma. Jambi 100 ha, Kabupaten Batanghari 250 ha, Kabupaten Bungo 250 ha, Kabupaten Tebo 275 ha, Kabupaten Sarolangun 275 ha, Kabupaten Merangin 300 ha dan Tanjab Barat 50 ha.
- 2) Pengembangan Kopi Robusta seluas 50 Ha yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberikan dampak multi efek juga bagi peremajaan kebun kopi rakyat, meningkatkan penggunaan benih unggul kopi, meningkatkan produktivitas kopi rakyat, meningkatkan pendapatan petani kopi serta menggerakkan ekonomi di pedesaan wilayah sentra kopi. Adapun sejak tahun 2006 s/d tahun 2011 kebun kopi rakyat yang telah diremajakan adalah seluas 540 Ha.
- 3) Pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi sepanjang 104,5 km melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 telah dilaksanakan Pengembangan/peningkatan Jalan Produksi sepanjang 149,5 km. Jalan Produksi ini dilaksanakan di wilayah perkebunan rakyat, kondisi fisik jalan berupa pembentukan badan jalan selebar 6 m termasuk bahu dan parit dikedua sisinya serta diberi pengerasan. Adapun kegiatan ini memberikan manfaat bagi petani perkebunan berupa : membuka akses ke areal perkebunan rakyat, melancarkan transportasi dari dan ke kebun dalam pengangkutan sarana produksi dan produk hasil, serta membuka peluang pemasaran, sehingga meningkatkan harga jual dan menambah pendapatan petani, selain itu juga meningkatkan nilai harga lahan/kebun.
- 4) Pengembangan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 950 Ha melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 s/d 2010 telah dilaksanakan Pengembangan /peningkatan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 2.302 ha. Tata Air Mikro ini dilaksanakan di wilayah perkebunan kelapa rakyat di areal pasang surut, kondisi fisik Tata air mikro berupa

embentuk parit-parit dan pintu air sederhana diantara blok-blok kebun kelapa. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dalam mengatur keluar masuknya air pasang, mengurangi dampak mengendapnya zat logam yang beracun bagi tanaman kelapa dan menghindari tergenangnya lahan.

- 5) Pembibitan Kelapa Sawit Bersubsidi sebanyak 70.000 batang. Adapun manfaat kegiatan ini adalah menekan penggunaan dan peredaran bibit kelapa sawit palsu, memenuhi kebutuhan petani akan benih unggul dengan harga terjangkau serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat. Komoditi kelapa sawit dan karet mempunyai harga yang cukup baik sepanjang tahun 2011 dan tidak terlalu berfluktuasi.

4.2.1.3. Peternakan

Pada tahun anggaran 2011 bidang peternakan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp10.113.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai program berikut:

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
4. Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

Keempat program utama tersebut diuraikan menjadi berbagai kegiatan, dengan lokasi kegiatan tersebar di 11 Kab/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Program pembangunan peternakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan penyakit hewan yang bersifat zoonosis (menular kepada manusia) strategis. Penyakit hewan strategis yang ditangani adalah SE (*Septicaemia epizooticae*), *Brucellosis*, AI (*Avian Influenza*), *Anthrax* dan *Rabies*. Untuk itu melalui program ini telah dilaksanakan vaksinasi SE terhadap ternak besar sebanyak 7.010 dosis; vaksinasi rabies sebanyak 2.000 dosis dan sosialisasi tentang penyakit rabies melalui penyebaran brosur rabies sebanyak 1.000 lembar.

Dalam menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka difungsikan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner). Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan spesimen hewan, pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan yang dikirimkan oleh instansi teknis Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel secara langsung untuk jenis penyakit tertentu pada daerah yang diduga berpotensi sebagai sumber penular penyakit hewan strategis. Kegiatan laboratorium pada tahun 2011 antara lain berupa pembelian bahan kimia, pengadaan alat-alat laboratorium, pelayanan aktif servis deteksi dini dan pembinaan Lab Type C, pertemuan dan koordinasi laboratorium serta pengambilan sampel PAH/HPAH berupa susu, bakso, sosis, abon, nugget, daging sapi/kerbau, daging kambing dan dendeng.

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan penyediaan daging ternak besar (sapi dan kerbau) dalam menunjang program

nasional swasembada daging sapi 2014. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pengembangan kawasan peternakan. Khusus untuk kawasan peternakan sapi potong, kegiatan utama yang dilakukan adalah peningkatan populasi melalui pemasukan sapi betina bibit serta perbaikan mutu genetis ternak melalui penerapan IB (Inseminasi Buatan).

Pada tahun 2011 melalui dana APBD Provinsi Jambi telah dilakukan penyebaran ternak sapi bibit sebanyak 55 ekor (50 ekor betina dan 5 ekor jantan) dengan lokasi penyebaran ternak di Kabupaten Merangin. Melalui kegiatan Kota Terpadu Mandiri (KTM) telah dilaksanakan penyebaran ayam buras (20 ekor jantan dan 180 ekor betina) di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun. Sedangkan upaya untuk menjaga gejolak harga daging menjelang lebaran telah dilakukan pengadaan sapi penggemukan untuk penyangga kebutuhan lebaran, yang disebarkan di Kabupaten Muaro Jambi 230 ekor dan Kabupaten Batanghari 100 ekor. Berkaitan dengan penyebaran ternak pemerintah maka diperoleh PAD (Pemasukan Asli Daerah) yang bersumber dari gaduhan ternak sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.65 Capaian Target PAD dari Ternak Pemerintah Tahun 2011

No.	Jenis Penarikan	Jumlah		%
		Target	Realisasi	
1.	Penjualan ternak tidak layak bibit, ternak sapi dan potong paksa	94.040.000	251.338.000	267,26
2.	Penjualan ternak penggemukan	965.250.000	993.852.500	102,96

Pada tahun 2011 ditargetkan kelahiran anak hasil IB sebanyak 6500 ekor. Untuk memberikan motivasi kepada petugas IB (Inseminator) dalam upaya pencapaian target kelahiran anak hasil IB maka diberikan insentif sebesar Rp50.000,00 per kelahiran melalui Inseminasi Buatan. Realisasi kelahiran anak hasil IB pada tahun 2011 sebanyak 3.363 ekor atau sebesar 66,15% dari target kelahiran. Masih belum tercapainya target IB ini salah satunya disebabkan karena terbatasnya petugas inseminator dan sarana pelayanan IB.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja petugas IB dilapangan maka dilaksanakan pertemuan yang bertujuan menambah pengetahuan dan menggali permasalahan dilapangan untuk perbaikan kinerja serta meningkatkan silaturahmi antar petugas berupa Pertemuan Apresiasi Petugas IB se-Provinsi Jambi dan Pertemuan Evaluasi Kinerja Petugas IB.

Dalam rangka menggugah dan memotivasi peternak untuk mengawinkan ternaknya melalui Inseminasi Buatan, dilaksanakan pula kegiatan Promosi Anak Hasil IB melalui lomba anak hasil IB se Provinsi Jambi dengan hasil lomba sebagai berikut :

- ✓ Juara I : Ternak Sapi Bali milik Karyanto dari Kabupaten Tebo
- ✓ Juara II : Ternak Sapi Bali milik Karyadi dari Kabupaten Bungo
- ✓ Juara III : Ternak Sapi Bali milik Sardi dari Kabupaten Merangin

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan program ini dipusatkan di Kebun Binatang Taman Rimba, Kota Jambi. Pada tahun 2011, total dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.421.912.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian pakan satwa, pembelian obat-obatan, pembangunan kandang harimau, pembangunan rumah jaga, pembangunan sarana taman, penimbunan tanah dan pembangunan kandang orang utan. Kebun binatang Taman Rimba pada tahun 2011 mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp1.203.000.000,00 dari target sebesar Rp600.000.000,00.

4. Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

Pada program ini dilakukan kegiatan pengawasan peredaran pangan asal hewan berupa pemeriksaan sampel :

- a. Daging sapi sebanyak 30 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- b. Daging ayam sebanyak 30 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- c. Bahan olahan sebanyak 120 sampel di pasar dalam 11 kab/kota

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cemaran mikroba TPC (total plate count) mencapai 100%, Coliform mencapai 13,33% Salmonella dan E. Coli Negatif. Hal ini menunjukkan bahwa PAH yang diuji sangat tinggi cemaran mikroba, yang disebabkan antara lain penanganan PAH mulai dari tempat produksi sampai di pasar-pasar masih jauh dari standard baik. Dari pemeriksaan sampel olahan diperoleh hasil bahwa PAH yang beredar di pasaran tidak ada yang mengandung oplosan daging babi atau daging lain yang tidak aman. Hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada instansi teknis Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

4.2.2. Kehutanan

Pada Tahun Anggaran 2011 bidang kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp7.050.597.000,00. Untuk mendanai 6 Program dan 21 kegiatan. Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2011 yang dibiayai oleh APBD :

1. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ini secara umum memiliki tujuan agar terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp254.268.300,00 melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2011. Dalam rangka mendukung program ini telah dilaksanakan dua kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan.

Melalui kegiatan inventarisasi potensi hutan telah dilakukan inventarisasi potensi pada 5 Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp96.268.300,00 dan terealisasi sebesar Rp83.148.300,00 atau sebesar 86,4%.

2. Kegiatan Restrukturisasi Industri Kehutanan, Optimalisasi PNPB dari SDA sektor Kehutanan.

Kegiatan restrukturisasi industri kehutanan, optimalisasi PNPB dari SDA sektor kehutanan bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan

daerah melalui revitalisasi industri kehutanan dengan bahan baku yang legal dan berkelanjutan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Kegiatan ini dilakukan pada 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi, dengan anggaran sebesar Rp158.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp157.396.500,00 atau sebesar 99,6%.

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan ini didukung oleh 9 kegiatan yaitu :

1. kegiatan pembuatan tanaman unggulan lokal, fasilitasi pembangunan HTR, HD dan HKm;
2. kegiatan Orientasi batas kawasan hutan dan sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan;
3. kegiatan identifikasi konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan;
4. kegiatan pelacakan dan penegasan batas kawasan hutan;
5. kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan;
6. kegiatan monitoring pinjam pakai kawasan hutan;
7. kegiatan penelitian terpadu terhadap usulan perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi;
8. kegiatan identifikasi lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi;
9. kegiatan pembinaan peningkatan produksi pangan melalui kegiatan tumpang sari, Corporate Social Responsibility (CSR) areal HTI, HPH, HTR, HD, HKm dan Climate Change.

Total dana untuk program ini adalah sebesar Rp2.733.236.700,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.202.686.310,00 atau sebesar 80,59%. Keberhasilan program ini dapat dilihat antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan penanaman perempuan tanam danelihara pohon tingkat Provinsi Jambi.
2. Terlaksananya pemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam pada tahun sebelumnya.
3. Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 Demplot HTR.
4. Terlaksananya orientasi batas sesuai target yaitu 279 km dan sosialisasi tata batas di 11 kecamatan dalam Provinsi Jambi.
5. Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 3 kasus tindak pidana kehutanan.
6. Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di tahun 2012 mendatang.

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini memiliki satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan total dana sebesar Rp200.000.000,00. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan secara optimal dan lestari, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan sekaligus meningkatnya tutupan lahan dan terjaganya kawasan hutan dari

perambahan/*illegal logging*. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp174.670.800,00 atau sebesar 87,3%.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program ini dilaksanakan dengan total dana Rp3.320.985.000,00, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan anggaran sebesar Rp373.000.000,00, terealisasi sebesar Rp268.721.700,00 atau sebesar 72,04%. Dalam kegiatan ini dilakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 10 Kab/Kota di Provinsi Jambi, pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur, bekerjasama dengan BLHD Provinsi Jambi melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 2 Kabupaten serta mengadakan Bimbingan Teknis ke 3 Kabupaten di Provinsi Jambi dalam penggunaan alat deteksi hospot.

2) Kegiatan pembangunan Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari
Kegiatan ini mempunyai jumlah anggaran Rp600.000.000,00 dan pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp579.835.000,00 atau sebesar 96,64%. Dalam kegiatan ini di Taman Hutan Kenali telah dibangun Track Jogging sepanjang 400 m, pagar sepanjang 100 m, dan penyelesaian Balai Pertemuan. Di Kebun Raya Bukit Sari dibangun pagar sepanjang 40 m, serta Rumah Informasi.

Dengan dilakukannya pembangunan-pembangunan di atas diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi dari Taman Hutan Kenali selain nilai jasa lingkungannya, serta dapat terjaganya Kebun Raya Bukit Sari dari Perambahan dan menambah kontribusinya dalam Ilmu Pengetahuan.

3) Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan
Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp822.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp650.032.300,00 atau sebesar 79,8%. Dalam kegiatan ini telah dilakukan patroli pengamanan hutan dari perambahan di 8 Kabupaten di Provinsi Jambi, Koordinasi pengamanan hutan di 9 Kabupaten serta pemberkasan 3 perkara pidana kehutanan.

4) Kegiatan Penyuluhan Kehutanan
Kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp174.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp156.311.500,00. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan dan membentuk pola pikir masyarakat agar ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di 9 Kabupaten se Provinsi Jambi. Selain itu juga dengan dukungan dana APBN, telah terealisasi Sosialisasi peningkatan keterampilan aparatur penyuluhan di Provinsi Jambi.

5) Kegiatan Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias
Kegiatan yang bekerjasama dengan DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Provinsi Jambi ini mempunyai jumlah anggaran Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp160.811.500 atau sebesar 94,59%. Pada pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan seminar budidaya anggrek yang diselenggarakan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta mengikuti Pameran Anggrek Alam di Denpasar dengan mendapatkan Juara *The Best Other Hybrid*, Juara 1

untuk 2 katagori anggrek, Juara 2 untuk 1 katagori anggrek dan Juara 3 untuk 1 katagori anggrek.

6) Kegiatan Pengawasan dan Monitoring HPH/HPHTI

Dalam kegiatan ini dilakukan monitoring atas aktivitas pemanfaatan lahan hutan pada HTI sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan dan monitoring HPH/HPHTI ini adalah sebesar Rp123.950.000,00 dan telah terealisasi Rp64.266.500,00 atau sebesar 51,85%.

7) Kegiatan Pengelolaan Tahura Sekitar Tanjung

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga Tahura Sekitar Tanjung dari perambahan dan terkelolanya Tahura sesuai fungsinya. Untuk menunjang tercapainya tujuan kegiatan ini telah diadakan sarana dan prasarana pengamanan dan sosialisasi, dilakukannya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 50 ha. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.057.835.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp841.133.300,00.

5. Program Pengumpulan Data, Statistik dan Pemantapan Sistem Informasi/Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Program ini mempunyai satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan Pusat Informasi Kehutanan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp367.107.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp349.876.249,00 atau sebesar 95,31%. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi kehutanan Provinsi Jambi serta meningkatnya pengelolaan sektor kehutanan lewat kemudahan aksesibilitas dan ketransparanan informasi. Pada tahun 2011 melalui kegiatan ini telah terlaksana pameran pembangunan kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengikuti Jambi Emas Expo, serta Kongres Kehutanan Indonesia Tahun 2011 di Jakarta.

6. Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan.

Memiliki satu kegiatan prioritas yaitu kegiatan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp175.000.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2011 adalah sebesar 94,3%. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan suatu perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dan dapat mendukung visi dan misi Gubernur terpilih. Dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja, diharapkan berdasarkan perencanaan yang baik akan diperoleh realisasi kegiatan yang mengena pada sasaran. Realisasi dari kegiatan perencanaan dan monitoring evaluasi ini adalah telah terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011, terwujudnya Rencana Kerja Anggaran dan DPA Tahun 2012, tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2011.

4.2.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral

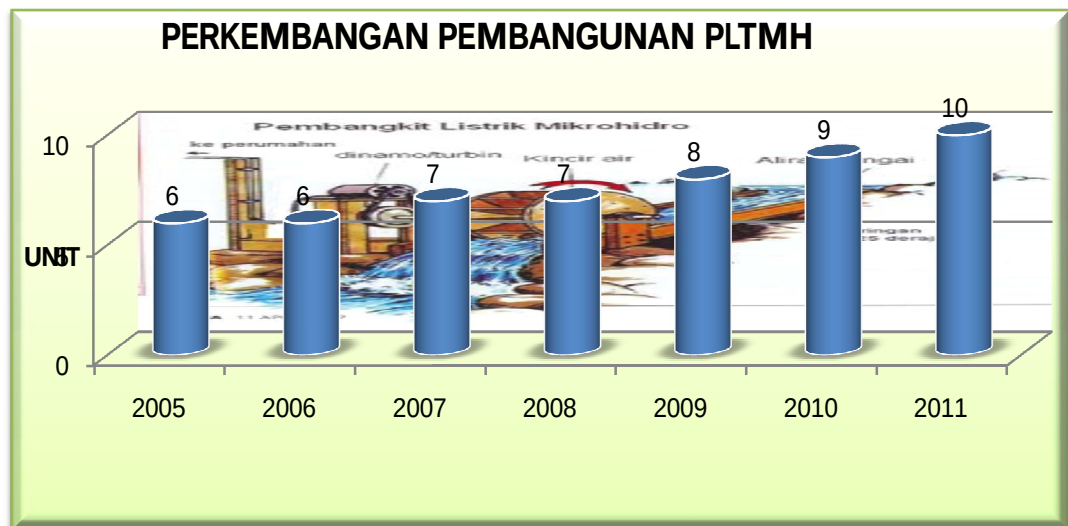
Pada tahun anggaran 2011 bidang energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memperoleh anggaran sebesar Rp4.441.914.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp4.279.987.423 atau sebesar 96,35% yang diarahkan untuk 5 program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Energi

Program Pengembangan energi bertujuan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana penyediaan energi bagi masyarakat. Ada 2 kegiatan utama dalam Program Pengembangan Energi, yaitu Pembangunan PLTMH dan jaringan, terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PT. PLN (persero), serta Pembangunan Biogas sebagai energi baru terbarukan. Untuk kegiatan Pembangunan dan Pengawasan pemanfaatan PLTMH, Jaringan dan Trafo, memperoleh alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000 ,00 yang dialokasikan untuk pembangunan PLTMH dan jaringan sebanyak 1 unit di Kabupaten Bungo serta pengadaan trafo di Kabupaten Merangin dengan daya 200 KVA sebanyak 1 unit dan 50 KVA sebanyak 1 unit.

Secara keseluruhan hingga tahun 2011 telah terbangun PLTMH sebanyak 10 unit yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo. PLTMH ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yang sampai saat ini atau diperkirakan dalam 10 tahun ke depan belum tentu bisa mendapat listrik PLN, karena lokasinya cukup terpencil namun mempunyai potensi air terjun sebagai penggerak turbin PLTMH. Untuk melihat perkembangan jumlah PLTMH dari tahun 2005 – 2011 yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tergambar pada grafik di bawah ini.

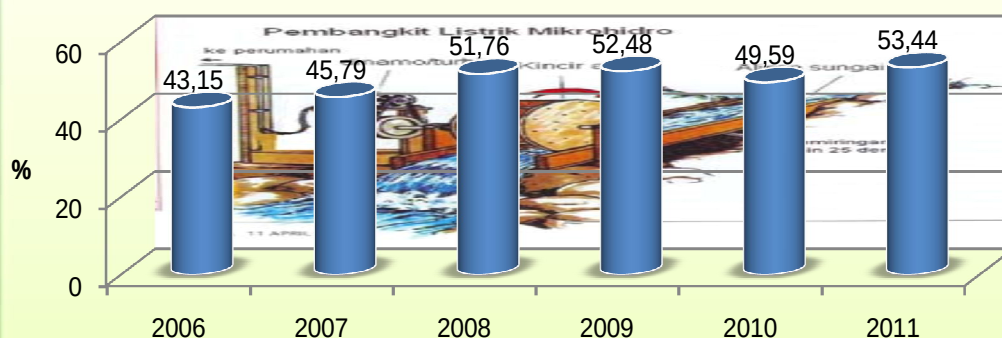
Gambar 4.17 Perkembangan jumlah PLTMH di Provinsi Jambi



Selanjutnya terhadap perkembangan kelistrikan di Provinsi Jambi tergambar rasio elektrifikasi dari tahun 2006 – 2011 tertera pada grafik dibawah ini.

Gambar 4.18 Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi

RASIO ELEKTRIFIKASI PROVINSI JAMBI



Sejak Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melaksanakan Pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tahun 2010 pembangunan biogas dilakukan di 4 desa dalam 3 kabupaten yang berbeda, sedangkan untuk Tahun 2011 Pembangunan Biogas dilakukan di 6 (enam) lokasi. Lokasi pembangunan Biogas dari tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.66. Lokasi Pembangunan Biogas

No	Desa/Kec	Kab/Kota	Jumlah (Unit)	Tahun
1	Pesantren Al-hidayah, Kota Baru	Kota Jambi	1	2010
2	Desa Bukit Marau, Kecamatan Singkut	Kab. Sarolangun	1	2010
3	Kelurahan Wirot Agung, Kecamatan Rimbo Bujang	Kab.Tebo	2	2010
4	Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun	Kab. Sarolangun	2	2010
5	Desa Batin, Kecamatan Bajubang	Kab.Batanghari	1	2011
6	Dusun Merbau, Kampung 8 Nes, Sungai Buluh	Kab.Batanghari	1	2011
7	Pesantren Nurul Huda, Kec. Rimbo Bujang	Kab.Tebo	1	2011
8	Kecamatan Rimbo Bujang	Kab.Tebo	1	2011
9	Kelompok Tani Trikaya, Kec. Air Hitam	Kab. Sarolangun	1	2011
10	Kelompok Tani Sedio Rukun, Kec. Air Hitam	Kab. Sarolangun	1	2011

Selain mendorong penggunaan kotoran sapi sebagai energi alternatif, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi juga melaksanakan

Pembangunan Mesin Pengolah Biji dalam rangka pemanfaatan jarak sebagai sumber energi alternatif guna mewujudkan Desa Mandiri Energi berbasis Nabati. Pembangunan Mesin Pengolah jarak dilakukan di Dusun Baru, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Bungo.

2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan

Program ini bertujuan untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp31.127.000,00 Fisik terealisasi 100% dan Keuangan terealisasi sebesar 93,51%, yang direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hingga tahun 2011 tercatat 386 Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari 261 IUP Eksplorasi dan 125 IUP Operasi Produksi yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Kegiatan usaha pertambangan ini sangat rentang terhadap kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, dan dampak negatif lainnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa

Secara umum, program ini bertujuan untuk mengawasi perhitungan lifting Migas dan penyaluran Dana Bagi Hasil Migas serta untuk mensosialisasikan penggunaan LPG Tabung 3 Kg dan. Sebagai sumber penerimaan daerah, sektor ESDM telah memberikan kontribusi sekitar 7,5% dari Penerimaan Daerah melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas maupun Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum melalui Iuran Tetap (*Landrent*) dan Iuran Produksi (*Royalty*). Sementara untuk kegiatan Sosialisasi Penggunaan LPG Tabung 3 kg dan kompor gas dilakukan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat dan usaha mikro, untuk memasyarakatkan penggunaan kompor gas dan LPG tabung 3 kg sebagai sumber energi dalam kegiatan memasak sehari-hari.

Alokasi dana untuk Program ini adalah sebesar Rp175.589.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan : a) Inventarisasi perhitungan lifting Migas dan Penyaluran realisasi DBH Migas, b) Pengawasan Pengangkutan, Niaga BBM, Keselamatan dan Lindungan Lingkungan SPBU-SPBE, c) Sosialisasi penggunaan kompor gas dan LPG Tabung 3 Kg, dan d) Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang Migas. Berkaitan dengan kegiatan usaha migas, capaian lifting minyak bumi di Provinsi Jambi pada tahun 2011 adalah sekitar 17.700 Barel per hari, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai sekitar 13.000 Barel per hari, demikian juga lifting gas bumi yang mengalami peningkatan dari 38.000 Barel Oil Ekvivalen per hari menjadi sekitar 44.000 Barel Oil Ekvivalen per hari di tahun 2011.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan penambangan yang baik sehingga dapat terbina kegiatan usaha pertambangan umum dengan prinsip *Good Mining Practices* berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan. Program ini difokuskan pada pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta

perhitungan realisasi Dana bagi Hasil SDA Bidang Pertambangan Umum. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp210.000.000,00 dimana kegiatannya telah terealisasi 100% dan Keuangan terealisasi sebesar 97,77%.

Kegiatannya antara lain : a) Bimbingan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, b) Pengawasan dan Perhitungan PNPB Pertambangan Mineral dan Batubara, c) Masterplan pemanfaatan mineral dan batubara dalam rangka pengembangan kegiatan usaha pertambangan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi, belum optimalnya koordinasi dengan pihak instansi terkait kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, serta masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Solusi dalam pemecahan masalah ini salah satunya adalah dengan meningkatkan sumberdaya manusia dengan mengikuti diklat/pelatihan teknis, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan usaha pertambangan.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang berwawasan Lingkungan

Program ini difokuskan untuk mengetahui potensi bahan galian industri, mineral batubara, panas bumi serta mendeteksi bencana alam geologi di Provinsi Jambi dengan menginventarisir data kondisi dan lokasi bencana geologi, kawasan sumberdaya warisan geologi, informasi geologi lingkungan untuk penataan ruang kawasan andalan, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan lindung geologi, informasi air tanah untuk pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Adapun anggaran untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp483.125.000,00 yang dialokasikan untuk kegiatan : Inventarisasi Warisan Geologi (KARS Topografi dan Fosil) yang telah dilakukan di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi yang diarahkan pada wilayah barat Provinsi Jambi seperti Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo dan Kerinci, Penyelidikan Pendahuluan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Tua Minyak Bumi dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis.

Beberapa capaian kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral di tahun 2011, antara lain :

1. Jumlah Desa Berlistrik dari 1.416 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Jambi, baru 984 desa/kelurahan yang telah dialiri listrik, dan masih ada 432 desa/kelurahan lagi yang belum dialiri listrik. Namun berdasarkan target pencapaian kinerja bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat di dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, dimana target jumlah desa berlistrik pada tahun 2011 adalah sebanyak 793 desa/kelurahan, maka target pencapaiannya telah terpenuhi.
2. Berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci 2 x 90 MW oleh Group PT. Bukaka Teknik Utama, pada tahun 2011 telah dilakukan pembuatan jalan sepanjang 6 km dan telah dibangun 2 buah gudang bahan peledak yang digunakan untuk pembuatan terowongan air sepanjang 4,8 km dengan diameter 8 meter.
3. Rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara dari Sarolangun sampai Ujung Jabung sepanjang $\pm$ 240 km, dimana study kelayakan untuk

pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2011. Untuk pembangunan jalan tersebut telah dibentuk perusahaan konsorsium PT. Jambi Swarna Dwipa, dan pada tahun 2012 ditargetkan selesai dibangunnya tahap I yaitu jalan khusus angkutan batubara dari Mandiangin sampai dengan Pelabuhan Talang Duku sepanjang $\pm$ 100 km. Saat ini produksi batubara di Provinsi Jambi sekitar 300.000 ton per bulan yang dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat.

4. Melalui PT. Jambi Indoguna Internasional (BUMD), Provinsi Jambi pada tahun 2011 telah mendapat persetujuan alokasi gas sebesar 14,5 MMSCF yang akan digunakan untuk memproduksi LPG dengan pembangunan LPG Plant dan diperkirakan akan memproduksi sekitar 150 Metrik Ton per hari serta *Lean Gas* akan diperuntukkan sebagai energi primer untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 2 x 40 MW.

4.2.4. Pariwisata

Dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7.751 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%). Begitupun untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2010 sebanyak 957.760 orang, dan meningkat menjadi 1.122.350 orang pada tahun 2011 (17,19%).

Sementara itu untuk industri pariwisata di Provinsi Jambi, secara bertahap namun pasti menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah hotel, restoran dan rumah makan, dan biro perjalanan wisata. Secara global perkembangan kunjungan wisatawan dan industri pariwisata di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.67 Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan dan Usaha Pariwisata di Provinsi Jambi

No	Indikator	Periode			Perkembangan (%)
		2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6
I. WISATAWAN					
A. MANCANEGARA					
Terdiri dari :					
1.	Singapura	1.158	1.168	1273	
2.	Malaysia	1.564	1.595	1692	
3.	Thailand	-	3	7	
4.	Philipina	10	16	18	
5.	China	2.114	2.156	2531	
6.	Taiwan	982	995	1094	
7.	Jepang	441	449	453	
8.	India	641	653	655	
9.	Amerika	540	553	557	
10.	Australia	12	16	19	

11. Eropa	153	170	179	
12. Arab Saudi	-	2	26	
13. Iran	-	4	5	
14. Istanbul	-	2	3	
15. Denmark	-	2	4	
16. Korea	-	6	12	
17. Jerman	-	5	15	
T O T A L	7.615	7.751	8.543	10,22%
B. Nusantara	861.540	957.760	1.122.350	17,19%
II. Hotel :				
- Bintang	22 buah	23 buah	23 buah	0%
- Melati	118 buah	120 buah	123 buah	2,50%
III. Restoran	42 buah	48 buah	53 buah	10,42%
IV. Rumah Makan	415 buah	489 buah	572 buah	16,98%
V. Biro Perjalanan Wisata	51 buah	55 buah	56 buah	1,82%

Dalam mendukung pembangunan bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp1.656.763.550,00 untuk melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran program ini adalah penyebaran informasi mengenai potensi kepariwisataan daerah Jambi ke berbagai segmen pasar. Pendukung dana APBD untuk program ini sebesar Rp508.150.000,00 dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan; (a) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, (b) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dan (c) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah.

Aktifitas yang telah dilaksanakan antara lain mengikuti promosi pariwisata pada event Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta dan Kemilau Sumatera di Nangroe Aceh Darussalam, Famtrip ke Bukit Duabelas, melaksanakan pameran potensi pariwisata pada Jambi Emas Expo, Pekan Pesona Budaya Jambi Expo, dan Festival Masyarakat Danau Kerinci, serta melaksanakan pengkayaan materi pada website www.tourismjambi.com.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih belum optimalnya aktifitas promosi baik dari segi seleksi event/kegiatan yang akan diikuti, materi promosi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktifitas promosi pariwisata daerah.

Dalam menyikapi masalah tersebut perlu adanya peningkatan seleksi event/kegiatan yang akan diikuti, peningkatan kualitas dan kuantitas materi promosi, serta meningkatkan nilai jual potensi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media cetak maupun media elektronik.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas objek daerah tujuan wisata Provinsi Jambi melalui kegiatan Pengembangan Objek wisata unggulan. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana objek pariwisata unggulan, pengembangan

dan penguatan informasi dan data base potensi objek destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Masih rendahnya daya dukung pariwisata seperti akses sarana dan prasarana yang masih kurang, keterlibatan stakeholder yang kurang terpadu, SDM pengelola pariwisata (pemandu wisata) menjadi pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan terhadap pengembangan Destinasi pariwisata. Untuk itu koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta sinergitas dari pemerintah, Swasta dan Masyarakat seluruh stakeholder pariwisata agar terus ditingkatkan dalam memaksimalkan segala peluang dan potensi pariwisata yang ada.

3. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan potensi pariwisata Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, dan (b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp288.933.550,00.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; pengenalan produk wisata di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata di Kawasan Candi Muara Jambi dan Taman Rimba, serta pembinaan desa PNPM Pariwisata.

4.2.5. Bidang Kelautan Dan Perikanan

1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan produk hasil perikanan sehingga mempunyai nilai jual serta meningkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan dalam aspek kualitas dan kuantitas dari unit-unit pengolahan dan pemasaran.

Adapun sasaran dari program ini yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dari produksi yang berbasis lokal. Total dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini yaitu : Rp 636.060.000,00, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Promosi dan Publikasi kegiatan sektor perikanan, 2) Peningkatan pelayanan LPPMHP, 3) Pengembangan sentra pemasaran.

Adapun output dari Program ini yaitu: 1) Terpublikasikannya kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk olahan sebanyak 5 kali, 2) Terciptanya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan, khususnya memonitor kesegaran ikan, residu, dan bahan berbahaya, 3) Tersusunnya peta jaringan pemasaran guna meningkatnya kegiatan pemasaran komoditas perikanan di sentra-sentra pemasaran melalui.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu pasokan bahan baku terkadang tidak kontinyu, sehingga menyulitkan bagi para pedagang, untuk memenuhi permintaan pasar. Solusinya yaitu dengan mengalihkan bahan baku dari ikan laut menjadi ikan air tawar hasil budidaya.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya ikan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Sasaran program ini yaitu meningkatnya pendapatan pembudidaya skala kecil. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu : Rp 667.290.000,00. Adapun Kegiatan yang mendukung program pengembangan kesejahteraan petani yaitu: 1) Pengembangan kolam perkarangan masyarakat, 2) Pembinaan pondok pesantren, 3) Pemberdayaan desa mandiri pangan. 4) Restocking Ikan Perairan Umum

Adapun output dari kegiatan ini, 1) Terwujudnya pengembangan kolam perkarangan masyarakat, dengan penyediaan benih 20.000 ekor. 2) Terwujudnya bantuan benih ikan di desa Mandiri Pangan sebesar 36.700 ekor. 3) Terlaksananya penebaran benih ikan untuk tujuan restocking sebanyak 300.000 ekor. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu bertambahnya pendapatan dari pelaku usaha perikanan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan yang mengalami kenaikan sebesar 3,5% pertahun. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2010 sebesar Rp 11.200.000 pertahun dan tahun 2011 sebesar Rp 12.600.000,00 pertahun sehingga naik sebesar 12,5% pertahun. Sedangkan pendapatan nelayan pada tahun 2010 sebesar Rp48.300.000,00 dan tahun 2011 sebesar Rp 49.000.000,00 naik sebesar 1,10% pertahun. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.68 Tingkat pendapatan nelayan/pembudidaya ikan tahun 2010 s/d 2011

No	Jenis Usaha	Pendapatan nelayan/pembudidaya		Perkembangan (%)
		2010	2011*	
1	Nelayan	48.300.000	49.000.000	1,4
2	Pembudidaya	11.200.000	12.600.000	12,5

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan dari program ini yaitu untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran dari program ini yaitu optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan di pesisir. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp75.032.000,00. Sedangkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu Pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan masyarakat pesisir

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dalam bentuk bantuan 20.000 ekor ikan. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Hal ini tergambar dengan semakin banyaknya bertambahnya prosentase masyarakat pesisir yang melakukan usaha budidaya ikan di tambak, dengan kenaikan mencapai 5,8% sedangkan nelayan perikanan laut peningkatannya hanya 3,2%. Dengan demikian masyarakat pesisir yang selama ini menggantung mata pencahariannya dari usaha penangkapan ikan di laut, telah berganti secara bertahap ke usaha budidaya tambak.

Tabel 4.69 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2010 – 2011

No	Jenis Usaha	Jumlah RTP/Tahun		Perkembangan
		2010	2011*	
1	Perikanan Laut	2.437	2.517	3,2
2	Perairan umum	8.674	8.774	1,1
3	Budidaya kolam	10.170	10.645	4,7
4	Keramba dan Japung	6.844	7.422	8,4
5	Budidaya tambak	775	819	5,8
6	Budidaya mina padi	84	97	16,1
J u m l a h		28.984	30.274	3,1

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dari sektor budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menuju industrialisasi perikanan budidaya. Sasaran program ini yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup pembudidaya. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp3.027.848.000,00

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu 1). Pengembangan pembenihan ikan komersil, 2) Pengembangan ikan hias, 3). Pengembangan BBIS Kerinci, 4). Pengembangan proksimas semah, 5) Pengembangan budidaya ikan organik (trofik level), 6) Pengembangan budidaya air tawar kolam, 7). Pengembangan budidaya air payau, 8) Pengembangan unit pengolahan ikan perikanan budidaya, 9) Pengembangan budidaya air tawar di KJA, 10) Pengembangan minapolitan budidaya

Adapun output dari kegiatan ini yaitu: Terlaksananya pengembangan pembenihan ikan komersil 1) Terlaksananya pengembangan benih ikan komersil, berupa induk ikan, 4 ekor induk ikan Arwana dan 10 ekor induk ikan Koi, 2) Terlaksananya pengembangan ikan hias sebanyak 4 paket, 3) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di BBIS Kerinci, 4) Terlaksananya pengembangan proksimas ikan semah sebanyak 16.000 ekor benih, 5) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan organik sebanyak 39.000 ekor benih, 6) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di kolam dengan 420.000 ekor benih, 7) Terlaksananya pengembangan air payau sebanyak 105 ekor benih, 8) Terlaksananya pengembangan unit pengolahan ikan perikanan budidaya, 9) Terlaksananya pengembangan budidaya air tawar di KJA, 10) Terlaksananya pengembangan minapolitan budidaya

Tabel 4.70 Perkembangan Produksi Perikanan menurut jenis usaha tahun 2010-2011

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2010	2011*	
1	Kolam	15.840,00	19.915,30	25,7
2	Keramba	15.988,00	17.923,60	12,1
3	Tambak	2.097,00	2.252,20	7,4
4.	Mina Padi	8,3	8,4	1,2
Jumlah		84.881,50	91.616,20	18,2

* Angka sementara Tahun 2011

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan produksi tertinggi di tahun 2011 pada perikanan budidaya kolam sebesar 25,7 %, kenaikan produksi terendah terjadi pada Mina Pada yaitu 1,2% Sedangkan secara keseluruhan produksi budidaya naik sebesar 18,2 %. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khusus kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA).

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan khususnya dibidang penangkapan ikan. Sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah hasil peangkapan serta pendapatan nelayan. Adapun kegiatan yang mendukung program pengembangan perikanan tangkap yaitu :1) Optimalisasi Penangkapan Ikan (Revitaliasi Perikanan Tangkap), 2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 3) Pembuatan Kapal Perikanan ≥ 30 GT dan Alat Tangkap, 4) Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap.

Sasaran dari program ini yaitu tercapainya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas/keperluan bagi nelayan untuk melaut. Hal ini tergambar peningkatan produksi perikanan tangkap, dimana jumlah keseluruhannya mengalami peningkatan dari 50.945,3 ton pada tahun 2010 naik menjadi 51.516% pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 1,12%

Tabel 4.71 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2010 dan 2011

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2010	2011*	
I.	Perikanan Tangkap			
	a. Perairan Laut	44.523,30	44.700,90	0,4
	b. Perairan Umum	6.424,00	6.815,80	6,1
	Jumlah	50.945,30	51.516,70	1,12%

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu masih banyaknya lokasi nelayan dan pembudidaya ikan yang masih terpencar-pencar, sehingga sangat sulit dalam melakukan pembinaannya. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan tenaga penyuluh lapangan, yang berada di setiap kecamatan atau sentra perikanan.

6. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dana dalam pelaksanaan program ini Rp75.193.000,00 sedangkan kegiatan yang mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan yaitu : Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan

Pencapaian dari program ini yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati ikan melalui pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumberdaya ikan, seperti penggunaan listrik, racun dan bahan peledak. Hal ini terlihat dari tingkat pelanggaran penangkapan ikan menurun sebesar 100 % dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2010 pelanggaran perikanan sebanyak 8 kasus, sedangkan pada tahun 2011 tidak ditemukan pelanggaran penangkapan ikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, antara lain: terbatasnya tenaga penyidik perikanan yang ada, yang bisa melakukan penyidikan perkara. Adapun pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan patroli bersama dengan petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan sumberdaya alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Dana dalam pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini sebesar Rp248.004.000,00

Kegiatan yang mendukung program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam yaitu : 1) Kesehatan lingkungan dan pengendalian hama penyakit, 2) Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya alam. Pencapaian dari program ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan habitat ikan yang sehat yang disertai dengan terkendalinya hama dan penyakit ikan, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, serta bertambahnya populasi ikan sebagai hasil dari pemacuan stok ikan.

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih adanya sekelompok masyarakat yang belum sadar dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan, solusinya yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan repressif, bagi setiap para pelanggarnya.

4.2.6. Perindustrian Dan Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan Secara keseluruhan program ini bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp561.221.500,00 Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 473.522.700,00 (84,38%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan 7 kegiatan yang meliputi : 1) Penguatan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar terutama Terhadap Pengawasan Barang-barang Strategis, obat dan makanan, 2) Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD Metrologi, 3) Dukungan dan Fasilitasi Pasar Murah, 4) Kalibrasi dan verifikasi peralatan standar laboratorium kemetrologian, 5) Tera Ulang UTTP (Ukur, takar timbangan dan kelengkapannya) kemetrologian, 6) Pengawasan UTTP dan BDKT, 7) Pengawasan Distribusi Barang yang diatur (pupuk, minuman beralkohol, barang berbahaya)

Adapun output dari beberapa kegiatan di atas yaitu 1) Terlaksananya Penguatan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar terutama Terhadap Pengawasan Barang-barang Strategis, obat dan makanan di 11 kabupaten/kota, 2) Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD Metrologi di Kotabaru 3) Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Pasar Murah di 5 lokasi, 4) Terlaksananya Kalibrasi dan verifikasi peralatan standar laboratorium kemetrologian bagi tenaga pembantu sebanyak 50 OH, 5) Terlaksananya Tera Ulang UTTP (Ukur, takar timbangan dan kelengkapannya) kemetrologian di 11 kab/kota, 6) Terselenggaranya Pengawasan UTTP dan BDKT yang dilaksanakan oleh 30 orang hari, 7) Terselenggaranya Pengawasan Distribusi Barang yang diatur (pupuk, minuman beralkohol, barang berbahaya) di 6 kabupaten.

Capaian dari program ini terlaksananya pengawasan barang beredar dilakukan terhadap produk-produk barang beredar di pasar tradisional, swalayan baik produk dalam negeri maupun impor. Pengawasan dilakukan secara berkala dan khusus. Untuk pengawasan khusus/ perioduk, pada tahun 2011 telah dilakukan Pengawasan terhadap produk makanan dan minuman, Selang Gas, Regulator Tabung Gas, Kipas Angin, Lampu Swabalast (LHE). Pencapaian lainnya dari program ini yaitu terkendalinya kondisi ketersediaan stock dan harga barang pokok, penting dan strategis, dan berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2011, sebagai berikut : **1) Beras.** Harga rata-rata beras sepanjang tahun 2011 berkisar antara Rp6.500,00 – Rp9.500,00 perKg. Naiknya harga beras ini disebabkan berkurangnya stock di tingkat distributor. **2) Gula.** Harga gula selama tahun 2011 harga gula relatif stabil yaitu berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp11.000,00. Keadaan ini menggambarkan lancarnya pasokan gula ke Jambi dan stabilnya harga (stock yang cukup). **3) Minyak Goreng.** Harga minyak goreng selama tahun 2011 rata-rata berfluktuasi pada kisaran Rp9.500,00/Kg - Rp11.000,00/Kg. Harga tertinggi dicapai oleh minyak goreng bermerek (Bimoli Botol Spesial) Rp13.000,00/Kg. Sedangkan harga minyak goreng curah yang umumnya dikonsumsi masyarakat menengah kebawah berada pada tingkat yang wajar yaitu kisaran Rp9.500,00/Kg-Rp11.000,00/Kg. Tidak ada fluktuasi harga karena diimbangi oleh produk lokal, khususnya minyak curah. **4) Daging Sapi** selama tahun 2011 relatif stabil harganya yaitu rata-rata Rp70.000,00/Kg, kecuali menjelang lebaran H-3 hingga H-1 harga Daging mengalami kenaikan mencapai Rp85.000,00 Kemudian setelah itu kembali normal seperti biasa. Pada tahun 2011 harga telur ayam Bruiler berfluktuasi kisaran Rp935,00/butir – Rp1.000,00/butir. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh menghadapi hari-hari besar, sehingga permintaan meningkat. **5) Susu Bubuk.** Pada tahun 2011 harga terigu selama tahun 2011 relatif stabil yang mana harga berkisar antara Rp7.000 – Rp7.500. Harga susu bubuk pada tahun 2010 relatif stabil yang mana harga berkisar antara Rp25.000 – Rp26.000. **6) Cabe dan Bawang.** Harga cabe dan bawang dalam tahun 2011 mengalami kenaikan masing-masing ; cabe berkisar antara Rp16.000-Rp50.000 dan Bawang berkisar Rp10.000,00-Rp16.000. Kenaikan harga Cabe dan Bawang ini disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga mengganggu pola tanam petani, dan pada bulan puasa sebagian besar petani tidak melakukan panen, sehingga menyebabkan pasokan cabe berkurang, namun kondisi selanjutnya harga relatif stabil.

Sedangkan kegiatan kemetrologian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, kemetrologian telah melakukan kegiatan Tera ulang terhadap penggunaan alat-alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya). Kegiatan tera ulang UTTP dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan pengujian/pemeriksaan/tera ulang terhadap alat-alat UTTP yang digunakan untuk transaksi perdagangan yang ada di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Pada tahun 2011 jumlah UTTP yang ditera sebanyak 17.000 dengan jumlah uang tera yang diterima Rp121.000.000,00. Bila dibandingkan tahun 2010 jumlah UTTP yang ditera sebanyak 15.284 unit dan jumlah uang tera yang diterima sebesar Rp102.500.000,00 (yang dipungut berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2006). Berarti jumlah alat UTTP yang ditera meningkat sebanyak 1.716 unit atau 11%, dan uang tera yang diterima juga meningkat sebesar Rp18.500.000,00 atau 15,28%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan target penerimaan Jasa tera alat UTTP yang direncanakan tahun 2011 yaitu sebesar Rp121.000.000,00 berarti penerimaan Jasa tera alat UTTP tahun 2011 telah mencapai target yang telah direncanakan.

2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Besar

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja industri khususnya industri kecil sehingga mampu memberikan kontribusi bagi industri Provinsi Jambi. Sasarannya yaitu Peningkatan laju pertumbuhan industri dalam pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp1.286.791.500,00. Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.183.261.850,00 (91,95%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar dilaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan Kewirausahaan CEFE. 2) Pelatihan Desain Ayaman Bambu. 3) Sosialisasi Standarisasi dan Mutu Bata Genteng, 4) Pameran dan Promosi IK Regional dan local provinsi Jambi. 5) Sosialisasi penggunaan bahan tambahan makanan untuk IK pangan. 6) Pelatihan Motivator KUB Industri Kecil. 7) Pelatihan pengembangan desain pakaian batik dan produk konveksi bagi IK sandang/batik. 8) Penguatan kelembagaan usaha industry kecil. 9) Sosialisasi sertifikasi produk halal bagi IK Makanan. 10) Pelatihan pengolahan aneka makanan di desa mandiri pangan. 11) Fasilitasi dan dukungan pengembangan rumah tenun jambi. 12) Bintek peningkatan mutu produk industry bata dan genteng & AMDAL . 13) Visualisasi pengembangan dan permasyarakatan IK melalui media elektronik. 14) Pelatihan Calon Fasilitator GKM IK bagi Aparat Pembina.

Adapun output dari program/kegiatan di atas yaitu 1) Terlaksananya Kegiatan Kewirausahaan CEFE bagi 24 orang selama 14 hari. 2) Terselenggaranya Pelatihan Desain Ayaman Bambu bagi 15 orang selama 6 hari. 3) Terselenggaranya Sosialisasi Standarisasi dan Mutu Bata Genteng bagi 50 orang peserta, 4) Terlaksananya Pameran dan Promosi IK Regional dan local provinsi Jambi sebanyak 7 kali. 5) Terselenggaranya Sosialisasi penggunaan bahan tambahan makanan untuk IK pangan. 6) Terselenggaranya Pelatihan Motivator KUB Industri Kecil bagi 24 orang selama 5 hari. 7) Terselenggaranya Pelatihan pengembangan desain pakaian batik dan produk konveksi bagi IK sandang/batik bagi 22 orang selama 4 hari. 8) Terlaksananya Penguatan kelembagaan usaha industri kecil di 11 kab/kota. 9) Terselenggaranya Sosialisasi sertifikasi produk halal bagi IK Makanan sebanyak 40 orang. 10) Terselenggaranya Pelatihan pengolahan aneka makanan di desa mandiri pangan di 2 kabupaten. 11) Terlaksananya Fasilitasi dan dukungan pengembangan rumah tenun jambi bagi 4 orang selama 25 hari. 12) Terselenggaranya Bintek peningkatan mutu produk industry bata dan genteng & AMDAL bagi 50 orang peserta . 13) Terlaksananya Visualisasi pengembangan dan permasyarakatan IK

melalui media elektronik bagi 4 orang selama 2 hari. 14) Terselenggaranya Pelatihan Calon Fasilitator GKM IK bagi Aparat Pembina bagi 22 orang.

Capaian dari program ini tergambar dengan meningkatnya jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Provinsi Jambi pada tahun 2011 sebesar 17.800 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2010 berjumlah 16.979 unit usaha, berarti meningkat sebesar 821 unit usaha atau 4,84%.

Sedangkan penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2011 sebesar 49.114 orang, dibandingkan tahun 2010 sebesar 48.400 orang, berarti meningkat sebesar 714 orang atau 1,53%. Nilai Investasi yang terserap pada usaha Industri Kecil pada tahun 2010-2011 adalah sebesar Rp 54.967.075,00. berarti meningkat sebesar Rp1.050.530.000,00 atau 1,95% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 53.916.545.000,00, dengan peningkatan sebesar sebesar Rp1.050.530.000,00 atau 1,95%. Adapun nilai produksi usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2010-2011 sebesar Rp192.865.650.000 berarti meningkat sebesar Rp6.500.000.000 atau 3,49%.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi negara. Sasaran Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp420.100.000,00 Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 385.577.400,00 (91,78%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi : 1) Pelatihan Teknik Akses dan Survey Pasar melalui internet 2) Kegiatan Pameran Luar Negeri dengan sasaran yang ditujukan kepada para perajin dan produk khas Jambi . 3) Diklat Teknis Prosedur Ekspor. 4) Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah.

Adapun output dari beberapa kegiatan di atas yaitu 1) Terselenggaranya Pelatihan Teknik Akses dan Survey Pasar melalui internet bagi 30 orang selama 3 hari, 2) Terselenggaranya Pameran Luar Negeri dengan sasaran yang ditujukan kepada para perajin dan produk khas Jambi sebanyak 1 paket . 3) Terselenggaranya Diklat Teknis Prosedur Ekspor bagi 30 selama 3 hari. 4) Terselenggaranya Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah bagi 150 orang . Capaian dari program tersebut di atas yaitu terealisasinya peningkatan ekspor non migas Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2010 nilai ekspor mencapai US\$.1.209,072 juta. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor non migas Provinsi Jambi tahun 2011 sebesar US\$. 1.415,828 juta, maka telah terjadi kenaikan sebesar 17,10 %. Sementara realisasi ekspor migas tahun 2011 sebesar US\$ 391,932 juta.

Sedangkan komoditi ekspor Provinsi Jambi selama kurun dua tahun terakhir masih didominasi oleh komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll) dan Pulp dan produk Tissue. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 80 Negara, dengan 5 negara tujuan utama ekspor Singapura, Malaysia, Jepang, China dan Amerika Serikat.

4. Program Penataan Struktur Industri

Program ini bertujuan untuk menata struktur industri dan mengembangkan program klaster industri, sehingga ada keterkaitan dan link antara satu industri

dengan lainnya. Keterkaitan tersebut baik dalam hal bahan baku maupun jaringan pemasaran sehingga tercipta kerjasama yang menguntungkan dan meningkatkan efisiensi. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp157.257.000,00 Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 137.105.000,00 (87,19%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yang meliputi kegiatan sosialisasi, identifikasi dan bimbingan teknis, dengan rincian : **1)** Kegiatan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan perizinan usaha industri. **2)** Kegiatan Identifikasi Potensi Bahan Baku pada Industri Hilir Karet. **3)** Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penerapan SNI Industri AMDK **4)** Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks).

Adapun output dari program kegiatan diatas yaitu **1)** Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan perizinan usaha industry bagi 30 orang selama 2 hari. **2)** Terlaksananya Identifikasi Potensi Bahan Baku pada Industri Hilir Karet sebanyak 1 paket. **3)** Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penerapan SNI Industri AMDK bagi 30 orang selama 2 hari, **4)** Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks) bagi 35 orang selama 2 hari. Capaian dari program ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada tahun 2011 berdasarkan penerbitan SIUP tercatat 2.878 unit usaha, jika dibandingkan tahun 2010 sejumlah 2.7340 unit usaha, berarti mengalami peningkatan sejumlah 144 unit usaha atau 5,27%. Penerbitan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas Perindag/Kopperindag/ Tamben Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 jumlah pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tercatat 2.878 terdiri dari Pedagang Besar (PB) 107 unit usaha, Pedagang Menengah (PM). 329 unit usaha dan Pedagang Kecil (PK) 2.200 unit usaha. Berdasarkan hasil monitoring selama tahun 2011 jumlah perusahaan yang telah terdaftar tercatat 4.817 usaha terdiri dari PT. 493 unit usaha, CV sebanyak 1.324 unit usaha, Koperasi 123 unit usaha, Firma 43 unit usaha, Perorangan 2.751 unit usaha dan bentuk Badan Usaha Lain (BUL) sebanyak 83 unit usaha, izin dagang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota di pelayanan terpadu satu pintu.

Jumlah pasar tradisional di Provinsi Jambi tercatat 44 unit usaha belum termasuk pasar desa/kalangan yang aktivitasnya tidak setiap hari. Selain itu dibeberapa Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Jambi bermunculan toko/mini market yang dikelola secara swalayan, sementara untuk pasar moderen (gerai diatas 2.000 m²) di Ibu kota Provinsi Jambi tercatat sebanyak 90 unit yaitu di Kota Jambi sebanyak 30 unit dan Kabupaten/Kota lainnya sebanyak 60 unit. Adapun jumlah usaha perdagangan di Provinsi Jambi tahun 2011 tercatat sebanyak 2.878 (formal) unit usaha dengan klasifikasi ; Pedagang Kecil (PK) non formal sebanyak ± 5.000 unit usaha, Pedagang menengah (PM) sebanyak 329 unit usaha dan Pedagang besar sebanyak 107 unit usaha.

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri sehingga antara produsen dengan konsumen sama-sama diuntungkan dan terlindungi. Salah satu cara adalah dengan memperpendek distribussi atau memperlancar distribusi yang sudah ada.

Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp436.615.000,00 Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp361.670.000,00 (82,83%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan

kegiatan yang meliputi : 1) Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet, 2) Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal, 3) Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Adapun output dari program/kegiatan diatas yaitu 1) Terlaksananya Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet bagi 40 orang di 5 kabupaten, 2) Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal bagi 40 orang selama 2 hari, 3) Terselenggaranya Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri bagi 25 orang 4 kali. Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan pasar lelang konvensional maupun pasar lelang agro forward (penyerahan kemudian). Selama tahun 2011 telah diadakan 4 kali pasar lelang Agro yang cukup berhasil dengan baik dimana pasar lelang dapat respon positif dari produsen dan konsumen. Total transaksi pasar lelang agro tahun 2011 mencapai Rp25.800.138.468,00. Jika dibanding tahun 2010 Rp4,5 Milyar,00 berarti mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai 600%. Penyebab naiknya transaksi lelang komoditi agro ini dikarenakan pelaku usaha mulai memanfaatkan peluang pasar lelang agro dan makin dikenalnya komoditi agro Provinsi Jambi sebagai produk unggulan. Komoditi yang diperdagangkan dalam lelang agro adalah Beras, jagung, pinang, Cassiavera, jahe merah, jahe putih, nenas, jeruk, bokor, kunyit, gaharu, kelapa, cangkang sawit, cengkeh, coklat dan kemiri.

4.2.7. Ketranasmigrasian

Pada tahun anggaran 2012 bidang ketranasmigrasian melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.68 yang dipergunakan untuk mendanai program;

1. Program pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya sasaran program tersebut adalah dengan kegiatan pengamanan ternak di unit pemukiman transmigrasi, kegiatan pembinaan dan monitoring hasil produksi petani masyarakat, kegiatan pengendalian obat di gudang farmasi kabupaten, kegiatan peningkatan gizi keluarga dan pemberantasan penyakit kecacingan di UPT, penanganan permasalahan di lokasi transmigrasi, publikasi melalui informasi promosi potensi lokasi ke daerah asal dan kabupaten penerima, kerja sama antar daerah dan kemitraan, studi banding Kota Terpadu Mandiri (KTM), Operasional Pokja KTM tingkat Provinsi, Pengembangan KUD daerah Transmigrasi, Desain teknis peningkatan jalan poros/penghubung di UPT, Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan lingkungan di UPT, pengembangan kelompok swadaya masyarakat dan usaha home industry di UPT, Inventarisasi pemenuhan syarat persyaratan pengakhiran status UPT, penguatan kelembagaan dan pembinaan kesenian, dengan terlaksananya kegiatan ini maka akan terpelihara dan terjaganya keamanan ternak di daerah transmigrasi, terkontrolnya hasil produksi petani dan terpasarkannya hasil produksi petani, terkendalinya pemasukkan obat untuk tanaman ke petani, sehingga petani bisa menghasilkan tanaman yang baik, dan terhindar dari penyakit tanaman, meningkatnya gizi keluarga para transmigran.

Program transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah/kawasan di provinsi Jambi, pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi, adapun program yang dilaksanakan adalah program pengembangan

wilayah transmigrasi. Keberhasilan transmigran di provinsi Jambi dapat dilihat dari keberhasilan transmigran sebagai juara harapan II transmigrasi teladan tingkat Nasional tahun 2011, Ruhadi dari UPT Tebing Jaya Kabupaten Batanghari.